



BUPATI PENAJAM PASER UTARA

PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA NOMOR 13 TAHUN 2013

TENTANG

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah melalui Kepala Bappeda telah menyusun Rancangan Akhir Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2014 berdasarkan hasil Musrenbang;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2014;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Rpjmd) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2009 Seri E Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2014.**

Pasal 1

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2014 adalah Rencana Tahunan yang menggambarkan Visi, Misi, Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah, Sasaran, Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Daerah, Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2013.

Pasal 2

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2014, sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, terdiri dari:

- BAB I : Pendahuluan;
- BAB II : Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun 2012 dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan;
- BAB III : Rancangan Kebijakan Ekonomi Daerah;
- BAB IV : Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2014;
- BAB V : Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah; dan
- BAB VI : Penutup.

Pasal 3

- (1) Rincian lebih lanjut Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2014 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Berpedoman pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2014, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Penajam Paser Utara menyusun Kebijakan Umum Anggaran APBD dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS).
- (2) Selanjutnya KUA (Kebijakan Umum APBD) dan PPAS (Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara) sebagaimana ayat (1) dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penajam Paser Utara untuk kemudian menjadi Nota Kesepakatan KUA dan PPA (Prioritas dan Plafon Anggaran).
- (3) Berdasarkan KUA dan PPA sebagaimana ayat (2) disusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Tahun 2014.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 17 Juni 2013

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. ANDI HARAHAHAP

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 17 Juni 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. ABDUL ZAMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2013 NOMOR 13.

**Lampiran : PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR : 13 TAHUN 2013
TANGGAL : 17 JUNI 2013**

**RENCANA KERJA
PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
TAHUN 2014**

DAFTAR ISI		i - 1
BAB I PENDAHULUAN		I - 1
1.1	LATAR BELAKANG	I - 2
1.2	DASAR HUKUM PENYUSUNAN	I - 2
1.3	HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN	I - 3
1.4	SISTEMATIKA DOKUMEN RKPD	I - 4
1.5	PROSES PENYUSUNAN	I - 5
1.6	MAKSUD DAN TUJUAN	I - 6
BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2011 DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN		II - 1
2.1	GAMBARAN UMUM KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA	II - 1
2.1.1	ASPEK GEOGRAFIS DAN DEMOGRAFI	II - 2
2.1.2	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	II - 4
2.1.3	ASPEK PELAYANAN UMUM	II - 5
2.1.4	ASPEK DAYA SAING DAERAH	II - 12
2.2	EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD TAHUN 2012	II - 19
BAB III RANCANGAN KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH		III - 1
3.1	ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH	III - 1
3.1.1	KONDISI EKONOMI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2012 DAN PERKIRAAN TAHUN 2013	III - 2
3.1.2	KONDISI EKONOMI KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2012	III - 4
3.2	ARAHAN KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH	III - 8
3.3	ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH	III - 6
3.3.1	PROYEKSI KEUANGAN DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN	III - 9
3.3.2	ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH	III - 9
3.3.2.1	ARAH KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	III - 9
3.3.2.2	ARAH KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	III - 12
3.3.2.3	ARAH KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	III - 15
BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2013		IV - 1
4.1	TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN	IV - 1
4.2	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA	IV - 3

BAB	V	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH	V - 1
BAB	VI	PENUTUP	VI - 1
	6.1	KAIDAH PELAKSANAAN	VI - 1
	6.2	PENUTUP	VI - 1

B A B I P E N D A H U L U A N

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) pasal 24 ayat 2 ditegaskan bahwa BAPPEDA diamanahkan untuk menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). RKPD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2014 merupakan dokumen perencanaan yang sangat strategis karena merupakan embrio penyusunan APBD. Dokumen RKPD tersebut berfungsi sebagai acuan dan pedoman bagi Pemerintah Kabupaten serta seluruh jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah selama 1 (satu) tahun. RKPD juga menjadi landasan penyusunan RAPBD tahun 2014, untuk mengarahkan kebijakan program dan kegiatan yang akan direalisasi dalam RAPBD. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2014 disusun dengan mengacu pada RKP, RKPD Provinsi Kalimantan Timur dan RPJMD Kabupaten Penajam Paser Utara serta memperhatikan aspirasi stakeholder pembangunan di Kabupaten Penajam Paser Utara.

Proses penyusunan RKPD dikoordinasikan oleh BAPPEDA bersama dengan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dilakukan melalui tahapan : pengumpulan data dan informasi melalui jaring aspirasi, analisa, penyusunan draft dan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) dalam rangka membahas draft RKPD. Musrenbang dilaksanakan dengan melibatkan stakeholder baik unsur pemerintah maupun non pemerintah. Melalui tahapan-tahapan tersebut diharapkan RKPD yang dihasilkan dapat mengakomodasi kebutuhan masyarakat dengan tetap mempertimbangkan kemampuan dan koridor perencanaan jangka menengah dan jangka panjang.

RKPD Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2014 disusun dengan menerapkan prinsip *good governance*, yaitu konsep-konsep perencanaan disusun partisipatif, transparan, akuntabel, dan didasarkan pada pengembangan serta perumusan berbagai kebijakan publik yang taktis, stratejik, serta mampu memberdayakan semua pelaku utama pembangunan.

RKPD disusun berdasarkan kriteria sebagai berikut, pertama sesuai dengan visi, misi, tujuan, sasaran dan kebijakan yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan yang ditetapkan oleh daerah (RPJMD Kabupaten Penajam Paser Utara); kedua sesuai dengan aspirasi masyarakat yang berkembang dan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan

daerah; ketiga bersifat fleksibel untuk dijabarkan lebih lanjut dan memberi peluang untuk kreativitas pelaksanaannya.

Secara normatif penyusunan RKPD Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2014 didasarkan pada fungsi anggaran, karena investasi dana APBD mempunyai tiga fungsi utama yakni :

1. Fungsi alokasi, yaitu pembiayaan untuk kegiatan pembangunan yang tidak mungkin dilaksanakan oleh masyarakat/swasta karena bersifat publik services seperti penanganan prasarana dasar, penyediaan infrastruktur;
2. Fungsi distribusi, yaitu pembiayaan diarahkan untuk pemerataan, keadilan sosial dan mengurangi kesenjangan, antara lain meliputi penanganan kemiskinan, pengembangan wilayah dalam rangka pemerataan pembangunan;
3. Fungsi stabilisasi yaitu pembiayaan diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, perluasan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat serta stabilitas keamanan dan ketertiban.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2014 didasarkan pada beberapa peraturan perundangan yang berlaku, yaitu :

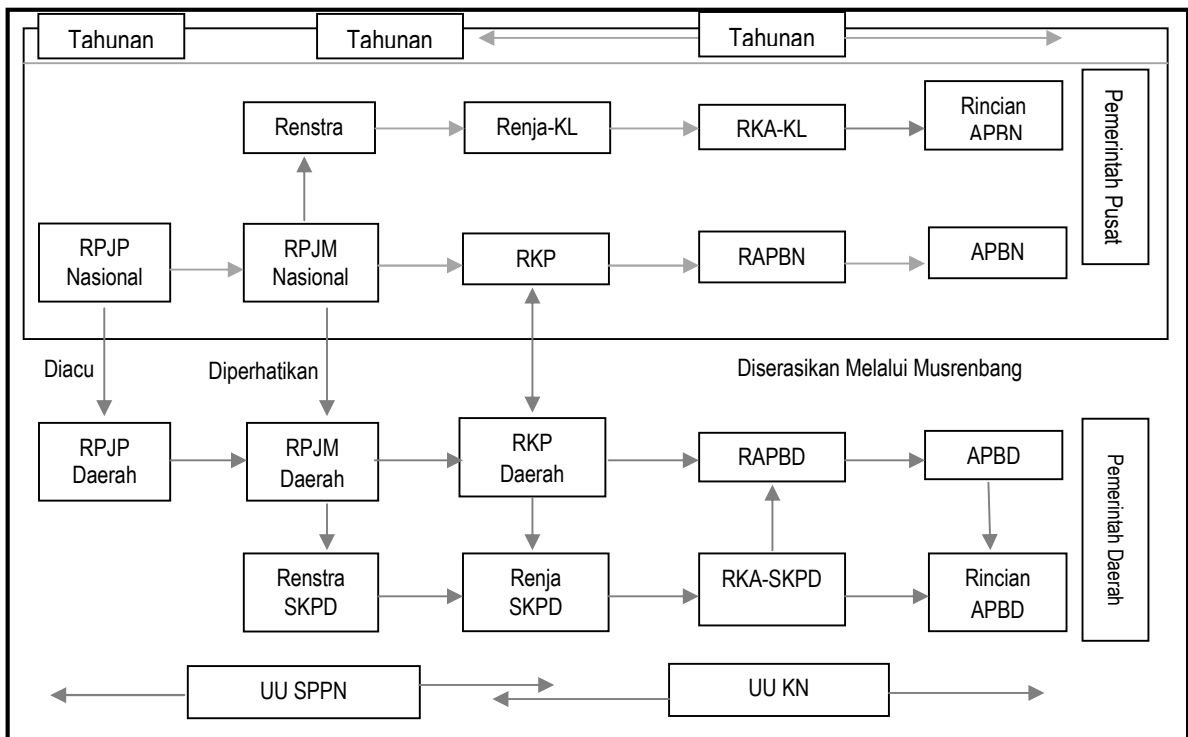
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan

- Lembaran Negara Nomor 4502);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4577);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
 10. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2009 Seri E Nomor 1).
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2012 Nomor 1).

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Sesuai dengan UU No. 25 Tahun 2004 dapat dijelaskan bahwa, RKPD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2014 merupakan penjabaran tahunan dari RPJMD Kabupaten Penajam Paser Utara. RKPD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2014 dijabarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2014. Adapun dalam penyusunannya RKPD Kabupaten Penajam Paser Utara mengacu pada dokumen-dokumen perencanaan yang terkait seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Renstra SKPD. Diagram alur keterkaitan antar dokumen perencanaan dengan dokumen RKPD Kabupaten Penajam Paser Utara dapat dilihat pada diagram berikut ini.

Gambar I - 1 : Diagram Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan (UU No.25 tahun 2004)



1.4 Sistematika Dokumen RKPD

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah dan Permendagri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah maka sistematika penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2014 meliputi :

BAB I PENDAHULUAN, berisi tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan,

hubungan antar dokumen, sistematika dokumen RKPD, proses penyusunan serta maksud dan tujuan RKPD Tahun 2014;

- BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2012 DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN, berisi gambaran umum kondisi Kabupaten Penajam Paser Utara meliputi : aspek geografi dan demografi; selanjutnya evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun 2012, realisasi RPJMD dan permasalahan pembangunan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah dan identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah;
- BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH berisi arah kebijakan ekonomi daerah yang meliputi kondisi ekonomi daerah tahun 2012 dan perkiraan tahun 2013, tantangan dan prospek perekonomian daerah tahun 2013 dan tahun 2014, serta arah kebijakan keuangan daerah;
- BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH berisi tujuan dan sasaran pembangunan serta prioritas pembangunan pada tahun 2014;
- BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH, berisi rencana program dan kegiatan prioritas SKPD tahun 2014;
- BAB VI PENUTUP.

1.5 Proses Penyusunan

Dalam proses penyusunan RKPD Kabupaten Penajam Paser Utara menggunakan prinsip - prinsip bottom up dan top down planning, prioritas dan realisasi, dijabarkan dalam :

1. Proses Penyusunan RKPD melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) di berbagai tingkatan secara berjenjang, yakni tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten. Pendekatan ini dilakukan dengan membuka partisipasi seluas-luasnya kepada wilayah dan perangkat daerah serta pemangku kepentingan (*stakeholder*) untuk menyampaikan rancangan program pembangunan sesuai dengan sasaran dan kebijakannya masing-masing. Bersamaan dengan itu disampaikan batasan umum sesuai dengan peraturan dari Pemerintah Pusat maupun Provinsi, antara lain tentang prioritas pembangunan dan alokasi dana;
2. Keseluruhan program pembangunan dilaksanakan dan dipilih sesuai dengan

prioritas yang telah ditentukan dan didistribusikan ke seluruh bidang pembangunan guna menjamin sinergitas pembangunan antar Daerah, Provinsi dan Pusat;

3. Proses penyusunan RKPD Kabupaten Penajam Paser Utara selain berdasarkan prioritas, juga mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

1.6 Maksud Dan Tujuan

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2014 memuat prioritas pembangunan, yang dijabarkan dalam program-program pembangunan untuk memberikan pedoman bagi semua pelaku dan pengelola pembangunan dalam melaksanakan kegiatan pembangunan. Satuan Kerja Perangkat Daerah berkewajiban menyusun Rencana Kerja sebagai manifestasi dari pelaksanaan RKPD. Dengan demikian dokumen ini akan bermanfaat bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam mewujudkan keterpaduan dan mensinergikan pembiayaan pembangunan. Oleh karena itu program-program pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2014 ini akan menjadi acuan dalam penyusunan KUA-PPAS (Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2014.

Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2014 adalah :

- a. Mewujudkan sinergitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan antar wilayah, antar bidang dan antar Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- b. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas sumber daya dalam pembangunan daerah.
- c. Menetapkan target capaian kinerja program pembangunan tahunan.

B A B I I
E V A L U A S I H A S I L
P E L A K S A N A A N R K P D T A H U N 2 0 1 2
D A N C A P A I A N K I N E R J A
P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N

2.1 Gambaran Umum Kabupaten Penajam Paser Utara

2.1.1 Aspek Geografi Dan Demografi.

a. Aspek Geografi

Kabupaten Penajam Paser Utara merupakan bagian integral dari wilayah Provinsi Kalimantan Timur yang dibentuk berdasarkan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur. Secara administratif pemerintahan terbagi dalam 4 kecamatan, 24 kelurahan dan 30 desa sebagaimana dapat dilihat dalam Tabel II.1 berikut :

Tabel II.1: Jumlah Desa, Kelurahan Dan Kecamatan di Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2012

No.	Kecamatan	Kelurahan	Desa	Luas Wilayah (Km ²)
1.	Babulu	0	12	399,45
2.	Waru	1	3	553,88
3.	Penajam	19	4	1.207,37
4	Sepaku	4	11	1.172,36
Jumlah		24	30	3.333,06

Sumber Data : KDA tahun 2012

Kabupaten Penajam Paser Utara mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Loa Kulu dan Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara, Kota Balikpapan dan Selat Makassar
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Longkali, Kabupaten Paser dan Selat Makassar.
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Bongan Kabupaten Kutai Barat dan Kecamatan Longkali Kabupaten Paser.

Luas wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara adalah 3.333,06 Km² yang

terdiri dari 3.060,82 Km² luas daratan dan 272,24 Km² luas lautan. Wilayah perairan laut terbesar meliputi tiga kecamatan yaitu kecamatan Babulu, Waru dan Penajam, ketiga kecamatan tersebut berbatasan langsung dengan Selat Makassar.

Kondisi wilayah pesisir Kabupaten Penajam Paser Utara sebagian mengalami abrasi yang disebabkan oleh air laut. Untuk menjaga kelestarian ekosistem wilayah pesisir, maka pengelolaan hutan bakau (*mangrove*) perlu mendapat perhatian yang serius dari pemerintah daerah dan masyarakat setempat.

Rata-rata hari hujan di Kabupaten Penajam Paser Utara 11 hari perbulan dengan rata-rata curah hujan 171,15 mm per bulan. Sedangkan curah hujan di atas 300 mm perbulan hanya terjadi pada bulan Desember. Curah hujan sebesar 100 – 300 mm per bulan pada umumnya terjadi pada bulan Januari sampai bulan Juni dan pada bulan September sampai bulan Nopember.

Kondisi iklim di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara termasuk wilayah iklim *tropika humida*. Temperatur udara rata-rata sebesar 26⁰C sampai dengan 34⁰C dengan perbedaan temperatur pada waktu siang dan malam berkisar antara 5-7⁰C. Temperatur minimum terjadi antara bulan Oktober sampai bulan Agustus dan berdasarkan pembagian iklim di wilayah Kalimantan Timur, Kabupaten Penajam Paser Utara termasuk zona 1 dengan rata-rata curah hujan berkisar antara 1500 sampai 2000 mm pertahun.

b. Aspek Demografi.

Penduduk merupakan salah satu modal dasar pembangunan nasional, dan merupakan pelaku dan sasaran pembangunan. Penduduk Kabupaten Penajam Paser secara rinci dapat dilihat pada tabel II.2 dan grafik II.1 sebagai berikut :

Tabel II.2 : Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin tahun 2012

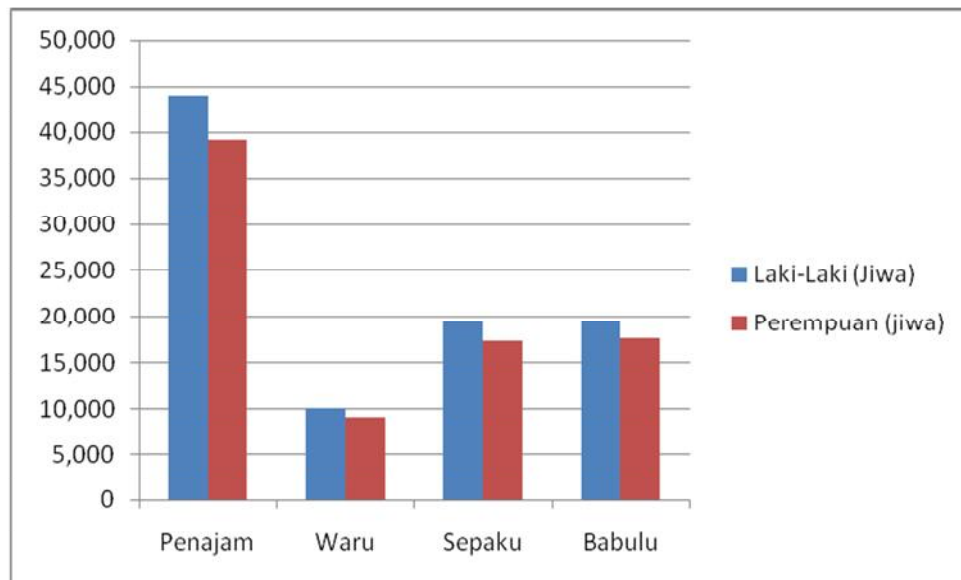
No.	Kecamatan	Jenis Kelamin		Jumlah Penduduk (Jiwa)
		Laki-Laki	Perempuan	
1.	Penajam	43.963	39.076	83.039
2.	Waru	10.024	9.051	19.075
3.	Sepaku	19.352	17.253	36.605
4.	Babulu	19.442	17.505	36.947
TOTAL		92.781	82.885	175.666

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Jumlah penduduk Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2011 sebanyak 180.182 jiwa dan pada tahun 2012 menjadi 175.666 jiwa. Penurunan jumlah

penduduk ini dikarenakan telah terverifikasi secara akurat dengan adanya program e-KTP nasional. Jika dilihat menurut jenis kelamin, rasio jenis kelamin penduduk tahun 2012 tercatat 112,94 artinya penduduk laki-laki lebih banyak dibanding penduduk perempuan atau setiap 100 penduduk perempuan terdapat 112 penduduk laki-laki.

Grafik II.1 : Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Tahun 2012



Sumber : Data Olahan

Jumlah pencari kerja di Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2012 sebanyak 952 orang dibandingkan dengan tahun 2011 sebanyak 739 orang atau mengalami peningkatan sebesar 29%. Jika dilihat dari tingkat pendidikannya jumlah para pencari kerja yang paling banyak adalah pencari kerja yang berpendidikan SLTA sebanyak 595 orang dan sudah ditempatkan sebanyak 270 orang, yang belum ditempatkan sebanyak 325 orang. Urutan kedua jumlah terbesar adalah pencari kerja berpendidikan DIII/Setingkat sebanyak 152 orang, dengan 18 orang telah ditempatkan 114 orang belum ditempatkan. Sisanya adalah pencari kerja yang berpendidikan SLTP sebanyak 46 orang, tingkat SD 22 orang dan tidak tamat SD sebanyak 3 orang.

Tabel II.3 : Pencari kerja menurut tingkat pendidikan tahun 2012

No.	Pendidikan	Terdaftar	Ditempatkan	Belum ditempatkan
1.	Tidak tamat SD	3	-	3
2.	Tamat SD	22	17	5
3.	SLTP	46	33	13
4.	SLTA	595	270	325
5.	Diploma I, II, Akta I, II	2	-	2
6.	Diploma III/Setingkat	152	44	108
7.	Sarjana	132	18	114

Jumlah	952	428	570
--------	-----	-----	-----

Sumber : Dinas Sosial dan Tenaga Kerja

Persentase jumlah tenaga kerja menurut lapangan usaha didominasi oleh sektor pertanian, perburuhan, kehutanan, perkebunan dan perikanan sebesar 48%, persentase kedua terbesar pada sektor perdagangan, rumah makan dan jasa akomodasi sebesar 19%, sektor Jasa masyarakat, sosial dan perorangan sebesar 13%, sektor Industri pengolahan sebesar 7%, sektor konstruksi sebesar 5%, sektor angkutan, pergudangan dan komunikasi sebesar 4%, dan sektor pertambangan sebesar 3%, adapun sektor-sektor lapangan usaha lainnya dibawah 1%, secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.4 : Tenaga Kerja 15 Tahun Ke Atas Yang bekerja Menurut Lapangan Usaha Tahun 2011

No.	Lapangan usaha	2011
1.	Pertanian, perburuhan, kehutanan, perkebunan dan	31.891
2.	Pertambangan dan penggalian	2.112
3.	Industri pengolahan	4.543
4.	Listrik, gas dan air minum	155
5.	Konstruksi	3.376
6.	Perdagangan,rumah makan dan jasa akomodasi	12.913
7.	Angkutan, pergudangan dan komunikasi	2.948
8.	Lembaga keuangan,real estat,usaha persewaan dan jasa perusahaan	156
9.	Jasa masyarakat,sosial dan perorangan	8.785
10.	Lain-lain	155
Jumlah		67.034

Sumber Data : KDA tahun 2012

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Penajam Paser Utara saat ini berada pada angka 74,03 atau berada pada urutan ke 9 (Sembilan) se-Kalimantan Timur dan berada dibawah angka IPM rata-rata provinsi yaitu 76,22. Hal ini menunjukkan kesejahteraan di Kabupaten Penajam Paser Utara perlu ditingkatkan, baik dibidang pendidikan, kesehatan dan tenaga kerja.

Indikator kesejahteraan sosial dibidang pendidikan adalah angka melek huruf yang selalu cenderung meningkat dari 95,55 persen pada tahun 2010 menjadi 95,57 persen pada tahun 2011, ini menunjukkan penduduk buta aksara menurun menjadi 4,43 persen. Rata-rata penduduk usia 10 tahun ke atas yang berpendidikan rendah

(tidak/belum sekolah dan tamat SD sd. SLTP) prosentasenya semakin menurun dari sebesar 77,05 persen pada tahun 2010 menjadi 73,21 persen pada tahun 2011. Hal ini tidak terlepas dari peran pemerintah dalam mencanangkan program wajib belajar 12 tahun.

Indikator kesejahteraan sosial dibidang kesehatan adalah Angka harapan hidup (AHH) menunjukkan rata-rata umur penduduk mulai lahir sampai dengan akhir hidupnya. Angka harapan hidup (AHH) Kabupaten Penajam Paser Utara saat ini adalah sekitar 71,63 tahun sedangkan provinsi sekitar 71,40. Hal ini perlu upaya penurunan angka mortalitas dengan pengendalian fertilitas, karena keberhasilan mengurangi laju pertumbuhan penduduk akan mempermudah pengendalian pembangunan kesejahteraan masyarakat.

Indikator (PDRB perkapita) kesejahteraan masyarakat berkaitan dengan ekonomi adalah pengeluaran perkapita penduduk Kabupaten Penajam Paser Utara yang berada pada angka Rp. 646.930,- atau berada pada ranking ke 13 di Provinsi Kalimantan Timur dengan rata-rata pengeluaran perkapita sebesar Rp. 871.251.

2.1.3 Aspek Pelayanan Umum.

Kinerja pembangunan pada aspek pelayanan umum merupakan gambaran dari hasil pelaksanaan pembangunan yang mencakup kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, seni budaya dan olah raga yang mencakup urusan wajib.

a. Pendidikan

Program atau kebijakan pemerintah dewasa ini dalam bidang pendidikan pada hakekatnya adalah bertujuan untuk menampung jumlah murid sebanyak-banyaknya. Penekanan program adalah pada aspek kuantitas. Hal ini sangat dimaklumi karena pemerintah ingin agar penduduk Kalimantan Timur khususnya Kabupaten Penajam Paser Utara dan penduduk Indonesia pada umumnya terbebas dari masalah buta huruf, buta bahasa Indonesia dan buta pendidikan dasar. Selain itu aspek kualitas juga harus mendapat perhatian. Dalam rangka menyongsong era globalisasi, dimana berbagai pengaruh dari luar masuk dengan bebas ke negeri ini. Kualitas harus dimiliki untuk siap bersaing dengan pihak luar.

Angka partisipasi kasar (APK) Taman Kanak-Kanak (TK/RA) selama tiga tahun berturut-turut sejak tahun 2009 - 2011 mengalami penurunan hingga 23,52%. Demikian juga APK SD/MI mengalami penurunan selama 4 tahun berturut-turut sejak 2009 - 2012 angka partisipasi SD mencapai 87,27%.

APK penduduk usia SMP/MTs tahun 2010 mengalami peningkatan menjadi 96,99% dari tahun 2009, namun ditahun 2011 dan 2012 APK SMP/MTS terus mengalami penurunan dari angka 73,60% ditahun 2011 menjadi 68,86% ditahun 2012.

Angka partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK mengalami fluktuasi capaian pada tahun 2010 mengalami peningkatan 5,57% dari tahun 2009, sedangkan ditahun 2011 mengalami penurunan sebesar 12,13% dari tahun sebelumnya namun ditahun 2012 mengalami peningkatan sebesar 9,85% dari tahun sebelumnya atau menjadi 55,37%.

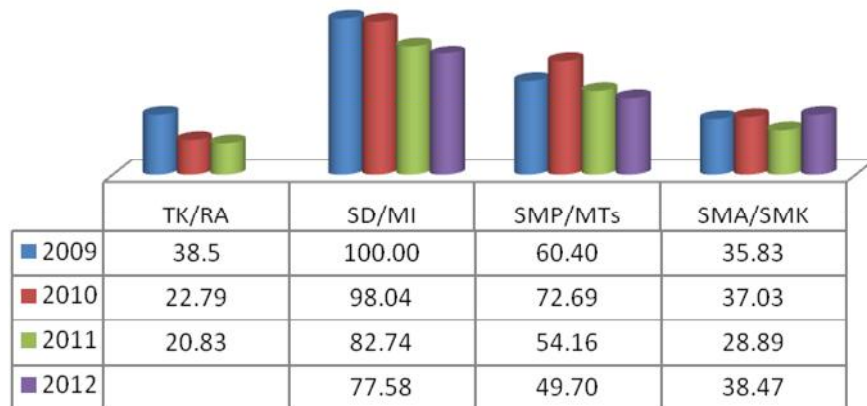
Grafik II.2 : Angka Partisipasi Kasar Tahun 2012



Sumber : Data Olahan

Sedangkan Angka Partisipasi Murni (APM) pada usia Taman Kanak-Kanak (Tk/RA) pada tahun 2010 sebesar 22,79 persen, tahun 2011 menurun menjadi 20,83%, ini artinya mengalami penurunan sebesar 1,96% dari tahun sebelumnya. Sama halnya tahun 2011 untuk APM SD menurun menjadi 82,74% artinya mengalami penurunan sebesar 15,3% dari tahun sebelumnya. Tahun 2012 mengalami penurunan juga sebesar 5,16% dari tahun sebelumnya, menjadi 77,58%. APM SMP Tahun 2011 sebesar 54,16% artinya mengalami penurunan sebesar 18,53% dari tahun 2010. Adapun Tahun 2012 mengalami penurunan sebesar 4,46% dari tahun sebelumnya menjadi 49,70%. Angka partisipasi murni (APM) SMA/SMK Tahun 2011 menurun menjadi 28,89% artinya mengalami penurunan sebesar 8,14% dari tahun sebelumnya. Tahun 2012 meningkat sebesar 9,58%, menjadi 38,47%.

Grafik II.3 : Angka Partisipasi Kasar Tahun 2012



Sumber : Data Olahan

Sarana dan prasarana penunjang pendidikan berupa perpustakaan pada tahun 2009 untuk jenjang SD, SMP, SMA dan SMK sejumlah 136 unit diantaranya terdapat RKB yang dijadikan perpustakaan. Seiring dengan meningkatnya jumlah peserta didik, maka sebagian perpustakaan di tahun 2011 dan 2012 dikembalikan fungsinya sebagai RKB sehingga jumlah perpustakaan menjadi 65 unit. Namun ada upaya setiap sekolah untuk membangun RKB dan Perpustakaan baru guna memenuhi sarana penunjang pendidikan. Selain perpustakaan, laboratorium bahasa dan komputer untuk SMP, SMA dan SMK sudah ada walaupun jumlahnya belum mencukupi.

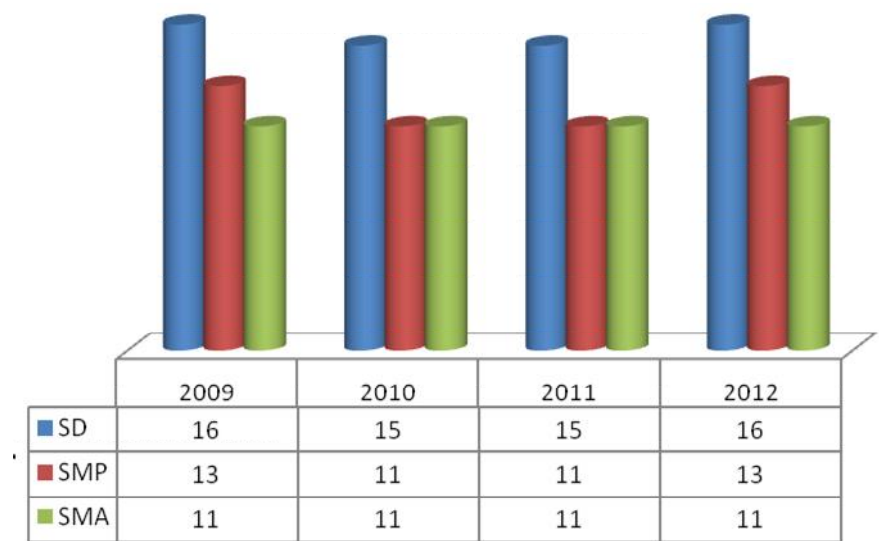
Tabel II. 5 : Jenis Sarana/Prasarana Pendidikan

Tahun	JENIS SARANA / PRASARANA PENDIDIKAN (unit)							
	RKB TK, SD, SMP, & SMA, SMK	PERPUSTAKAAN SD, SMP & SMA, SMK	Lab. Bahasa			Lab. Komputer		
			SMP	SMA	SMK	SMP	SMA	SMK
2009	1200	136	3	2	3	5	4	4
2010	1291	136	3	2	3	5	4	5
2011	1340	65	4	3	3	6	6	5
2012	1352	65	4	3	3	6	6	5

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga

Berdasarkan perkembangan rasio guru terhadap siswa, selama 4 tahun terakhir terlihat perkembangan pada tahun 2009 rasio guru terhadap siswa SD, SMP dan SMA masing-masing adalah 1:16, 1:13 dan 1:11 kecuali pada tahun 2010 dan 2011 rasio guru terhadap siswa mengalami penurunan yang tidak berpengaruh besar yaitu 1:15, lebih jelasnya dapat dilihat grafik dibawah :

Grafik II.4 : Rasio Guru Per Siswa



Sumber : Data Olahan

Adapun kompetensi guru menurut tingkat pendidikan pada setiap jenjang pendidikan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel II.6 : Kompetensi Guru Menurut Tingkat Pendidikan

Tahun	2012													
	SLTP		SLTA		D1		D2		D3		S1		S2	
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
SD/MI	2	1	59	91	2	1	178	330	5	15	214	302	4	0
SMP/MTs	0	0	13	6	2	0	6	3	10	4	220	267	4	0
SMA/MA	0	0	1	0	0	1	1	0	1	1	107	176	4	0
SMK	0	0	3	1	0	0	0	0	3	2	76	82	3	1
Tahun	2013													
	SLTP		SLTA		D1		D2		D3		S1		S2	
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
SD/MI	0	0	38	70	1	2	92	163	3	8	296	539	8	5
SMP/MTs	0	0	17	7	2	0	2	1	7	2	213	305	4	2
SMA/MA	0	0	2	0	0	0	0	0	0	1	129	129	9	3
SMK	0	0	5	1	0	0	0	0	4	2	105	116	2	1

Sumber : DISDIKORA

b. Kesehatan

Pembangunan kesehatan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pembangunan nasional karena kesehatan menyentuh hampir semua aspek kehidupan manusia. Tujuan akhir dari pembangunan kesehatan adalah terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang optimal sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum. Upaya pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dibidang kesehatan untuk mencapai tujuan tersebut antara lain dengan memberikan penyuluhan kesehatan agar

keluarga berperilaku hidup sehat, memberikan ASKES kepada seluruh pegawai negeri sipil daerah, dan jaminan kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara, serta penyediaan fasilitas kesehatan seperti puskesmas, posyandu, serta penyebaran tenaga medis (dokter dan bidan desa).

Pelaksanaan pembangunan pada Urusan Kesehatan selama kurun waktu lima tahun terakhir, telah mendorong peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat di daerah ini. Kondisi tersebut kemudian berimplikasi terhadap capaian beberapa indikator keberhasilan pembangunan Urusan Kesehatan yang terus mengalami peningkatan dari tahun ketahun. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh BPS, angka harapan hidup masyarakat selama tahun 2008-2012 adalah rata-rata 71 tahun, tercatat bahwa angka harapan hidup meningkat dari usia 72 pada tahun 2008 menjadi usia 74 pada tahun 2012.

Secara keseluruhan program dan kegiatan pada Urusan Kesehatan selama kurun waktu lima tahun terakhir telah direalisasikan. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa program dan kegiatan yang masih perlu ditingkatkan dan disempurnakan.

Tabel II.7 Kinerja Pembangunan Kesehatan

No	Cakupan	Prosentase			
		2009	2010	2011	2012
1	Cakupan kunjungan ibu hamil K4	83,77	70,75	93,9	86,4
2	Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	76,77	66,24	86,7	87,8
3	Ibu hamil resiko tinggi yang dirujuk	-	-	276	134
4	Ibu hamil resiko tinggi yang ditangani	71,2	12,2	93,7	6,7
5	Neonatal resiko tinggi/Komplikasi	1,2	1,3	3,6	1,04
6	Cakupan bayi berat lahir rendah yang ditangani	100	100	100	4,6
7	Cakupan deteksi dini tumbuh kembang anak balita	63,47	63,47		72
	Prasekolah				92
8	Cakupan Peserta aktif KB	75,78	71,59	76,6	60,9
9	Balita bawah garis merah	3,73	4,40	2,7	10,72
10	Cakupan Balita mendapat kapsul vitamin A dua kali per tahun	68,87	65,37	63,5	100
11	Cakupan Ibu hamil mendapat 90 tablet Fe	80,35	64,17	86,5	7,21

12	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada bayi bawah garis merah dari keluarga miskin	100	100	100	100
13	Balita gizi buruk mendapat perawatan	100	100	100	100
14	Cakupan rawat jalan	197,757	217,056	31.000	104,32
15	Cakupan rawat inap	3,999	3,611	2,852	2,4
16	Pelayanan Gawat Darurat	100	56,52	56,52	2,1
17	Pencegahan dan pemberantasan penyakit ISPA	100	100	100	100
18	Pencegahan dan Pemberantasan penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD)	100	100	100	100
19	Sarana kesehatan yang beroperasi sesuai dengan standard	100	100	100	100

Sumber : Dinas Kesehatan

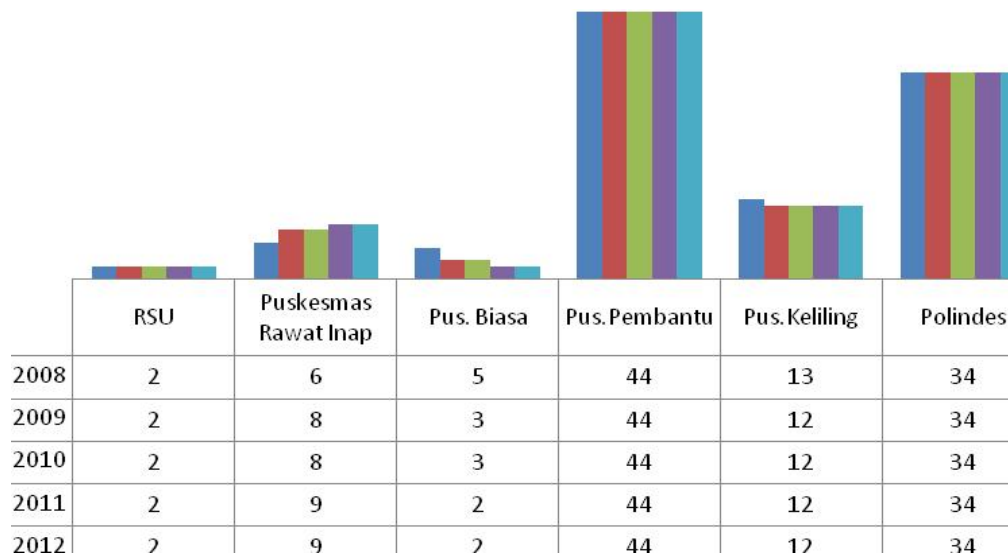
Pelayanan RSUD dapat dilihat dari prosentase terhadap penduduk yang memanfaatkan rumah sakit, sarana kesehatan dengan kemampuan laboratorium kesehatan, rumah sakit yang menyelenggarakan 4 pelayanan kesehatan spesialis dan prosentase obat generik berlogo dalam persediaan obat. Berdasarkan data yang ada, hingga tahun 2012 penduduk yang memanfaatkan rumah sakit mengalami peningkatan sebesar 1% dari tahun 2008. Sama halnya dengan presentase sarana kesehatan dengan kemampuan laboratorium kesehatan pada tahun 2012 mengalami peningkatan menjadi 9,2% atau sebesar 1,4% dari tahun 2008 atau sebesar 7,8%. Sejak tahun 2011 RSUD telah menyelenggarakan 4 pelayanan kesehatan spesialis. Pada tahun 2012 persentase obat generik berlogo dalam persediaan obat sebesar 75%. Ini berarti ada peningkatan sebesar 5% dari tahun 2009. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel II.8 : Akses & Mutu Pelayanan Kesehatan Tahun 2008 - 2011

Tahun	Prosentase penduduk yang memanfaatkan sarana kesehatan			
	Persentase penduduk yang memanfaatkan puskesmas	Persentase penduduk yang memanfaatkan rumah sakit	Persentase sarana kesehatan dengan kemampuan laboratorium kesehatan	Persentase obat generik berlogo dalam persediaan obat
2008	15	1,5	80	100
2009	201,75	20,54	100	100
2010	220,67	16,63	100	100
2011	172,5	19,45	100	100
2012	162,8	18,82	100	100

Sumber: Dinas Kesehatan

Grafik II.5 : Sarana Kesehatan



Sumber : Data Olahan

Tabel II.9 : Mortalitas

Tahun	Jumlah			
	Angka kematian bayi per-1000 kelahiran hidup	Angka kematian balita per-1000 kelahiran hidup	Angka kematian ibu melahirkan per 10.000 kelahiran hidup	Angka harapan hidup waktu lahir
2008	*	*	107.6	*
2009	27	2	10.1	2,957
2010	27	2	7	2,957
2011	29	4	13.7	3,018
2012	60	6	7	846

Sumber : Dinas Kesehatan

*Keterangan: *) data belum tercatat*

Tabel II.10 : Morbiditas

Tabel	Morbiditas				
	Angka kesakitan malaria per 10.000 kelahiran hidup	Angka kesembuhan penderita TB paru BTA +	Jumlah Penderita HIV/AIDS	Angka "Acute Flaccid Paralysis" pada anak usia <15 tahun	Angka kesakitan demam berdarah dengue (DBD) per 100.000 penduduk
2008	39.87	68	6.85	0.09	0.17
2009	27	77	1	1	142

2010	17.47	86	12	1	110
2011	18	94	8	1	28
2012	1796	89	0	0	74.9

Sumber : Dinas Kesehatan

Tabel II.11 : Status Gizi, Keadaan Lingkungan Dan Perilaku Hidup Masyarakat

Tahun	Prosentase					
	Persentase balita dengan gizi buruk yang di tangani	Persentase kecamatan bebas rawan gizi	Persentase rumah sehat	Persentase tempat Tempat Umum Sehat	Persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat	Persentase posyandu purnama dan mandiri
2009	100	100	70,71	56	70,61	52.96
2010	100	100	75,28	67	75,28	100
2011	100	100	76,7	56	76,7	100
2012	2	100	72	71	65	58,9

Sumber : Dinas Kesehatan

2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing merupakan kemampuan daerah untuk menghasilkan barang dan jasa untuk mencapai peningkatan kualitas hidup masyarakat. Daya saing daerah di Kabupaten Penajam Paser Utara dapat dilihat dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumberdaya manusia.

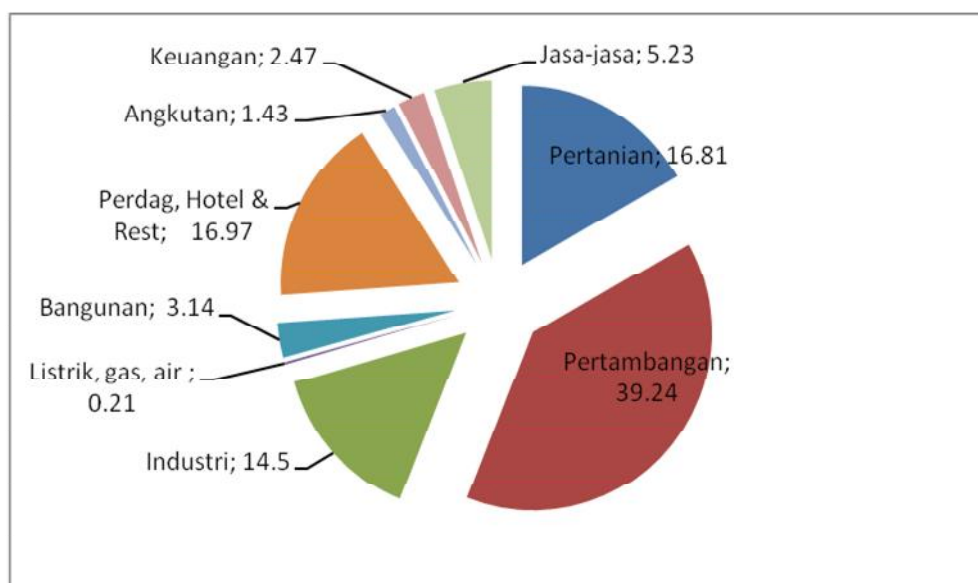
a. Kemampuan Ekonomi Daerah

Kontribusi sektor usaha terbesar terhadap PDRB Kabupaten Penajam Paser Utara adalah sektor pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, pertanian, perdagangan dan hotel. Struktur perekonomian di Kabupaten Penajam Paser Utara pada tahun 2011 tidak banyak mengalami perubahan secara peringkat. Untuk lebih rincinya dapat dilihat pada tabel 3, yaitu Tabel Kontribusi Nilai Tambah Bruto Sektoral atas dasar harga berlaku yang menggambarkan seberapa besar peranan atau kontribusi masing-masing sektor dalam pembentukan nilai PDRB total. Sejak dimasukkannya produksi minyak mentah dan batu bara ke dalam penghitungan PDRB Kabupaten Penajam Paser Utara, Sektor Pertambangan dan Penggalian merupakan sektor yang paling dominan di kabupaten ini. Pada tahun 2011 Sektor Pertambangan dan Penggalian memiliki kontribusi sebesar 39,24 persen. Dibandingkan tahun 2010, kontribusi Sektor Pertambangan dan Penggalian mengalami peningkatan.

Kontribusi Sektor Pertambangan dan Penggalian tahun 2010 sebesar 33,44 persen. Bila dilihat perkembangan antar waktu kontribusi sektor pertambangan dan penggalian di Kabupaten Penajam Paser Utara menunjukkan penurunan yang cukup signifikan dimana pada tahun 2008 kontribusi yang diberikan mencapai 41,85 persen, tahun 2009 sebesar 37,16 persen, dan tahun 2010 turun lagi menjadi 33,44 persen. Tetapi untuk tahun 2011 mengalami peningkatan dibanding tahun 2010. Sebagai sektor andalan Sektor Pertambangan dan Penggalian, yang mengandalkan produksi minyak mentah dan batu bara, merupakan komoditas yang tidak dapat diperbaharui dan suatu saat pasti akan habis, maka perlu langkah-langkah untuk mendongkrak perekonomian Kabupaten Penajam Paser Utara dari sektor-sektor lain yang potensial, seperti Sektor Pertanian, Sektor Industri Pengolahan dan Sektor Perdagangan.

Sektor yang memiliki kontribusi terbesar kedua adalah Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran yaitu sebesar 16,97 persen, Jika dibandingkan dengan tahun 2010 kontribusi yang diberikan sebesar 16,59 persen maka terjadi kenaikan, Sub sektor yang memberikan sumbangan yang cukup besar adalah sub sektor perdagangan. Dimana pada tahun 2011 di Kabupaten Penajam Paser Utara mulai berkembang pertambangan batu bara sehingga memberikan dampak di sektor perdagangan khususnya ekspor.

Grafik II.6 : Struktur Ekonomi Kabupaten Penajam Paser Utara 2011



Tabel II.12 : Struktur Ekonomi Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2009-2011 (%) (kontribusi NTB Sektorial Terhadap PDRB ADHB)

No.	Lapangan Usaha	2009	2010 r)	2011*)
1	Pertanian	18.39	19.31	16.81
2	Pertambangan & Penggalian	35.26	33.44	39.24
3	Industri Pengolahan	17.21	16.75	14.5
5	Listrik, Gas dan Air Bersih	0.23	0.22	0.21
5	Bangunan	3.4	3.38	3.14
6	Perdag, Hotel & Restoran	15.33	16.59	16.97
7	Pengak, & Komunikasi	1.32	1.31	1.43
8	Keu, Persew, & Jasa Perusahaan	2.65	2.74	2.47
9	Jasa-jasa	6.21	6.25	5.23
Total		100	100	100

Sumber : KDA 2012

Sektor Pertanian memiliki kontribusi pada peringkat ketiga terbesar dengan kontribusi terhadap PDRB sebesar 16,81 persen. Jika dibandingkan dengan tahun 2010 kontribusi yang diberikan sebesar 19,31 persen maka terjadi perlambatan pertumbuhan sektor pertanian. Sub sektor yang memberikan sumbangan yang cukup besar adalah sub sektor tanaman bahan makanan dan perkebunan. Penajam Paser Utara yang kita kenal sebagai salah satu lumbung padi di Kalimantan Timur pada tahun 2011 mampu memproduksi padi sebanyak 65 ribu ton, mengalami penurunan dibanding tahun 2010 yaitu sebesar 87 ribu ton.

Perkembangan sektor industri pengolahan juga menunjukkan kontribusi yang cukup meyakinkan sebagai salah satu alternatif perluasan ekonomi. Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mampu memberikan kontribusi sebesar 16,75 persen maka terjadi perlambatan.

b. Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur akan meningkatkan mobilitas manusia dan barang antar daerah dan antara kabupaten/kota, yang meliputi fasilitas transportasi (jalan, jembatan, pelabuhan), fasilitas kelistrikan, fasilitas komunikasi, fasilitas pendidikan, dan fasilitas air bersih. Tersedianya infrastruktur yang memadai merupakan nilai tambah bagi perwujudan pembangunan suatu kota.

Aksesibilitas Daerah

Kabupaten Penajam Paser Utara merupakan jalur perlintasan poros Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan, atau sebaliknya sehingga Kabupaten Penajam Paser Utara merupakan penopang jalur distribusi perekonomian lintas Kalimantan. Kondisi infrastruktur merupakan unsur penting yang perlu mendapatkan perhatian agar dapat berfungsi dengan optimal. Dalam mendukung aksesibilitas, Kabupaten Penajam Paser Utara telah berupaya meningkatkan jumlah panjang jalan yang menghubungkan antar wilayah. Daya saing lain yang dimiliki Kabupaten Penajam Paser Utara dibidang sarana prasarana perhubungan adalah ketersediaan transportasi laut berupa pelabuhan ferry, pelabuhan speed boat, dan pelabuhan klotok. Pelabuhan ini berfungsi untuk mempermudah arus pergerakan barang maupun manusia. Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara sedang melakukan pembangunan pelabuhan laut, yang akan difungsikan sebagai terminal Surbase Batubara dan CPO.

Tabel II.13 : Aspek daya saing bidang aksesibilitas daerah

Uraian	Tahun	
	2011	2012
. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	3.27%	-
- Panjang Jalan (Km)	848,94	900.44
- Jumlah Kendaraan Roda 4 dan 2	30.500	-
Jumlah Orang/ penumpang terangkut angkutan		
- Orang terangkut	324.286	206.461
Jumlah Orang/barang melalui dermaga		
- Orang	631.520	631.520

Sumber : Dishub dan PU Penajam Paser Utara

Penataan wilayah

Menyesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara, bahwa pemetaan wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara terbagi menjadi 2 (dua) kawasan, yaitu : Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya.

Kawasan Lindung

Meliputi kawasan perlindungan setempat, kawasan swaka alam dan pelestarian alam serta cagar budaya. Kawasan lindung setempat terdiri dari kawasan sempadan mata air, sempadan waduk/embung, sempadan sungai, sempadan pantai dan RTH kawasan perkotaan. Kawasan lindung swaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya terdiri dari : kawasan pantai berhutan bakau, kawasan taman hutan raya dan kawasan cagar alam. Sedangkan untuk kawasan lindung rawan bencana alam terdiri dari : kawasan rawan tanah longsor dan kawasan rawan banjir.

Kawasan budidaya

Merupakan kawasan yang secara karakteristik wilayahnya dikembangkan sesuai dengan kondisi dan potensi wilayah. Kawasan budidaya terdiri dari : Kawasan peruntukan hutan produksi, kawasan peruntukan pertanian, kawasan peruntukan perikanan, kawasan peruntukan pertambangan, kawasan peruntukan industri, kawasan peruntukan pariwisata, kawasan peruntukan permukiman, dan kawasan peruntukan lainnya. Kawasan peruntukan hutan produksi meliputi kawasan hutan produksi terbatas dan hutan produksi tetap. Kawasan peruntukan pertanian meliputi : kawasan pertanian tanaman pangan, kawasan hortikultura, kawasan perkebunan dan kawasan peternakan. Kawasan peruntukan perikanan meliputi : kawasan peruntukan perikanan tangkap, kawasan peruntukan perikanan budidaya, pembangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan pembangunan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI). Kawasan peruntukan pertambangan meliputi : kawasan peruntukan pertambangan mineral dan batubara dan kawasan peruntukan pertambangan minyak dan gas bumi. Kawasan peruntukan industri meliputi : kawasan peruntukan industri sedang dan peruntukan industri kecil dan rumah tangga. Kawasan peruntukan pariwisata meliputi : kawasan peruntukan pariwisata alam, kawasan peruntukan pariwisata budaya dan kawasan peruntukan pariwisata buatan. Kawasan peruntukan permukiman meliputi : kawasan peruntukan permukiman perdesaan dan kawasan peruntukan permukiman perkotaan. Kawasan peruntukan lainnya meliputi : kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan, serta kawasan perdagangan dan jasa.

Tabel II. 14 : Rencana Luasan Pola Ruang Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2031

NO	Pengguna Lahan	Satuan	Kecamatan			
			Penajam	Waru	Babulu	Sepaku
Kawasan Lindung						
1	Cagar Alam	Ha	-	-	648	-
2	Taman Hutan Raya	Ha	-	-	-	5,906
3	Ruang Terbuka Hijau	Ha	2,123	765	790	1,645
4	Terumbu Karang	Ha	375	-	-	-
5	Sepadan Sungai	Ha	3,169	130	198	4,447
6	Sepadan Pantai	Ha	754	228	211	729
7	Sepadan Waduk/Danau	Ha	241	193	140	26
8	Sepadan Mata Air	Ha	199	37	100	151
9	Hutan Mangrove / Bakau	Ha	3,023	8	369	3,340
Luas (Ha)			9,884	1,361	2,456	16,244
Kawasan Budidaya						
1	Hutan Produksi Tetap	Ha	23,274	8,092	201	50,199
2	Hutan Produksi Terbatas	Ha	599	-	-	33,582
3	Permukiman	Ha	4,314	887	3,359	3,131
4	Pertanian	Ha	40,159	19,445	36,118	28,624
5	Perikanan	Ha	446	270	3,809	40
6	Industri	Ha	811	-	-	31
7	Pariwisata	Ha	177	1,177	14	315
Jumlah			79,664	31,232	45,957	132,166

Sumber : Analisa Hasil Rencana

Ketersediaan air bersih

Penyediaan dan pengelolaan air bersih di Kabupaten Penajam Paser Utara pada saat ini terbagi ke dalam 2 (dua) sistem, yaitu sistem jaringan perpipaan yang dikelola oleh PDAM dan sistem non perpipaan yang dikelola secara mandiri oleh penduduk. Untuk pelayanan dengan sistem perpipaan meliputi sebagian Kecamatan yang ada di Kabupaten penajam paser utara dan terus dikembangkan Instalasi Pengolahan Air Minum Di Setiap Kecamatan. (non perpipaan), khususnya di wilayah yang belum memperoleh akses Layanan Air Bersih masyarakat masih mengelola sumur bawah tanah secara mandiri, seharusnya dihindarkan untuk menghindari dampak lingkungan yang terjadi. Daya saing ketersediaan air bersih akan semakin membaik dengan selesainya pembangunan waduk/embung lawe-lawe dan pembangunan Bendung Tengin Baru.

Satu-satunya perusahaan yang mengelola air bersih di Kabupaten Penajam Paser Utara adalah Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Jumlah pelanggan pada tahun 2011 sebanyak 3.260 pelanggan. Kalau kita lihat dari kategori pelanggan maka pelanggan terbesar adalah pelanggan rumah tempat tinggal sebesar 93,47 % atau 3.047 pelanggan. PDAM terus berupaya memenuhi kebutuhan pelanggan dengan produksi air minum. Dibanding tahun sebelumnya, produksi air minum PDAM pada tahun 2011 terjadi peningkatan sebesar 21 % yaitu dari 1.204.664 m³ menjadi 1.457.647 m³.

Fasilitas listrik dan telepon

Perkembangan jaringan telekomunikasi beberapa tahun terakhir cukup menggembirakan, terlihat dengan banyaknya satuan sambungan yang dipasarkan kepada masyarakat. Jika dilihat dari sebaran tiap kecamatan yang ada, maka jaringan telepon telah menjangkau seluruh kelurahan yang ada di tiap kecamatan. Ketersediaan daya listrik saat ini belum memungkinkan bagi pengembangan investasi, kecuali bila Jaringan Listrik tegangan Tinggi telah terpasang.

Tabel II.15 : Aspek Daya Saing bidang Fasilitas Listrik dan Telepon

Uraian	Tahun		
	2010	2011	2012
Rasio Ketersediaan Daya Listrik % (Persen)	64	72	

- Daya Listrik Terpasang KW (Kilo Watt)	21.122	24.932	26.000
- Kebutuhan KW (Kilo Watt)	32.669,1	34.685,1	
Persentase RT yang menggunakan Listrik	45.8	46.9	
- Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik	16.645	18.111	28.842
- Jumlah Rumah Tangga	36.299	38.881	
Jumlah BTS telpon/ Seluler	52	52	

c. Ketersediaan Fasilitas Perdagangan dan Jasa

Tersedianya fasilitas hotel dan restoran merupakan capaian kinerja daya saing bidang perdagangan dan jasa. Pertumbuhan hotel dan restoran baru yang terjadi selama ini merupakan pertanda bahwa potensi ekonomi masyarakat masih akan terus meningkat seiring dengan meningkatnya tingkat kesejahteraan masyarakat.

d. Fasilitas Iklim Berinvestasi

Daya tarik investor untuk menanamkan modalnya sangat dipengaruhi faktor-faktor seperti tingkat suku bunga, kebijakan perpajakan dan regulasi perbankan, sebagai infrastruktur dasar yang berpengaruh terhadap kegiatan investasi. Iklim investasi juga sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang mendorong berkembangnya investasi antara lain fasilitas keamanan dan ketertiban wilayah, kemudahan proses perijinan, dan ketersediaan sumberdaya manusia berkualitas dan mampu bersaing.

Keamanan dan Ketertiban

Secara umum kondisi keamanan dan ketertiban sampai dengan tahun 2012 relatif kondusif bagi berlangsungnya aktivitas masyarakat maupun kegiatan investasi. Berbagai tindakan kejahatan kriminalitas, unjuk rasa dan mogok kerja yang dapat merugikan dan mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat dapat ditanggulangi dengan sigap oleh aparat pemerintah. Situasi tersebut juga didorong oleh pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat dengan melibatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungannya.

Kemudahan Perijinan

Faktor pendukung yang sangat erat kaitannya dalam melakukan investasi adalah prosedur dan tata cara perolehan ijin atau pengurusan ijin untuk berinvestasi. Mengingat Perda Kelembagaan pelayanan perijinan satu

pintu (One Stop Services), melalui Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal (BP2TPM) belum mendapat persetujuan maka Pelayanan Perijinan masih dilaksanakan oleh masing-masing Instansi Teknis. saat ini kepastian prosedur, waktu dan kemudahan perijinan belum maksimal, diharapkan dengan disahkannya Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal (BP2TPM) dapat meningkatkan kinerja utama pelayanan investasi daerah.

Dengan kemudahan perijinan berinvestasi diharapkan akan menarik minat investor dalam negeri maupun luar negeri untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Penajam Paser Utara.

Pengenaan Pajak Daerah

Penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) salah satunya berasal dari pos pajak daerah yang pelaksanaannya berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perkembangan penerimaan pajak selama tahun 2009 sampai dengan 2012 terus mengalami pertumbuhan yang meningkat. Pada tahun 2009 penerimaan pajak daerah sebanyak Rp. 511.758.709,-, pada tahun 2010 mencapai Rp. 775.449.174,- pada tahun 2011 meningkat menjadi sebesar Rp. 838.408.870,- dan pada tahun 2012 meningkat menjadi sebesar Rp. 3.151.151.663,-.

1.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2012

Capaian kinerja pembangunan kabupaten penajam paser utara berdasarkan urusan yang di laksanakan pada tahun 2012 yang di implementasikan melauai program dan kegiatan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJM 2008-2013 di uraikan sebagai berikut.

Misi 1:

Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui penyelenggaraan pendidikan yang professional

Indikator Kinerja		Target (2012)	Capaian (2012)	Status
Program Prioritas : Program wajib belajar pendidikan dasar duabelas tahun				
1	Angka Partisipasi Murni (APM)			
	SD	98	77.58	↓
	SMP	83	49.7	↓
	SMA	75.87	28.16	↓
Program Prioritas : Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan				
1	Rasio Jumlah Siswa per Jumlah sekolah			

Bab II Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun 2012
Dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan

	SD	190	16	↓
	SMP	21	13	↓
	SMA	20	11	↓
Program Prioritas : Program peningkatan pendidikan kejuruan searah dengan potensi dan karakteristik daerah				
1	Meningkatnya minat baca masyarakat	19.05	15	↓
2	Terpenuhinya sarana dan prasarana olahraga	385	5	↓
3	Peningkatan peran serta kepemudaan	30	19	↓
4	Cabang olah raga yg berprestasi dan permasalahan Olah raga	90	54	↓
5	Peningkatan pembinaan kelompok seni dan budaya	93	116	↓

Keterangan:

- : Telah Tercapai
- : Akan Tercapai
- ↓ : Perlu Tindakan Khusus

Sasaran yang akan dicapai adalah:

1. Dituntaskannya wajib belajar 12 tahun, dengan beberapa program-program yang dilaksanakan adalah:

a. Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun

1. Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah
2. Pengadaan Alat Praktek & Peraga Siswa
3. Pengadaan Meubelair Sekolah
4. Pengadaan Perlengkapan Sekolah
5. Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah TK/RA/PAUD,SD/MI dan SMP/MTS Negeri dan Swasta
6. Penyelenggaraan Paket A setara SD kelas IV dan VI
7. Penyelenggaraan Paket B Setara SLTP Kelas 1 dan III
8. Pelatihan Pengembangan Kurikulum SD/MI
9. Pelatihan Pengembangan Kurikulum SMP/MTS
10. Operasional Ujian Nasional SMP/MTS 2012
11. Try Out SD
12. Try Out SMP/MTS
13. Training Center Olimpiade MIPA Kabupaten SD/MI Tahun 2012
14. Penyelenggara RSBI SMPN 5 PPU
15. Persiapan ISO Pada 2 SMP
16. Por SD Tahun 2012 Tuan Rumah
17. OOSN SMP Tk Kab, Prop, Nasional
18. Pekan Olahraga Pelajar Tingkat Kabupaten, Propinsi dan Nasional

19. Porseni Guru Tk. Kab/Prop/Nas
20. Lomba UKS Tingkat PAUD (TK/KAB),SD,SMP Kab.Prov & Nasional
21. Lomba UKS SMA Tingkat Kab,Prov & Nasional
22. Pekan Olahraga PNFI Tingkat Nasional
23. Training Centre OSN Kabupaten SMP Tahun 2012
24. OSN Propinsi SMP Tahun 2012
25. Olimpiade MIPA Propinsi SD Tahun 2012
26. Lomba Pidato Bahasa Inggris SD & SMP
27. Lomba Pidato Bahasa Inggris SD & SMP
28. Penyelenggaraan SSN/SMPN 1 & SMPN 4 PPU
29. OOSN SMA Tk Kab, Prop, Nasional
30. FLS2N SMP Tk. Kab. Prop & Nasional
31. FLS2N SD Tk. Kab. Prop & Nasional
32. OOSN Usia Dini (SD) Tk. Kab. Prop & Nas
33. Monitoring/Evaluasi Kinerja Kepala SD/SMP
34. Pendidikan dan Pelatihan Pengawas SD/SMP
35. Workshop Pengawas Sekolah
36. Tim Pembina UKS
37. Lomba Guru,Kepala Sekolah da Pengawas Berprestasi SD/MI,SMP/MTs
Tk.Kab.Th 2012
38. Olimpiade MIPA Jalur B TK.Propinsi Jenjang SD Th 2012
39. Pelatihan Kepala Sekolah SMP/MTs
40. Pelatihan Kepala Sekolah SD/MI
41. Penghargaan Kepsek,Guru & Pengawas dan Siswa Berprestasi SD/SMP
42. Operasional Ujian Nasional SD/MI 2012
43. Pelatihan Seni Budaya Bagi Guru SMP
44. Evaluasi Diri Sekolah (EDS) dan MSDP Oleh Pengawas
45. Peningkatan Keolahragaan (POR SD/MI)
46. Pengadaan 70 Unit Scanner LJK
47. Pengadaan Alat Peraga/Praktek SD/SMP/SMA/SMK
48. Pengadaan Meubelair Siswa Sekolah SSN dan RSBI
49. Pengadaan Interactive Whiteboards For Education SD/SMP/SMA/SMK
50. Pengadaan Alat Laboratorium Bahasa SD/SMP/SMA/SMK
51. Pengadaan Buku Ensiklopedia Jenjang SD/SMP/SMA/SMK

52. Pengadaan Meubelair Perpustakaan SD/SMP
53. Pembangunan Rumah Dinas Guru SDN 013 Sepaku Type 45
54. Pembangunan Pagar SDN 028 Penajam
55. Pengadaan Printer Multifungsi Untuk SD dan SMP
56. Pengadaan Software Pembelajaran Untuk SD dan SMP
57. Pembangunan dan Pemasangan Paving Blok SDN 005 Waru
58. Pembangunan Pagar SDN 011 Penajam
59. Pembangunan dan Pemasangan Paving Blok SDN 011 Penajam
60. Pembangunan Pagar TK satu Atap 011 Lawe-lawe
61. Pembangunan Sistem Informasi dan Infrastruktur Pendukung Jardiknas
62. Pembangunan Sistem Informasi dan Infrastruktur Pendukung Jardiknas
63. Pengadaan Drumband Marching Band
64. Pengadaan Alat IPA Berbasis Sains Untuk SD Untuk Peningkatan Mutu Pendidikan
65. Study Komparatif Bidang Pendidikan Dasar
66. Magang Sekolah Luar Biasa (SLB)
67. Pembangunan Jaringan Instalasi Listrik & Perlengkapan
68. Pengadaan Buku Perpustakaan SD/SMP/SMA/SMK
69. Pengadaan Alt Praktek Pramuka Sekolah SD/SMP/SMA/SMK
70. Pengadaan Sistem Manajemen Sekolah Berbasis IT Tingkat SMP
71. Pengadaan Alat Peraga Digital IPA Jenjang SD
72. Pengadaan Alat Peraga Digital IPA Jenjang SMP
73. Pengadaan Meubelair Untuk SD/SMP
74. Pengadaan Aplikasi Pengembangan Konten Pengajaran Berbasis Jaringan
75. Pengadaan Peralatan Ruang UKS Sekolah
76. Pembangunan Kantin Sehat Sekolah

b. Program pendidikan menengah

1. Pembangunan Gedung Sekolah
2. Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah
3. Pengadaan Alat Praktek & Peraga Siswa
4. Penyelenggara Paket C Setara SMU Kelas III
5. TC Lomba Keterampilan Siswa (LKS) SMK
6. Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SMA/SMK (BOSDA)
7. Operasional UN/US SMA/MA dan SMK

8. Pelatihan Paskibraka Tk.Kabupaten
9. Olimpiade SMA Tk.Kabupaten PPU
10. Olimpiade Sains SMA Tk.Propinsi dan Nasional
11. Lomba UUD Tahu 1945
12. FLS2n SMA Tk.Kabupaten,Propinsi dan Nasional
13. Seleksi Paskibraka Tk.Kabupaten,Propinsi dan Nasional
14. Magang Guru Mesin Bubut (Solo)
15. Penghargaan Kepsek,Guru & Pengawas dan Siswa Berprestasi SMA/SMK
16. ISO 9001 2008 (SMAN 5 PPU & SMA ITCI PPU)
17. Subsidi TDS SMA/MA dan SMK
18. Ujian Nasional & Ujian Sekolah SMA/MA/SMK
19. Lomba UUD Tk.Propinsi
20. Diklat OSN SMA Bagi Guru (Matematika & Fisika)
21. TC Olimpiade SMA Tk.Propinsi
22. Lomba Sains Terapan SMK Tk.Kabupaten
23. TC Olimpiade Sains Nasional Teparan Siswa SMK
24. Olimpiade Sains Nasional Terapan Siswa SMK Tk.Propinsi
25. LKS Siswa SMK Tk.Kabupaten
26. Try Out SMA/MA & SMK
27. Monitoring/Evaluasi Kinerja Kepala SMA/MA/SMK
28. Diklat KTSP SMA/MA dan SMK
29. Diklat Pengembangan Diri Guru/Kepsek/Pengawas Gol.IV a
30. Lomba Cerdas Cermat Lalu Lintas Tk.Kabupaten
31. Lomba Cerdas Cermat Lalu Lintas Tk.Propinsi
32. Diklat Guru BK SMA/MA dan SMK
33. Diklat Analisis SKL SMA/MA dan SMK (Pembuatan Soal Model UN)
34. Magang Guru OJT Astra (Jakarta)
35. EDS (Evaluasi Diri Sekolah) SMA/MA dan SMK
36. Lomba Sains Guru SMA (Mat & Fisika)
37. Lomba Guru,Kepala Sekolah dan Pengawas Berprestasi SMA/MA dan SMK
38. Diklat Penilaian PAK Fungsional Guru
39. Diklat Non Ujian Nasional (PPKN)
40. Surveyland ISO (3 SMK)
41. Pembangunan Graha Pemuda PPU

42. Pengadaan Alat Peraga Keterampilan Berpikir Berbasis Sains
43. Pengadaan Pusat Sumber Belajar Integrated IT Infrastruktur
44. BOSDA
45. Pengadaan Alat Peraga Kesenian/Musik SMP,SMA dan SMK
46. Pengadaan Alat Peraga Kesenian Modern dan Tradisional
47. Pengadaan Alat Peraga Matematika SMA
48. Pengadaan Peralatan Bengkel Otomotif SMK
49. Pembangunan Mushalla SMAN 1 Penajam
50. Pengadaan Alat Praktek Teknik Otomotif

c. Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan

1. Pendidikan Lanjutan Bagi Pendidik untuk Memenuhi Standar Kualifikasi
2. Monitoring Evaluasi dan Pelaporan (SERTIFIKASI GURU)
3. Verifikasi Nomor Unik Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (NUPTK)
4. Penyediaan Jasa Tenaga Pendidik dan Kependidikan
5. Tunjangan Tambahan Penghasilan Guru
6. Operasional Petugas Angka Kredit (PAK)
7. Tunjangan Tambahan Penghasilan Guru

d. Program pendidikan nonformal

1. Pemberian bantuan operasional pendidikan non formal
2. Pemberian bantuan operasional pendidikan non formal
3. Jambore PTK, PAUD NI 2012 Tk.Kabupaten, Provinsi dan Nasional.

2. Meningkatnya Pendidikan Kejuruan searah dengan potensi dan karakteristik daerah, melalui program:

1. Program peningkatan pelayanan pendidikan bebas iuran (SPP) 12 (dua belas) tahun
2. Program pengembangan kebijakan dan manajemen olah raga
3. Program peningkatan sarana dan prasarana olah raga
4. Program pemuda dan olah raga

Misi 2:

Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang memadai

Indikator Kinerja	Target (2012)	Capaian (2012)	Status
-------------------	---------------	----------------	--------

Program Prioritas : Program peningkatan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan merata				
1	Penurunan Kematian Bayi	0.16	11.6	↓
2	Penurunan kematian ibu melahirkan	0.05	0.02	•
3	Meningkatnya Usia Harapan Hidup	67.8		
4	Penduduk yang berkunjung ke sarana pelayanan kesehatan	76.14	2	↓
5	Rumah tangga yang berperilaku sehat dan bersih	73.36%		
6	Prevelensi gizi buruk <5%	1.50%	1.50%	•
7	Prevelensi gizi buruk <20%		1.3	•
8	Daerah Bebas rawan gizi (%)	100%	100%	•
9	Persentase posyandu mandiri			
Program Prioritas : Program Keluarga Sejahtera				
1	PUS yang menjadi peserta KB Aktif	88.18%	77.13%	↓
2	Peningkatan peran kader perempuan	2%	2.80%	•
3	Penurunan Rata-rata kelahiran (TFR)	0.16%	0.17%	•

Keterangan:

- : Telah Tercapai
- : Akan Tercapai
- ↓ : Perlu Tindakan Khusus

Pencapaian target dilaksanakan melalui program dan kegiatan :

1). Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan yang dilaksanakan melalui kegiatan :

1. Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
2. Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
3. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
4. Pengawasan dan Pengendalian Sarana Pelayanan Kesehatan
5. Pengambilan Obat Buffer Stock
6. Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (UPTD Puskesmas Penajam)
7. Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (UPTD Puskesmas Waru)
8. Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (UPTD Puskesmas Babulu)
9. Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (UPTD Puskesmas Sepaku I)

2). Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Program Upaya Kesehatan Masyarakat mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.2.889.287.500,- dengan realisasi sebesar Rp1.100.504.961,- atau (38.09.%) yang dilaksanakan melalui kegiatan :

1. Penyelenggaraan Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular dan Wabah

2. Rapat Teknis Petugas Pengelola Sistem Pencatatan Dan Pelaporan Terpadu Puskesmas (SP2TP)
3. Sosialisasi Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat
4. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bagi Pengungsi Korban Bencana
5. Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan
6. Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas
7. Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan
8. Peringatan HUT RI dan HUT Kabupaten PPU Tahun 2011
9. Pengendalian Vektor dan Penyehatan Lingkungan Pasca Bencana /KLB
10. Revitalisasi Sistem Kesehatan
11. Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas (Pusban, Polindes) (UPTD Puskesmas Penajam)
12. Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas (Pusban, Polindes) (UPTD Puskesmas Petung)
13. Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas (Pusban, Polindes) (UPTD Puskesmas Waru)
14. Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas (Pusban, Polindes) (UPTD Puskesmas Babulu)
15. Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas (Pusban, Polindes) (UPTD Puskesmas Sepaku I)
16. Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan
17. Pelatihan Petugas Kesehatan Mata Puskesmas

3). Pengawasan Obat dan Makanan

Program Pengawasan Obat dan Makanan mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.354.725.000,- dengan realisasi sebesar Rp.221.479.500,- atau (62.44%) yang dilaksanakan melalui kegiatan :

1. Peningkatan Pemberdayaan Konsumen/Masyarakat Di Bidang Obat dan Makanan
2. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
3. Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat
4. Survey PHBS dan Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat
5. Peningkatan Pengetahuan Petugas Desa Siaga
6. Pelatihan UKS Se Kab. PPU
7. Pengukuhan dan Sosialisasi Saka Bhakti Husada

4). Perbaikan Gizi Masyarakat

Program Perbaikan Gizi Masyarakat mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.386.750.000,- dengan realisasi sebesar Rp.79.936.000,- atau (20.67.%) yang dilaksanakan melalui kegiatan :

1. Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin
2. Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A dan Kekurangan Gizi Mikro Lainnya.
3. Pemberdayaan Masyarakat untuk Pencapaian Keluarga Sadar Gizi

5). Pengembangan Lingkungan Sehat

Program Pengembangan Lingkungan Sehat mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.16.820.000,- dengan realisasi sebesar Rp.15.079.000,- atau (89.65 %) yang dilaksanakan melalui kegiatan : Penyuluhan Menciptakan Lingkungan Sehat

6). Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.142.450.500,- dengan realisasi sebesar Rp.608.647.900,- atau (53.27 %) yang dilaksanakan melalui kegiatan :

1. Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk
2. Pelayanan Vaksinasi Bagi Balita dan Anak Sekolah
3. Pencegahan Penularan Penyakit Edemik/Epidemik
4. Peningkatan Imunisasi
5. Peningkatan Surveillance Epideminologi dan Penanggulangan Wabah
6. Peningkatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Tenaga Maintenance
7. Pemeriksaan Kesehatan Haji
8. Sosialisasi DBD
9. Pemberantasan Penyakit HIV/AIDS
10. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Kusta
11. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit TBC
12. Sosialisasi Pembentukan Klinik VCT HIV/AIDS
13. Pengukuhan KPA dan Seminar HIV/AIDS
14. Peningkatan KIE Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Malaria

7). Standarisasi Pelayanan Kesehatan

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.951.815.000,- dengan realisasi sebesar Rp.340.602.400,- (35.78.%) yang dilaksanakan melalui kegiatan :

1. Pertemuan Penyusunan Standar Minimal Kesehatan (SPM) Untuk SOP Puskesmas, UPT dan Puskesmas 24 Jam
2. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
3. Studi Komparatif Absorpsi Teknologi Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan (SIK)
4. Penyusunan Profil Kesehatan Kab. PPU
5. Pengkajian Pengembangan Riset Kesehatan Dasar (Risksedas)
6. Peningkatan Mutu Pengembangan Service Excellent Dalam Pelayanan Kesehatan

8). Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

Program Pelayanan Kesehatan Pendudukan Miskin mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp1.341.419.000,- dengan realisasi sebesar Rp.108.022.500,- atau (8.05%) yang dilaksanakan melalui kegiatan :

1. Pelayanan Operasi Katarak
2. Pelayanan Kesehatan Jamkesmas dan Jampersal

9). Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya

Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.983.400.000,- dengan realisasi sebesar Rp.1.854.465.200- atau (46.55%) yang dilaksanakan melalui kegiatan :

1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas
2. Persiapan Sarana dan Prasarana Puskesmas
3. Puskesmas 24 Jam di Desa Sebakung Jaya, Desa Gunung Intan, Kelurahan Maridan (Bankeu Prov/ 2012)
4. Pengadaan Speed Ambulans Puskemas Maridan

10). Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.29.993.017.610,- dengan realisasi sebesar Rp.644.824.900,- atau (2.14 %) yang dilaksanakan melalui kegiatan :

1. Kemitraan Pengolahan Limbah Rumah Puskesmas

2. Kemitraan Peningkatan Kualitas Dokter dan Paramedis
3. Kemitraan Pengobatan Bagi Pasien Kurang Mampu
4. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Jamkesmas
5. Kemitraan Pengobatan Lanjutan Bagi Pasien Rujukan (Jamkesmas)
6. Peningkatan Kapasitas SDM Pada Program Jamkes/Jamkesmas PPU
7. Pelayanan Jaminan Kesehatan Masyarakat PPU (UPTD Jamkesda)
8. Kemitraan Pengobatan Lanjutan Bagi Pasien Rujukan (UPTD Jamkesda)

11). Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.3.631.982.000,- dengan realisasi sebesar Rp.1.750.297.000,- atau (48.19 %) yang dilaksanakan melalui kegiatan :

1. Kader Posyandu
2. Pelatihan dan Pendidikan Perawatan Anak Balita
3. Lomba Balita Sehat Tingkat Kabupaten (LBS)
4. Pelatihan Manajemen Data Dalam Pemantapan Analisa PWS KIA

12). Peningkatan Pelayanan Lansia

Program Peningkatan Pelayanan Lansia mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.95.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.92.345.000,- yang dilaksanakan melalui kegiatan : Pelayanan Kesehatan Bagi Lansia

13). Pengawasan dan Pengendalian Keamanan Kesehatan

Program Pengawasan dan Pengendalian Keamanan Kesehatan mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.12.940.000,- dengan realisasi sebesar Rp.12.555.000,- atau (97.02 %) yang dilaksanakan melalui kegiatan : Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan

14). Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak

Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.215.061.000,- dengan realisasi sebesar Rp.148.372.000,- atau (68.99.%) yang dilaksanakan melalui kegiatan :

1. Pelatihan Asuhan Persalinan Normal
2. Pelatihan Manajemen Asfeksia Pada Bayi Baru Lahir
3. Pelatihan Manajemen Data Dalam Pemantapan Analisa PWS-KIA

Misi 3

mewujudkan revitalisasi pertanian yang berkelanjutan untuk menciptakan ketahanan pangan yang mendukung pertumbuhan ekonomi Daerah

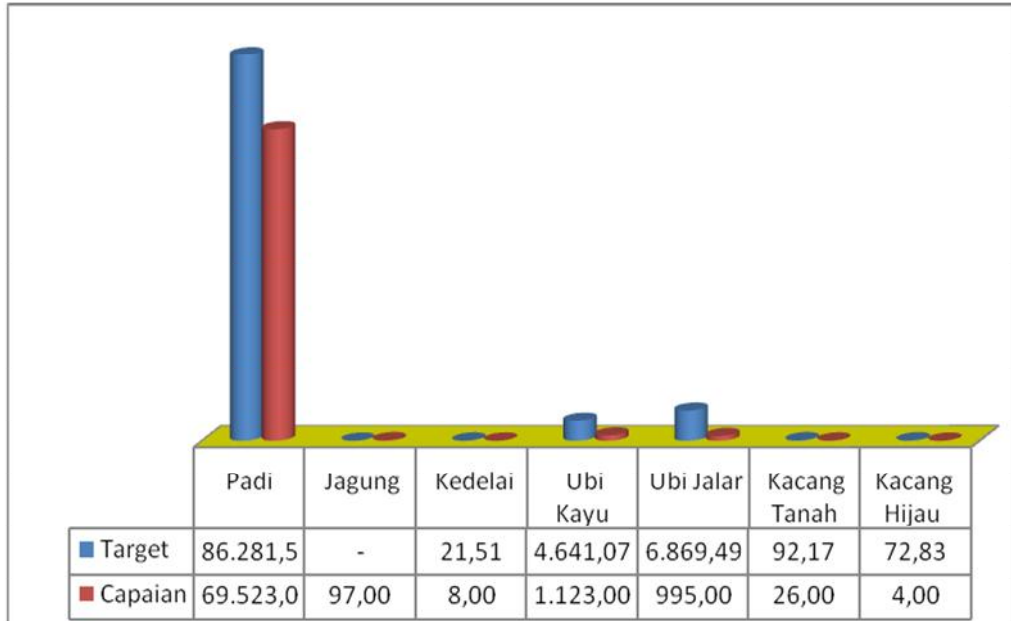
Bab II Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun 2012
Dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan

Indikator Kinerja	Target (2012)	Capaian (2012)	Status	
Program Prioritas : Program Pengembangan Agrobisnis dan Agroindustri				
1	Peningkatan Produksi tanaman pangan dan			
	a. Tanaman Pangan			
	- Padi	86.281,50	69.523,00	↓
	- Jagung	-	97,00	
	- Kedelai	21,51	8,00	↓
	- Ubi Kayu	4.641,07	1.123,00	↓
	- Ubi Jalar	6.869,49	995,00	↓
	- Kacang Tanah	92,17	26,00	↓
	- Kacang Hijau	72,83	4,00	↓
	b. Hortikultura			
	- Mangga	1.556,86	230,80	↓
	- Kubis	49,42	40,00	→
	- Sawi	206,11	126,00	↓
2	Peningkatan Produktivitas tanaman pangan dan hortikultura (Ton/Ha)			
	- Padi	5,36	4,89	→
	- Jagung	2,2	1,71	→
	- Kedelai	1,05	1,33	•
	- Ubi Kayu	14,43	14,22	→
	- Ubi Jalar	9,88	9,95	•
	- Kacang Tanah	1,76	1	→
	- Kacang Hijau	1,05	1	→
3	Peningkatan Produksi perkebunan (Ton)			
	- Kelapa Sawit	211.008,42	527.736,00	•
	- Karet	2.855,50	6.876,00	•
	- Kelapa	3.195,81	2.589,00	↓
	- Kopi	121,28	54,00	↓
	- Lada	2.428,87	1.028,00	↓
	- Kakao	152,40	44,00	↓
4	Peningkatan Produksi Perikanan (Ton)			
	- Air tawar	244,33	4.008,00	•
	- Air Payau	42.170,80	50.506,00	•
5	Peningkatan Produksi Sumber daya kelautan (Ton)			
	- Perairan laut	4.872,41	44.667,00	•
	- Perairan Umum	582,40	1.851,00	•
6	Peningkatan Populasi peternakan			
	- Sapi	8.002,46	10.879,00	•
	- Kambing	4.100,34	3.531,00	→
	- Ayam Buras	326.241,02	212.334,00	↓
	- Ayam ras	166.209,05	104.205,00	↓
7	Peningkatan Produksi Peternakan			
	-Daging (ekor)			
	- Sapi	79.574,43	277.887,00	•
	- Kambing	3.195,08	12.860,00	•
	- Ayam	250.485,79	417.414,00	↓
	-Telur (butir)			
	- Ayam Ras	16.703,03	11.480.800,00	•
	- Ayam Buras	3.311,17	2.229.508,00	•
	- Itik	266,98	723.696,00	•

Keterangan:

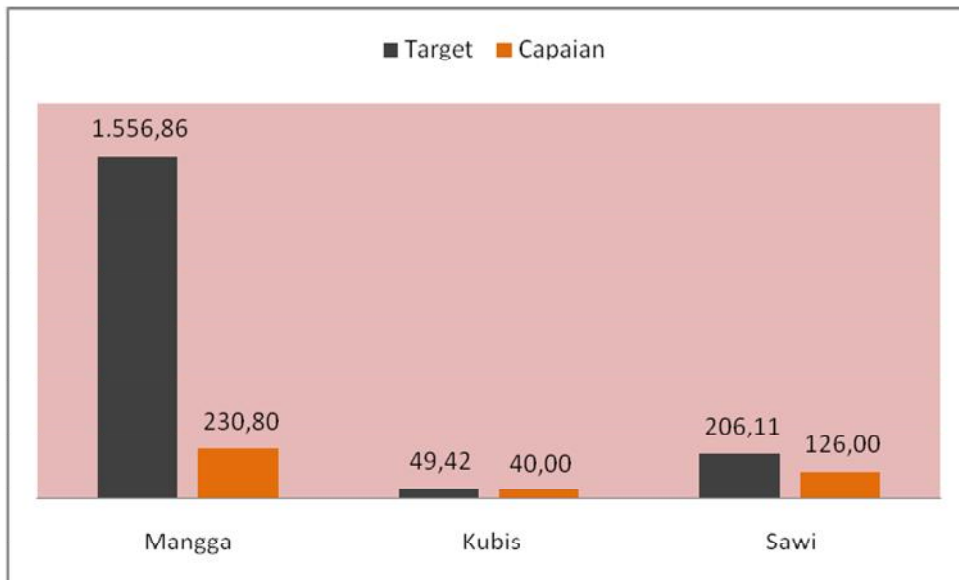
- : Telah tercapai
- : Akan tercapai

Grafik II.7 : Peningkatan Produksi Tanaman pangan Tahun 2012 (Ton)



Berdasarkan grafik diatas, terlihat bahwa produksi tanaman pangan belum mencapai target yang ditetapkan. Untuk mencapai target yang telah ditetapkan, maka perlu peningkatan masing-masing jenis tanaman pangan minimal sebesar 16.758 ton untuk produksi padi, 13,51 ton untuk produksi kedelai, 3.518 ton untuk produksi ubi kayu, 5.874 ton untuk produksi ubi jalar, 66,17 ton untuk produksi kacang tanah dan 68.83 ton untuk produksi kacang hijau.

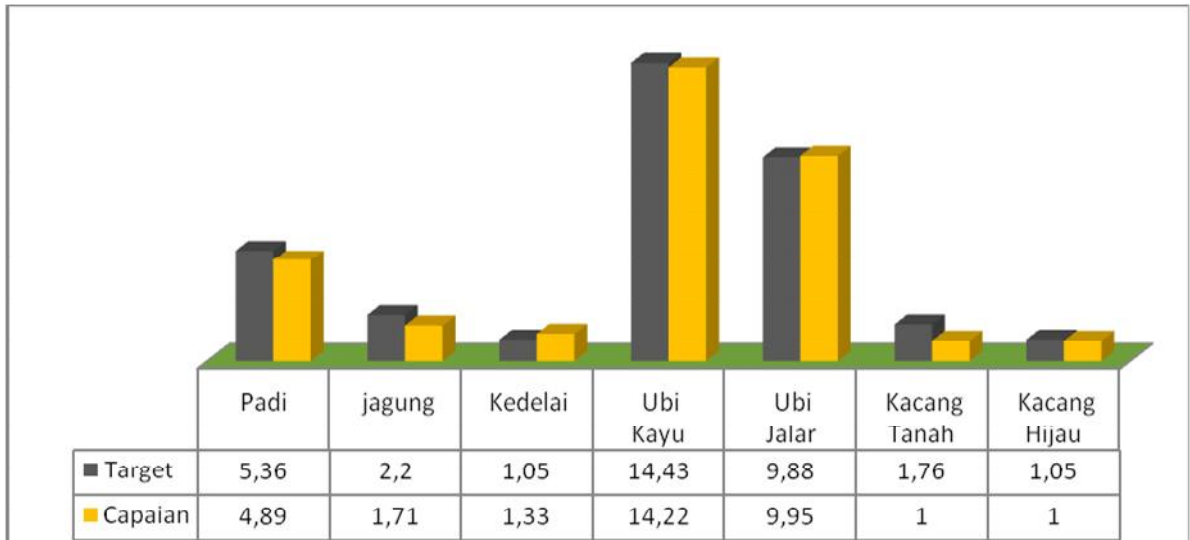
Grafik II.8 : Produksi Hortikultura Tahun 2012 (Ton)



Berdasarkan grafik diatas, terlihat bahwa produksi mangga belum mencapai target yang ditetapkan yaitu perlu peningkatan sebesar 1.326,06 ton. Lain halnya dengan

produksi sawi dan kubis, hampir mencapai target yaitu masing-masing 80,11 ton dan 9,42 ton.

Grafik II.9 : Produktivitas tanaman pangan dan hortikultura



Berdasarkan grafik diatas, terlihat bahwa produktivitas tanaman pangan sudah mencapai target yang telah ditetapkan, kecuali produktivitas tanaman padi dan jagung. Jumlah produktivitas tanaman padi dan jagung akan mencapai target yang telah ditetapkan.

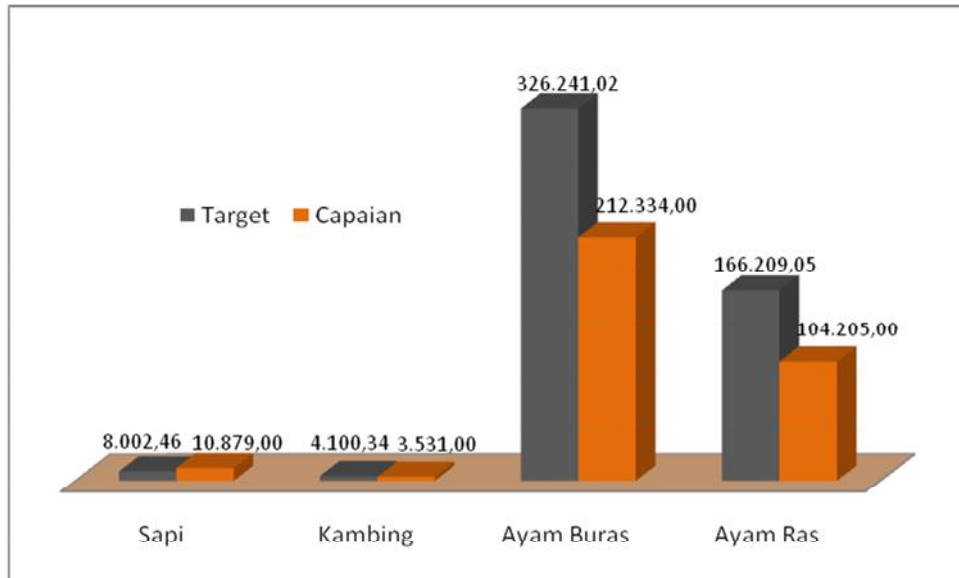
Grafik II.10 : Produksi Perkebunan (Ton)



Berdasarkan grafik diatas, terlihat bahwa produksi perkebunan khususnya produksi karet dan kelapa sawit mencapai lebih besar dari target yang telah direncanakan. Lain halnya dengan produksi kelapa, kopi, lada dan kakao yang belum mencapai target

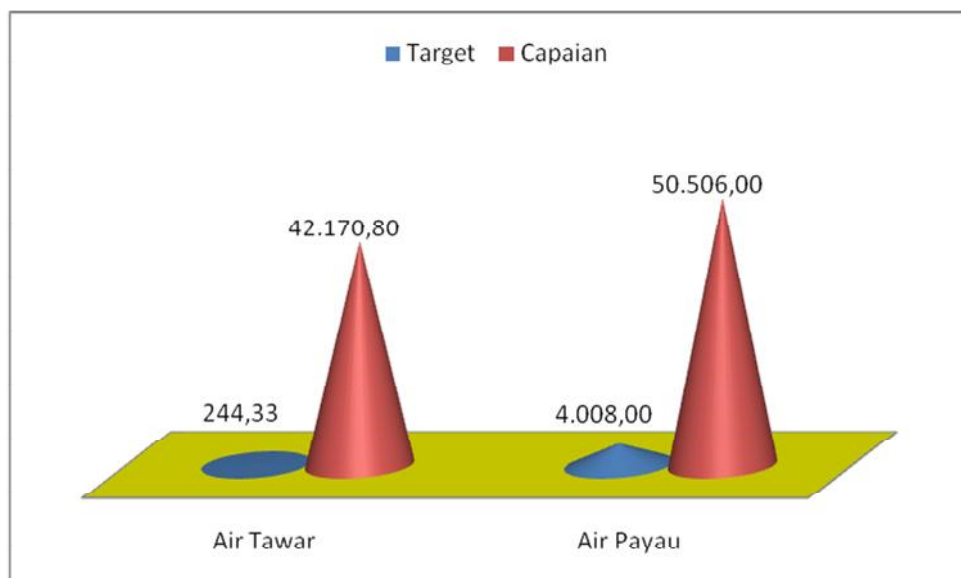
yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan karena masih adanya hama yang mengganggu tanaman tersebut.

Grafik II.11 : Populasi Peternakan (Ekor)



Berdasarkan grafik populasi ternak yang ada di Kabupaten Penajam Paser Utara, terlihat bahwa jumlah sapi telah mencapai target hingga melebihi target sebanyak 2.877 ekor. Sedangkan untuk populasi kambing, ayam ras dan ayam buras masih belum mencapai target. Untuk mencapai target, perlu capaian jumlah kambing sebesar 569 ekor atau 13,87% dari target yang telah ditetapkan. Artinya capaian yang telah dihasilkan, mampu memberikan kontribusi besar untuk peningkatan kuantitas peternakan. Sedangkan jumlah ayam ras sudah mencapai 62,69% dari target yang telah ditetapkan, berarti perlu peningkatan sebanyak 62.004 ekor ayam ras.

Grafik II.12 : Produksi Perikanan (Ton)



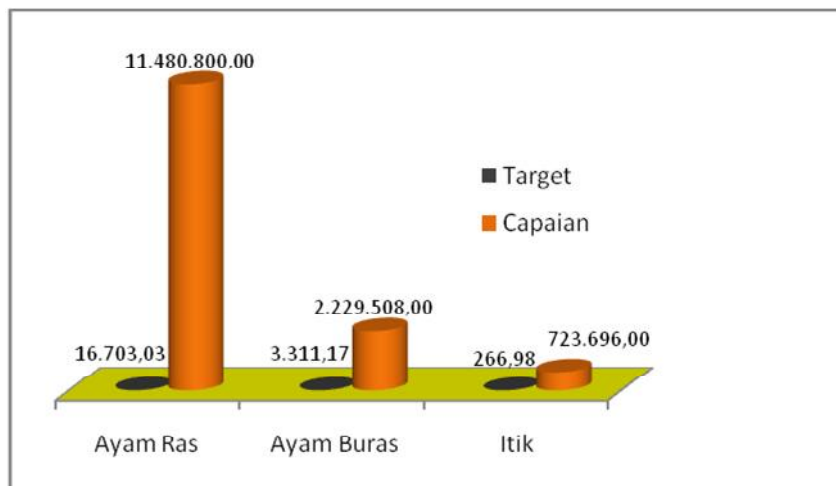
Berdasarkan grafik diatas, terlihat bahwa tingginya produksi perikanan khususnya air tawar dan air payau. Untuk produksi perikanan air tawar, dari target yang telah ditetapkan mengalami peningkatan sebesar 41.926,47 ton sedangkan produksi perikanan air payau meningkat sebanyak 46.498 ton.

Grafik II.13 : Produksi Sumber Daya Kelautan (Ton)



Jumlah produksi sumber daya kelautan perairan laut dan perairan umum masih jauh dari target yang telah ditetapkan. Untuk perairan laut hanya mencapai 11,95% dan perairan umum mencapai 4,14% dari target yang telah ditetapkan.

Grafik II.14 : Produksi Telur (Butir)



Tingginya produksi telur terlihat pada grafik diatas. Dari target yang telah ditetapkan, produksi telur ayam ras mengalami peningkatan sebesar 11.464.097 butir, produksi telur ayam buras meningkat sebesar 2.226.197 butir, produksi telur itik sebesar 723.429 butir.

Grafik II.15 : Produksi Daging (Kg)



Berdasarkan grafik terlihat bahwa produksi daging dapat dikatakan tercapai, karena sebagian besar melebihi dari target yang telah ditetapkan. Produksi daging sapi mengalami peningkatan sebanyak 198.312,6 ton, daging kambing sebanyak 9.664,92 ton dan daging ayam sebanyak 166.955,2 ton. Pencapaian target-target diatas dilaksanakan melalui program dan kegiatan :

1). Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.295.992.500,- dengan realisasi sebesar Rp.239.821.000,- atau (81.02 %) yang dilaksanakan melalui kegiatan :

1. Penilaian Petani Berprestasi
2. Penilaian Kelompok Tani Berprestasi
3. Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis
4. Klasifikasi dan Sertifikasi Kelompok Tani
5. Rembug-Rembug KTNA Kab. PPU Tahun 2012
6. Cross Visit Petani ke Daerah Maju

2). Program Peningkatan Ketahanan Pangan

Program Peningkatan Ketahanan Pangan mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.445.059.500,- dengan realisasi sebesar Rp.433.892.500,- atau (97.49 %) yang dilaksanakan melalui kegiatan :

1. Penyusunan Data Base Potensi Produksi Pangan
2. Analisis Rasio Jumlah Penduduk terhadap Jumlah Kebutuhan Pangan
3. Pemetaan Daerah Rawan Pangan

4. Pelatihan Peningkatan Mutu Produk Pertanian / Perkebunan
5. Pengembangan Desa Mandiri Pangan
6. Sosialisasi Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan P2KP

3). Program Peningkatan Pemasaran Hasil Pertanian

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Pertanian mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.111.855.000,- dengan realisasi sebesar Rp.111.615.300,- atau (99.79 %) yang dilaksanakan melalui kegiatan :

1. Lomba Keanekaragaman Produk Hasil Olahan Pertanian
2. Penyuluhan Distribusi Pemasaran Atas Hasil Produk Pertanian Masyarakat

4). Program Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian / Perkebunan Lapangan

Program Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian/ Perkebunan Lapangan mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.869.971.000,- dengan realisasi sebesar Rp.807.129.000,- atau (92.78 %) yang dilaksanakan melalui kegiatan :

1. Penilaian Penyuluh Berprestasi
2. Forum Koordinasi BPP Tingkat Provinsi Kaltim
3. Pemberdayaan THL Pusat Sebagai Penyuluh Pertanian / Penyelia Mitra Tani Kabupaten (THL-TBPP dan THL-PMT)
4. Penyusun Program Penyuluh Kabupaten
5. Pengelolaan Data Base Kelembagaan / Penyuluhan Pertanian
6. Bimtek Monitoring Evaluasi Penyuluhan Pertanian / Perkebunan Lapangan
7. Peningkatan Sarana dan Prasarana Tenaga Penyuluh Pertanian
8. Jambore dan Festival Karya Penyuluh Pertanian IV (di Lampung)
9. Kesejahteraan Penyuluh Pertanian Lapangan

Misi 4:

Mewujudkan otonomi desa yang produktif melalui pemberdayaan masyarakat

Indikator Kinerja		Target (2012)	Capaian (2012)	Status
Program Prioritas : Program Pengembangan Ekonomi lokal partisipatif				
1	Dana Partisipasi Pembangunan	1.50%	391,057,779	•
2	Peningkatan Angka Partisipasi masyarakat dari Tahun sebelumnya	1.50%	1.50%	•

Keterangan:

- : Telah tercapai
- : Akan tercapai
- ↓ : Perlu tindakan khusus

Pencapaian target-target diatas dilaksanakan melalui program dan kegiatan :

1). Program pengembangan lembaga ekonomi perdesaan

Program pengembangan lembaga ekonomi perdesaan mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.54.384.660,- dengan realisasi sebesar Rp.53.235.000,- atau (98 %) yang dilaksanakan melalui kegiatan : Monitoring evaluasi dan pelaporan beras miskin (raskin)

2). Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa;

Program Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.1.693.783.000,- dengan realisasi sebesar Rp.1.653.330.650,- atau (98 %) yang dilaksanakan melalui kegiatan:

1. Lomba kepala desa dan lurah berprestasi
2. Bulan bakti gotong royong masyarakat
3. Lomba desa dan kelurahan
4. Gelar teknologi tepat guna
5. Pembinaan posyantekdes dan TTG unggulan
6. KKN
7. Koordinasi program pengelola kegiatan PNPM Mandiri Pedesaan (PAP)
8. Monitoring evaluasi pelaporan penerapan system aplikasi profil desa/kelurahan

3). Peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan

Program Peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan dalam membangun desa mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.100.493.260,- dengan realisasi sebesar Rp.83.032.500,- atau (83 %) yang dilaksanakan melalui kegiatan :

1. Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan Fasilitasi Pembangunan Rumah Masyarakat Kurang Mampu
2. Pelantikan Kepala desa dan BPD
3. Sosialisasi Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna

4). Peningkatan kualitas SDM aparatur desa

Program Peningkatan kualitas aparatur desa mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.147.386.200,- dengan realisasi sebesar Rp.145.934.200,- atau (99 %) yang dilaksanakan melalui kegiatan :

1. Fasilitasi pengelolaan keuangan desa

2. Bintek pengelolaan keuangan desa
3. Monitoring evaluasi pelaporan pelaksanaan administrasi desa

5). Penyusunan Perda

Program penyusunan perda mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.61.100.000,- dengan realisasi sebesar Rp.46.257.500,- atau (76 %) yang dilaksanakan melalui kegiatan:

1. Sosialisasi peraturan daerah dan peraturan bupati tentang desa
2. Pemekaran pedesaan

6). Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa

Program Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.250.390.000,- dengan realisasi sebesar Rp.237.192.600,- atau (95 %) yang dilaksanakan melalui kegiatan:

Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan ADD

Misi 5:

Meningkatkan sarana dan prasarana publik yang mendukung produktivitas perekonomian dalam rangka pemerataan pembangunan

	Indikator Kinerja	Target (2012)	Capaian (2012)	Status
Program Prioritas : Program pengembangan Infrastruktur dan prasarana wilayah				
1	Peningkatan rasio jalan kabupaten yang baik	400	400	•
2	Peningkatan rasio jembatan yang baik	<u>30</u> 30	<u>30</u> 30	•
3	Jumlah ruas jalan yang dilengkapi rambu lalu lintas	<u>15</u> 13	<u>10</u> 13	→
4	Terpenuhinya kebutuhan fasilitas utama dan penunjang terminal penumpang dan barang	<u>3</u> 3	<u>1</u> 3	→
5	Tercukupinya SDM penyelenggaraan pelayanan transportasi dibanding dengan kebutuhan	<u>5</u> 5	<u>4</u> 5	→
6	Terpenuhinya sarana dan prasarana uji KIR kendaraan bermotor	<u>10</u> 12	<u>10</u> 12	•
7	Pengembangan jaringan listrik pedesaan	<u>3</u> 3	<u>3</u> 3	•
8	Peningkatan jumlah fasilitas Umum yang terbangun	0.12%	0.12%	•
9	Peningkatan jaringan irigasi utama yg baik	0.04%	0.04%	•
10	Peningkatan rasio kondisi jaringan irigasi pedesaan yg baik	0.12%	0.12%	•

11	Pencapaian target pembangunan bangunan pengendali banjir	0.12%	0.12%	•
12	Pencapaian target pembinaan organisasi pengelola air	<u>40</u>	<u>40</u>	•
		40	40	
13	Peningkatan pemenuhan kebutuhan air bersih	0.12%	0.12%	•

Keterangan:

- : Telah tercapai
- : Akan tercapai
- ↓ : Perlu tindakan khusus

Pencapaian target-target diatas dilaksanakan melalui program dan kegiatan :

1). Pembangunan Jalan dan Jembatan

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 244.234.312,615,- dengan realisasi sebesar Rp.161.902.776,750,- atau (66.29%) yang dilaksanakan melalui kegiatan :

1. Peningkatan Jl. Girimukti Dalam (Multiyears)
2. Peningkatan Kawasan Pusat Pemerintahan (Multiyears)
3. Pengalihan Jl. Trase Jalan Provinsi (Multiyears)
4. Peningkatan Jl. Masjid Al Ula Nenang - Majapahit (Multiyears)
5. Pembangunan Jl. Ingkur - Majapahit - Gn. Seteleng RT. 06 (Multiyears)
6. Peningkatan Jl. Babulu Darat - Rawa Sebakung - Sekunder GG. Ali - Rawa Mulya - Babulu Laut (Multiyears)
7. Peningkatan Jl. Babulu Darat - Babulu Laut - Labangka (Multiyears)
8. Peningkatan Jl. Bukit Raya (Multiyears)
9. Peningkatan Jl. Sesulu - Bendung Waru - Bangun Mulyo (Multiyears)
10. Peningkatan Jl. IKK Waru (Multiyears)
11. Pembangunan Jl. Coastal Road (Multiyears)
12. Peningkatan Jembatan Costal Road (Multiyears)
13. Peningkatan Jl. Simpang Bere-Bere - Tj. Tengah - Petung - Kedung Rejo - Saloloang - Pejala - KP. Baru - Giri Mukti - Pondok Uma (Multiyears)
14. Peningkatan Jl. Nenang - Gn. Steleng - Gn. Ulin (Multiyears)
15. Peningkatan Jl. Gn. Intan - Gn. Makmur - Sebakung Jaya (Multiyears)
16. Pelebaran Jalan Nasional KM 5 (Bankeu Prov. 2012)
17. Pembangunan Jl. Akses Pelabuhan Benua Taka (Pelabuhan Sandar)
18. Pembangunan Jl. Kampung Baru - Pejala - Seloloang
19. Pembangunan Jl. Masuk ke Gedung Parkir Pemadam Sepaku
20. Pembangunan Jalan Usaha Tani Tunreng Tellue Kelurahan Gn. Steleng

21. Pembangunan Jl. Desa Labangka Tebus Guntung
22. Peningkatan Jl. Transbangdep Labangka Barat Tembus RT. 4 Labangka
23. Pembangunan Jalan Persatuan Api-Api
24. Pengerasan Jalan H. M Nurdin RT 02 Kelurahan Penajam
25. Peningkatan Jalan Kelompok Tani Karya Usaha RT 03 Waru
26. Pembangunan Jembatan Nelayan Rumput Laut Jalan Pantai RT 05 Sungai Parit
27. Pembangunan Jembatan Titian Jenebora (WA Kudus)
28. Peningkatan Jalan Usaha Tani Beringin Bangkit Rt 09 Tembus RPH Girimukti
29. Peningkatan Jalan Karya Utama RT 08 Lawe-Lawe
30. Peningkatan Jalan Usaha Tani 3 Saloloang RT 03
31. Pembangunan Jalan Usaha Tani Pantai Manis
32. Lanjutan Jalan Sama Taka Desa Babulu Darat
33. Pembangunan Jalan Usaha Tani Tembus Strat 2 Girimukti
34. Peningkatan Jalan H. Tatta Nipah-Nipah
35. Peningkatan Jalan Gusung - Gn. Steleng
36. Peningkatan Jalan RT 04 Kelurahan Riko Bukit Subur
37. Peningkatan Jl. Langsung Labangka RT 01
38. Peningkatan Jl Kavling Baru Lawe-Lawe Girimukti Kec. Penajam
39. Peningkatan Jalan Baru Petung RT 10
40. Lanjutan Peningkatan Jalan Raden Sesulu
41. Pembangunan Jembatan Usaha Tani Labangka 3 Unit
42. Peningkatan Jalan Swadaya A dan B
43. Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Gn. Mulia
44. Peningkatan Jalan Vico Babulu Darat
45. Peningkatan Jalan Gg. Yus RT 05 Labangka
46. Peningkatan Jalan Lingkungan Sebakung I
47. Peningkatan Jalan Wilayah Sebakung Jaya - Sumber Sari
48. Peningkatan Jalan H Habe Nipah-Nipah
49. Peningkatan Jl. Melati Desa Sukaraja Sepaku
50. Peningkatan Jl. Damai Kel. Sepaku
51. Peningkatan Jl. Istiqomah Kel. Sepaku
52. Peningkatan Jl. Telang Bule - Pejala Link I
53. Peningkatan Jl. Gg. Damai Kelurahan Sesumpu

54. Pembangunan Jalan Manila Tunan
55. Peningkatan Jalan Pepaya Blok F RT 07 dan RT 08 Gn. Makmur
56. Lanjutan Peningkatan Jalan Lingkungan RT 1,2,3 Petung Link A
57. Jembatan Riko - Sepan (Dinding Penahan)
58. Jembatan (Box culvert) Padat Karya L abangka
59. Peningkatan Jalan Lai Poros Sebakung Desa Gn. Makmur
60. Pembangunan Jalur Dua Babulu
61. Peningkatan Wilayah Girimukti Luar (Multiyears)
62. Peningkatan Jalan Sepaku Log Damp
63. Lanjutan Peningkatan Jalan Istiqomah Kelurahan Sepaku
64. Kegiatan Peningkatan Jalan Damai Kel. Sepaku
65. Pembangunan Jembatan Titian Kayu Api RT 19 Kelurahan Penajam
66. Pembangunan Turap / Talud / Bronjong

2). Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong

Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.13.945.271.000,- dengan realisasi sebesar Rp.11.735.701.450,- atau (69.59%) yang dilaksanakan melalui kegiatan :

1. Pembangunan Drainase Jl. Padat Karya RT 08 dan RT 12 Kelurahan Waru
2. Pembangunan Drainase Saluran Gn. Seteleng RT 09 - RT 25 Penajam
3. Pembangunan Saluran Pembuang RT 04 Glarak Babulu Darat
4. Pembangunan Drainase Pasangan Batu Lingkungan RT 06 Kelurahan Jenebora
5. Drainase Saluran Pembuang RT 03 A dan B Waru (lanjutan)
6. Pembangunan Saluran Pembuang RT 01 dan RT 03 Sesumpu
7. Pembangunan Saluran Pembuang Sungai Parit RT 06
8. Lanjutan Drainase Petung - Tunan
9. Lanjutan Drainase Jl. Jelaga RT 08 Gn. Steleng
10. Saluran Pembuang Pasir Kuarsa Kapao Kecil Gn. Steleng
11. Pembuatan Drainase Jalan Meriam Gn. Seteleng
12. Pembuatan Saluran Irigasi RT 01 Desa Api-Api
13. Pembuatan Drainase RT 01 Desa Api-Api
14. Pembangunan Drainase/Parit Jl. Sukamaju Rt 03 Penajam
15. Drainase RT 6 Maridan
16. Pembangunan Drainase Pasangan Batu Jl. Masjid Al Irsyad Kec. Waru

17. Drainase RT 2 Muan Buluminung
18. Drainase RT 7 Jl. H Abd Gani Penajam
19. Pembangunan Drainase Jalan Lombok Petung
20. Drainase Lapangan Sepakbola Labangka Barat
21. Pembuatan Pintu Air Penahan Air Asin Logpon Labangka
22. Pembangunan Drainase RT 07 Kelurahan Nenang
23. Pembangunan Saluran Pembuang RT 02 Nenang
24. Pembangunan Drainase KM 1 RT 04 Penajam
25. Pembangunan Drainase Rt 04 Kel. Waru
26. Pembangunan Drainase RT 08 Kel. Waru
27. Pembangunan Drainase RT 01 Kel. Waru
28. Pembuatan Drainase Gg. Telake RT 25 Babulu Darat
29. Pembuatan Pintu Air Babulu
30. Drainase Saluran Gg. Swadaya Rt 04 Penajam
31. Pembangunan Drainase & Jembatan Saluran Pembuang Arah Laut RT 11 Kel. Penajam
32. Lanjutan Lening Saluran Pembuang Sungai Parit
33. Pembuatan Drainase RT 21 Girimukti
34. Pembangunan Saluran Irigasi RT 06 Telang Bule
35. Normalisasi Saluran Primer Tambak Babulu (Realokasi Bankeu 2011)
36. Pembangunan Drainase Kapao Pelabuhan Benuo Taka Kel. Gn. Seteleng (Realokasi Bankeu 2011)
37. Normalisasi Parit RT 01, 02 dan RT 03
38. Pembangunan Bendungan Lawe-Lawe
39. Program Pengendalian Banjir Rehabilitas/Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai Tersebar di 4 Kecamatan (Swakelola)

3). Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong

Program Pembangunan Turap/Talud/Beonjong mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.9.81.850.000,- dengan realisasi sebesar Rp.9.18.850.000,- (100%) yang dilaksanakan melalui kegiatan : Pembangunan Anjungan dan Pengaman Pantai Nipah-Nipah

4). Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku

Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.14.268.520.600,- dengan realisasi sebesar Rp.7.614.679.000,- (53%)

yang dilaksanakan melalui kegiatan : Pembangunan Embung Lawe-Lawe (Multiyears)

5). Program Pengendalian Banjir

Program Pengendalian Banjir mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.1.978.679.700,- dengan realisasi sebesar Rp.1.432.637.545,- (72.40%) yang dilaksanakan melalui kegiatan : Rehabilitasi/Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai Tersebar di 4 Kecamatan (Swakelola)

6). Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.226.108.768.695,- dengan realisasi sebesar Rp169.625.355.461,- (75%) yang dilaksanakan melalui kegiatan :

1. Semenisasi Jalan Kuburan Dusun III Sukomulyo
2. Semenisasi Gg. Dusun Mekar Sari RT 03 dan RT 05 Desa Telemow Kec. Sepaku
3. Semenisasi Gg. Imam Bonjol RT 01 Desa Telemow Kec. Sepaku
4. Pembangunan Pagar dan Semenisasi Jalan Kuburan Dusun 1 Sukomulyo
5. Semenisasi Gg. BTN KM 1 RT 09 Gn. Seteleng
6. Semenisasi Jalan Warga RT 011 (Jl. Mespekuni) Kel. Sotek
7. Semenisasi RT 11 Jenebora
8. Semenisasi Jalan Sama Taka I TR 21 Waru (APBD-P)
9. Semenisasi RT 04 Jenebora
10. Semenisasi RT 05 Samping Gg. Swalayan Penajam
11. Semenisasi RT 2 Nipah-Nipah
12. Semenisasi Gg. RT 09 Kel. Nipah-Nipah
13. Semenisasi Gg. Beringin RT 03
14. Semenisasi Gg. Pantai III Tanjung Tengah RT 02
15. Semenisasi Gg. Pantai I Tanjung Tengah RT 04
16. Semenisasi Gg. Gemini KM 02 Penajam
17. Rabat Beton Gg. Pentol RT 08 Gn. Seteleng
18. Rabat Beton Gg. Rahmat RT 07 Gn. Seteleng
19. Semenisasi RT 02 Pantai Lango Kec. Penajam RT 1,2,3
20. Semenisasi Gg. Taka 1 RT 05 Maridan
21. Semenisasi Gg. Taka 2 RT 05 Maridan
22. Semenisasi Gg. RT 07 Desa Semoi II

23. Semenisasi Gg. Ratijah RT 04 Maridan
24. Semenisasi Gg. At Taqwa RT 04 Maridan
25. Semenisasi Gg. RT 19 Desa Semoi II
26. Semenisasi Gg. Pelajar RT 06 Maridan
27. Semenisasi Gg. Nusantara II RT 05 Maridan
28. Semenisasi TKIT Ibnu Sina Kec. Waru
29. Semenisasi Jalan Saluran Air RT 02 Gunung Seteleng
30. Rabat Beton Gg. Lalu Mustiaji RT 12 Kel. Petung
31. Lanjutan Semenisasi Kuburan Makmur Babulu
32. Semenisasi Gg. Batuah RT 04 Waru
33. Semenisasi Gg. Damai RT 25 Kel. Penajam
34. Semenisasi Gg. Buaya Kelurahan Penajam
35. Semenisasi Samping Terminal Kel. Penajam
36. Perbaikan Pondasi dan Semenisasi Pelabuhan Tj. Harapan Maridan
37. Semenisasi Gg. Taka Kerok Penajam
38. Semenisasi Gg. Andromeda (APBD-P)
39. Semenisasi Jl. Penghubung Tembus Coastal Road Sei Parit RT 05 (APBD-P)
40. Semenisasi Jl. Tembus Jembatan RT 01 Kel. Sei Parit (APBD-P)
41. Semenisasi Jl. RT 05 Kel. Nenang (APBD-P)
42. Semenisasi Jl. RT 02 Kel. Nenang (APBD-P)
43. Semenisasi Jl Pak Kadir RT 12 A Kel. Petung (APBD-P)
44. Semenisasi Jl. Sama Taka II RT 21 Waru (APBD-P)
45. Semenisasi Gg. Swadaya RT 03 Kel. Penajam (APBD-P)
46. Semenisasi Babulu Laut RT 03 Kec. Babulu (APBD-P)
47. Semenisasi Babulu Laut RT 03 Kec. Babulu (APBD-P)
48. Peningkatan Jalan Kuburan Kayu Api RT 019 Kel. Penajam (APBD-P)
49. Semenisasi Gg. Barokah RT 04 Babulu Darat (APBD-P)
50. Semenisasi Gg.KM 03 Penajam (APBD-P)
51. Semenisasi Gg. Swadaya RT 08 Gn. Steleng (APBD-P)
52. Pembangunan Jembatan Titian RT 06 Babulu Laut
53. Penyelesaian Kantor Dinas Pekerjaan Umum
54. Pembangunan Masjid Agung (Multiyears)
55. Pembangunan Gedung Olah Raga Tahap III (Multiyears)
56. Komplek Islamic Center (Manasik dan Jalan Masuk) (Multiyears)

57. Pembangunan Sekolah Terpadu (Sisa Full Design) (Multiyears)
58. Pembangunan RSUD Tipe C (sisa Full Design) (Multiyears)
59. Pembangunan Pasar Induk Penajam (Bankeu Prov. 2012)
60. Pembangunan Gapura RT 10 Kelurahan Gn. Steleng
61. Pembangunan Workshop Pembuatan Perahu Tradisional
62. Lanjutan Pembangunan Kantor KPU
63. Pembangunan Gudang Barang Bukti Kantor Kejaksaan

7). Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan

Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.54.378.400.000,- dengan realisasi sebesar Rp.47.339.983.050 (87.05%) yang dilaksanakan melalui kegiatan :

1. Pengadaan dan Pemasangan Instalasi Pengolah Air (WTP) Kec. Sepaku (Realokasi Bankeu P. APBD 2010)
2. Pemeliharaan PATM Tengin Baru (APBD-P)
3. Pembangunan WTP
4. Pembangunan Jaringan Distribusi Air Bersih
5. Pengadaan Accessories / Kelengkapan PDAM (APBD-P)
6. Pengadaan Pompa PDAM Lawe-Lawe
7. Pengadaan Genset PDAM Lawe-Lawe

8). Program Pengelolaan Areal Pemakaman

Program Pengelolaan Areal Pemakaman mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.100.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.98.958.000,- (98.96 %) yang dilaksanakan melalui kegiatan : Pembangunan Taman Depan Makam BTN KM 4 Nenang

9). Program Perencanaan Tataruang

Program Perencanaan Tataruang mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.545.200.000,- dengan realisasi sebesar Rp.1.360.366.700,- (88.04%) yang dilaksanakan melalui kegiatan : Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Zoning Regulation Kec. Babulu

10). Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampah

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampah mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.3.493.362.000,- dengan realisasi sebesar Rp.3.342.127.500,- (95.67%) yang dilaksanakan melalui kegiatan :

1. Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Sampah
2. Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan
3. Melaksanakan Penyapuan Jalan/Pembesihan Dalam Kota
4. Pengumpulan dan Pengangkutan Sampah dari TPS dan TPA
5. Pembangunan Sarana dan Prasarana TPA Sampah

11). Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.2.376.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.2.193.816.000,- (92.33%) yang dilaksanakan melalui kegiatan :

1. Pemeliharaan Taman Kota
2. Pembangunan Fasilitas Pelengkap di Greenhouse (Swakelola)
3. Pengadaan Bibit Pemeliharaan Taman Kota
4. Penanaman Pohon Peneduh
5. Pembangunan Taman Median Jalan Depan Polres PPU
6. Pembangunan Taman Median Jalan Depan SMU I Penajam Tiga Segmen
7. Pembangunan Taman Makam BTN KM 4 Nenang
8. Pembangunan Tiang Bendera Median Jalan Propinsi Kec. Penajam
9. Pembangunan Taman Median Jalan Provinsi Kec. Penajam (Taman Perdu dan Semak)
10. Pengadaan Mobil Tangki Penyiraman
11. Pembelian Tanaman Perdu, Penutup Tanah dan Semak

12). Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 53.016.695.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 45.392.841.088 (85.62 %) yang dilaksanakan melalui kegiatan :

1. Koordinasi Dalam Pembangunan Prasarana Dan Fasilitas Perhubungan
2. Sosialisasi Kebijakan di Bidang Perhubungan
3. Pembangunan Pelabuhan Sisi Darat

13). Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Dan Fasilitas LLAJ

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Dan Fasilitas LLAJ mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.270.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.241.289.000,- (89.37%) yang dilaksanakan melalui kegiatan :

1. Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor
2. Rehabilitasi/Pemeliharaan Terminal/Pelabuhan

14). Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

Program Peningkatan Pelayanan Angkutan mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.796.955.000,- dengan realisasi sebesar Rp.636.645.850,- (79.88%) yang dilaksanakan melalui kegiatan :

1. Peningkatan Disiplin Masyarakat Menggunakan Angkutan
2. Temu Wicara Pengelola Angkutan Umum Guna Meningkatkan Keselamatan Penumpang
3. Uji Kelayakan Sarana Transportasi Guna Keselamatan Penumpang
4. Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya
5. Sosialisasi/ Penyuluh Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan
6. Kegiatan Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir/Juru Mudik/Awak Kendaraan Angkutan Umum Teladan
7. Pengamanan Natal dan Tahun Baru

15). Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

Program Peningkatan Pelayanan Angkutan mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.42.400.000,- dengan realisasi sebesar Rp.30.422.000,- (71.75) yang dilaksanakan melalui kegiatan : Pembangunan Rumah Ibadah di Terminal dan Pelabuhan

16). Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

Program Pengendalian dan Pengamanan Lalulintas mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.1.030.095.000,- dengan realisasi sebesar Rp.876.582.975,- (85.10%) yang dilaksanakan melalui kegiatan :

1. Pengadaan Rambu-rambu Lalulintas
2. Pengamanan Angkutan Lebaran Terpadu
3. Pengawasan dan Pengamanan Kegiatan Kepala Daerah

17). Program Pengembangan Nilai Budaya

Program Pengembangan Nilai Budaya mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.305.718.400,- dengan realisasi sebesar Rp.185.677.000,- (60.73%) yang dilaksanakan melalui kegiatan :

1. Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah
2. Pemberian Dukungan, Penghargaan dan Kerjasama di Bidang Budaya

18). Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.293.394.000,- dengan realisasi sebesar Rp.258.623.000,- (88.15%)

yang dilaksanakan melalui kegiatan : Fasilitasi Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Kekayaan Budaya

19). Program Pengelolaan Keragaman Budaya

Program Pengelolaan Keragaman Budaya mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 170.598.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 142.591.000,- ((83.58%) yang dilaksanakan melalui kegiatan :

1. Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah
2. Fasilitas Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah

20). Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.188.750.000,- dengan realisasi sebesar Rp.160.698.500- (85.14 %) yang dilaksanakan melalui kegiatan :

1. Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi
2. Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi
3. Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi

21). Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi

Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 107.890.000,- dengan realisasi sebesar Rp.94.335.000,- (87.44%) yang dilaksanakan melalui kegiatan : Pelatihan SDM Dalam Bidang Komunikasi dan Informasi

22). Program Kerjasama Informasi dan Media Massa

Program Kerjasama Informasi dan Media Mass mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.312.870.000,- dengan realisasi sebesar Rp.222.793.520,- (71.21%) yang dilaksanakan melalui kegiatan :

1. Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah
2. Temu Wicara Dialog tentang Pembangunan Daerah

23). Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.431.900.000,- dengan realisasi sebesar Rp.407.461.500,- (94.34%) yang dilaksanakan melalui kegiatan :

1. Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan Luar Negeri
2. Temu Wicara Dialog tentang Pembangunan Daerah

24). Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.2.104.270.000,- dengan realisasi sebesar Rp.1.836.543.000,- (87.28%) yang dilaksanakan melalui kegiatan :

1. Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata
2. Promosi Daerah Tujuan Pariwisata

25). Program Pengembangan Kemitraan

Program Pengembangan Kemitraan mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.135.257.050,- dengan realisasi sebesar Rp.121.672.500,- (89.96%) yang dilaksanakan melalui kegiatan :

1. Pengembangan dan penguatan informasi dan data base
2. Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Profesionalisme Bidang Pariwisata

Misi 6 :

Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, professional dan bertanggungjawab, efisien dan efektif yang dapat memberikan kualitas pelayanan publik yang prima

	Indikator Kinerja	Target (2012)	Capaian (2012)	Status
1	Peningkatan kuantitas sarana prasarana aparatur	5 25	-	-
2	Tingkat pelayanan pengaduan masyarakat			
3	Jumlah peraturan daerah yang disusun	80%	-	-
4	Ketepatan laporan pelaksanaan pembangunan			
5	Ketepatan penerbitan dokumen dan laporan keuangan			
6	Peningkatan pajak daerah	<u>273.77</u> 100	<u>3,151,151,663.33</u> 2,182,458,550.00	•
7	Peningkatan retribusi daerah	<u>22.32</u> 100	<u>2,864,359,333.49</u> 3,611,000,000.00	?
8	Peningkatan hasil penjualan daerah dan pengelolaan kekayaan	<u>12.45</u> 100	<u>6,205,491,296.51</u> 15,050,000,000.00	?
9	Peningkatan pendapatan daerah lainnya	<u>30.92</u> 100	<u>20,235,703,845.04</u> 21,103,697,200.00	?
10	Jumlah pegawai sesuai dengan kebutuhan riil pemerintah Kabupaten Jumlah Pengiriman Pegawai untuk mengikuti Pendidikan dan latihan (struktural, fungsional, teknik)	-	1,470 97%	•

Bab II Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun 2012
Dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan

11	Tingkat kelulusan peserta pendidikan dan pelatihan (struktural, fungsional, teknik)			
	Struktural	100%	100% (61/61)	•
	Fungsional	100%		
	Teknik	100%		
12	Penyelesaian dokumen kepegawaian tepat waktu	100%	100%	•
13	Jumlah SKPD yang melaksanakan analisa jabatan	<u>3</u> 51	<u>3</u> 51	•
14	Jumlah SKPD yang menyusun standart pelayanan public	<u>48</u> 51	<u>17</u> 48	☐
15	Jumlah SKPD yang menyusun IKM	<u>2</u> 51	<u>14</u> 48	•
16	Perkembangan penertiban akte kelahiran	100% <u>68.22%</u> 31.77%	10,973 <u>126,525</u> 58,941	•
17	Penduduk ber KTP	100%	<u>96,374</u> 185,520	☐
18	Tingkat Kesempatan Kerja	60.88%	65%	•
19	Peningkatan Upah Minimum Kabupaten	6.11%	1,303,900	•

Keterangan:

- : Telah tercapai
- ☐ : Akan tercapai
- ☐ : Perlu tindakan khusus

Pencapaian target-target diatas dilaksanakan melalui program dan kegiatan :

1). Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan KDH

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan KDH mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.75.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.58.056.200,- atau (77.41%) yang dilaksanakan melalui kegiatan : Sosialisasi Aturan Kepegawaian

2). Program Pengelolaan Data dan Dokumentasi Kepegawaian

Program Pengelolaan Data dan Dokumentasi Kepegawaian mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.893.037.500,- dengan realisasi sebesar Rp.851.967.200,- atau (95.40 %) yang dilaksanakan melalui kegiatan :

1. Fasilitasi Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian Daerah
2. Peningkatan dan Pelatihan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah

3. Pengumpulan Data dan Informasi Sistem Informasi Kepegawaian Daerah

3). Program Peningkatan Kapasitas Aparatur

Program Program Peningkatan Kapasitas Aparatur mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.694.080.000,- dengan realisasi sebesar Rp.684.125.400,- atau (98.56 %) yang dilaksanakan melalui kegiatan :

1. Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Bagi Calon PNS Daerah
2. Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme

4). Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.6.744.481.000,- dengan realisasi sebesar Rp.6.399.754.150,- atau (94.88 %) yang dilaksanakan melalui kegiatan :

1. Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah
2. Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin PNS
3. Seleksi Pemberian Tugas Belajar dan Ikatan Dinas
4. Penyelenggaraan dan Penerimaan Praja IPDN
5. Penyelenggaraan Diklat Teknis, Fungsional, dan Kepemimpinan
6. Proses Pensiun PNS dan Proses Penyesuaian Masa Kerja PNS
7. Pelantikan Pejabat
8. Penyusunan dan Penilaian Jabatan dan Kepangkatan PNS
9. Proses Penetapan NIP CPNS
10. Proses Kenaikan Pangkat CPNS
11. Penyusunan Formasi CPNS
12. Proses Mutasi PNS
13. Proses Karsu/Karis. Taspen, Askes, dan Karpang
14. Proses Penghargaan Styalencana Karya Satya
15. Monitoring Pelaksanaan Aparatur
16. Penetapan Angka Kredit Tenaga Kesehatan, Pendidikan, Pertanian
17. Sumpah Janji PNS 100%
18. Sumpah Janji PNS 100%
19. Sidang-Sidang BAPERJAKAT
20. Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS
21. Konversi NIP
22. Proses Kartu Pegawai Elektronik (KPE)

5). Program Penataan Administrasi Kependudukan

Program Administrasi Kependudukan mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.9.167.241.373,- dengan realisasi sebesar Rp.8.364.275.296,- atau (91.24%) yang dilaksanakan melalui kegiatan :

1. Pelatihan Tenaga Pengelola SIAK
2. Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (Membangun Updating dan Pemeliharaan)
3. Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan
4. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
5. Sosialisasi Pencatatan Sipil
6. Pelayanan Akta Catatan Sipil Dalam Kantor
7. Pelayanan Pencatatan Perkawinan diluar kantor
8. Sosialisasi Mobilisasi Penduduk Dalam Rangka Penerapan, Penerbitan E-KTP dan Penyusunan DP4
9. Penerapan dan Penerbitan E-KTP Secara Massal di Kab. PPU
10. Penyusunan dan Penerbitan Data Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilukada (DP4)
11. Pelayanan Pencatatan Sipil

6). Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja

Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.439.059.140,- dengan realisasi sebesar Rp. 400.407.342,- atau (91.20%) yang dilaksanakan melalui kegiatan :

1. Seleksi Calon Peserta Pelatihan
2. Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja
3. Penyusunan Data Base Tenaga Kerja

7). Program Peningkatan Kesempatan Kerja

Program Peningkatan Kesempatan Kerja mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.138.325.000,- dengan realisasi sebesar Rp.137.561.785,- atau (99.45%) yang dilaksanakan melalui kegiatan : Penyebarluasan Informasi Tenaga Kerja

8). Program Perlindungan Pengembangan Lembaga

Program Perlindungan Pengembangan Lembaga mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 160.800.000,- dengan realisasi sebesar Rp.143.177.900,- atau (89.04 %) yang dilaksanakan melalui kegiatan : Penunjang Dewan Pengupahan Kabupaten PPU

Misi 7 :

Menciptakan rasa aman dan iklim berusaha yang kondusif untuk menumbuhkan berkembang kepercayaan dalam berinvestasi

	Indikator Kinerja	Target (2012)	Capaian (2012)	Status
Program Prioritas : Program Pengembangan Potensi lokal partisipatif				
1	Peningkatan IKM yang memiliki ijin	32/545	28/546	→
2	Penurunan jumlah pelanggaran Tramtib	87%	44.00%	↓
3	Penurunan jumlah pelanggaran penegakan PERDA	-	226	•
4	Rasio jumlah pamong praja per 1,000 penduduk	1:2000	1:1750	↓
5	Presentasi organisasi masyarakat, parpol, pemuda, organisasi kemasyarakatan yang dibina	1.77%	6	↓
6	Rasio jumlah Linmas per 1,000 penduduk	1:250	1,160	•
7	Rasio POS Siskamling per jumlah desa/kelurahan	-	550	•

Keterangan:

- : Telah tercapai
- : Akan tercapai
- ↓ : Perlu tindakan khusus

Pencapaian target-target diatas dilaksanakan melalui program dan kegiatan :

1). Program Penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif

Program Penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.246.180.800,- dengan realisasi sebesar Rp.207.537.900,- atau (84.30%) yang dilaksanakan melalui kegiatan

1. Perencanaan, Koordinasi dan Pengembangan Usaha Kecil, Menengah yang Kondusif
2. Faslitasi Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah
3. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

2). Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.319.269.200,- dengan realisasi sebesar Rp.292.332.100,- atau (91.56 %) yang dilaksanakan melalui kegiatan

1. Fasilitasi Pengembangan Sarana Promosi Hasil Produksi

2. Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan

3). Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.304.480.000,- dengan realisasi sebesar Rp.256.296.500,- atau (84.18 %) yang dilaksanakan melalui kegiatan

1. Pemantauan Pengelolaan Penggunaan Dana Pemerintah Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
2. Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro Kecil Menengah

4). Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.197.291.350,- dengan realisasi sebesar Rp.161.195.300,- atau (81.70 %) yang dilaksanakan melalui kegiatan

1. Peningkatan Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen
2. Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa
3. Operasionalisasi dan Pengembangan UPTD Kemetrollogian Daerah

5). Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor

Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.506.236.900,- dengan realisasi sebesar Rp.464.791.100,- atau (91.81 %) yang dilaksanakan melalui kegiatan

1. Pengembangan Data Base Informasi Potensi Unggulan
2. Membangun Jejaring dengan Ekspertir
3. Pembangunan Promosi Perdagangan Internasional

6). Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.211.735.000,- dengan realisasi sebesar Rp.184.201.000,- atau (87.00%) yang dilaksanakan melalui kegiatan

1. Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk
2. Pengembangan Kelembagaan Kerjasama Kemitraan
3. Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri

7). Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi

Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.280.798.500,- dengan realisasi sebesar Rp.201.838.400,- atau (71.88%) yang dilaksanakan melalui kegiatan:

1. Pengembangan Sistem Inovasi Teknologi Industri
2. Penguatan Kemampuan Industri Berbasis Teknologi

8). Program Peningkatan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

Program Peningkatan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.1.537.964.750,- dengan realisasi sebesar Rp.1.085.271.029,- atau (70.57%) yang dilaksanakan melalui kegiatan

1. Fasilitasi bagi Industri Kecil dan Menengah terhadap pemanfaatan Sumber Daya
2. Pembinaan Industri Kecil dan Menengah Dalam Memperkuat Jaringan Kluster Industri

Fasilitasi Kerjasama Kemitraan Industri Mikro, Kecil dan Menengah dengan **swasta**

9). Program Peningkatan Kemampuan Industri

Program Peningkatan Kemampuan Industri mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.123.450.000,- dengan realisasi sebesar Rp.0,- karena ketidaksiapan tim pelaksana kegiatan dengan pelaksanaan kegiatan di akhir tahun anggaran, yang dilaksanakan melalui kegiatan: Fasilitasi Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri

10). Program Penataan Struktur Industri

Program Penataan Struktur Industri mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.576.875.000,- dengan realisasi sebesar Rp.328.849.000,- atau (57.01 %) yang dilaksanakan melalui kegiatan

1. Pembinaan Keterkaitan Produksi Industri Hulu Hingga ke Hilir
2. Penyediaan Sarana Maupun Prasarana Industri

11). Program Pembinaan dan Pendidikan Politik

Program Pembinaan dan Pendidikan Politik mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.526.580.992,- dengan realisasi sebesar Rp.462.045.654,- (87,7%) dikarenakan ada 3 partai politik tidak mengajukan pencairan, yang dilaksanakan melalui kegiatan : Verifikasi Bantuan Dana Parpol

Misi 8 :

Peningkatan pranata kelembagaan ekonomi rakyat

	Indikator Kinerja	Target (2012)	Capaian (2012)	Status
Program Prioritas : Program Pengembangan Koperasi dan UKM				
1	Peningkatan Volume Usaha Koperasi	1.05%	8.88%	•
2	Peningkatan Koperasi aktif	<u>44</u> 312	<u>35</u> 312	↓
3	Peningkatan UKM yang di Bina	1.20%	<u>26</u> 490	•
Program Prioritas : Program Pengembangan Industri dan Perdagangan				
4	Peningkatan Jumlah Industri kecil dan menengah	1.002%	2.75%	•
5	Peningkatan Unit Usaha Perdagangan	1.005%	0.14%	→
6	Peningkatan Kunjungan Wisata	54,000	9,822	↓

Keterangan:

- : Telah tercapai
- : Akan tercapai
- ↓ : Perlu tindakan khusus

Misi 9 :

Mengembangkan potensi wilayah dan penataan ruang yang berwawasan lingkungan

	Indikator Kinerja	Target (2012)	Capaian (2012)	Status
1	Peningkatan rata-rata baku mutu kualitas (kadar PH, BOD, COD dan TSS) air sungai dan air tanah	4	8	•
2	Peningkatan kualitas udara ambient	-	-	
3	Peningkatan volume sampah yang terangkut	49%	49%	•
4	Penurunan luas areal lahan kritis	1.1%	0.04%	↓
5	Peningkatan kelestarian kawasan pesisir pantai	-	-	
6	Tersusunnya Rencana/Study Tata Ruang sesuai kebutuhan Daerah	<u>19</u> 17	-	-
7	Peningkatan Pengelolaan Objek pariwisata	<u>1</u> 7	<u>1</u> 11	•

Pencapaian target-target diatas dilaksanakan melalui program dan kegiatan :

1). Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.671.878.219,- dengan realisasi sebesar Rp550.591.669,- (81.95.%) yang dilaksanakan melalui kegiatan :

1. Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura
2. Pemantauan Kualitas Lingkungan
3. Pengawasan Pelaksanaan Bidang Lingkungan Hidup
4. Peningkatan Peringkat Kinerja Perusahaan (Proper)
5. Koordinasi Pengelolaan Prokasis/Perkasih
6. Monitoring Evaluasi dan Pelaporan
7. Koordinasi Pengawasan Lingkungan Hidup (Tim Amdal)
8. Kajian analisis Kualitas Air Pada Badan Air yang dilalui oleh kegiatan industri atau perkebunan.

2). Program Pelindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

Program Perlindungan dan Konservasi Alam mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.377.540.000,- dengan realisasi sebesar Rp.365.205.000,- atau (96.73 %) yang dilaksanakan melalui kegiatan :

1. Pantai dan Laut Lestari
2. Peningkatan Koservasi Daerah Tangkapan Air dan Sumber-Sumber Air
3. Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia
4. Sekolah Berwawasan Lingkungan/Adiwiyata
5. Penyusunan Profil Keanekaragaman Hayati
6. Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia Tingkat Kabupaten

3). Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya dan Lingkungan Hidup mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 384.561.500,- dengan realisasi sebesar Rp.374.787.500,- atau (97.46%) yang dilaksanakan melalui kegiatan :

1. Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah
2. Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 4). Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan

Program Pemanfaatan Sumber Daya Hutan mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.1.859.995,- dengan realisasi sebesar Rp.1.526.379.068,- atau (82.06 %) yang dilaksanakan melalui kegiatan :

1. Optimalisasi PNPB
2. Operasional Pengembangan pengujian dan pengendalian peredaran hasil hutan
3. Monitoring, Evaluasi dan pelaporan
4. Pelatihan pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan hutan (pelatihan budidaya lebah madu)
5. Pelatihan pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan hutan (pelatihan pengelolaan dan pelestarian mangrove)
6. Pelatihan pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan hutan (pelatihan budidaya gaharu)

5). Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.1.706.700.000,- dengan realisasi sebesar Rp.886.525.675,- atau (51.94 %) yang dilaksanakan melalui kegiatan :

1. Pembuatan bibit/benih tanaman kehutanan
2. Operasional Pelaksanaan pemeliharaan tahap tahun I reboisasi pada kawasan hutan (DAK-DR Tahap I)
3. Pembangunan fasilitas hutan kota (Kawasan pemerintahan)

6). Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.707.925.000,- dengan realisasi sebesar Rp.665.759.600,- atau (94.04 %) yang dilaksanakan melalui kegiatan :

1. Pencegahan dan Pengendalian kebakaran hutan dan lahan
2. Bimbingan teknis pengendalian kebakaran hutan dan lahan

7). Program Pengembangan Data / Informasi / Statistik Daerah

Program Pengembangan Data / Informasi / Statistik Daerah mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.88.750.000,- dengan realisasi sebesar Rp.10.380.000,- atau (11.70 %) yang dilaksanakan melalui kegiatan :
Penyusunan Data Base Kehutanan dan Perkebunan

8). Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.820.060.000,- dengan realisasi sebesar Rp.796.396.800,- atau (97.11 %) yang dilaksanakan melalui kegiatan :

1. Penyusunan Pelatihan petani dan pelaku agribisnis
2. Sekolah Lapang - Pengendalian Hama terpadu (SL-PHT PETANI)
3. Pelatihan budidaya kelapa dalam terpadu
4. Pelatihan penangkar bibit /benih tanaman perkebunan

9). Program Peningkatan Produksi Pertanian /Perkebunan

Program Peningkatan Peningkatan Produksi Pertanian /Perkebunan mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.1.210.450.000,- dengan realisasi sebesar Rp.196.787.400,- atau (16.26 %) yang dilaksanakan melalui kegiatan :

1. Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan
2. Sertifikasi bibit unggul pertanian dan perkebunan
3. Monitoring, Evaluasi dan pelaporan

10). Program Peningkatan Pemasaran Hasil Pertanian

Program Peningkatan Peningkatan Produksi Pertanian /Perkebunan mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.26.930.000,- dengan realisasi sebesar Rp.26.390.000,- atau (97.99 %) yang dilaksanakan melalui kegiatan: Pameran Hasil-Hasil Perkebunan

11). Program Pengembangan Usaha Tani

Program Peningkatan Pengembangan Usaha Tani mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.272.550.000,- dengan realisasi sebesar Rp.258.775.300,- atau (94.95 %) yang dilaksanakan melalui kegiatan :

1. Pendampingan APBN
2. Rapat koordinasi pembangunan perkebunan Propinsi Kalimantan Timur
3. Penyusunan Sumber daya perkebunan rakyat

12). Program Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Usaha Perkebunan

Program Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Usaha Perkebunan mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.657.415.000,- dengan realisasi sebesar Rp.456.623.500,- atau (69.46 %) yang dilaksanakan melalui kegiatan :

1. Tim penentuan indeks "K" (penetapan harga tandan buah segar kelapa sawit)
2. Pembinaan dan pengawasan usaha perkebunan
3. Penilaian usaha perkebunan

Misi 10 :

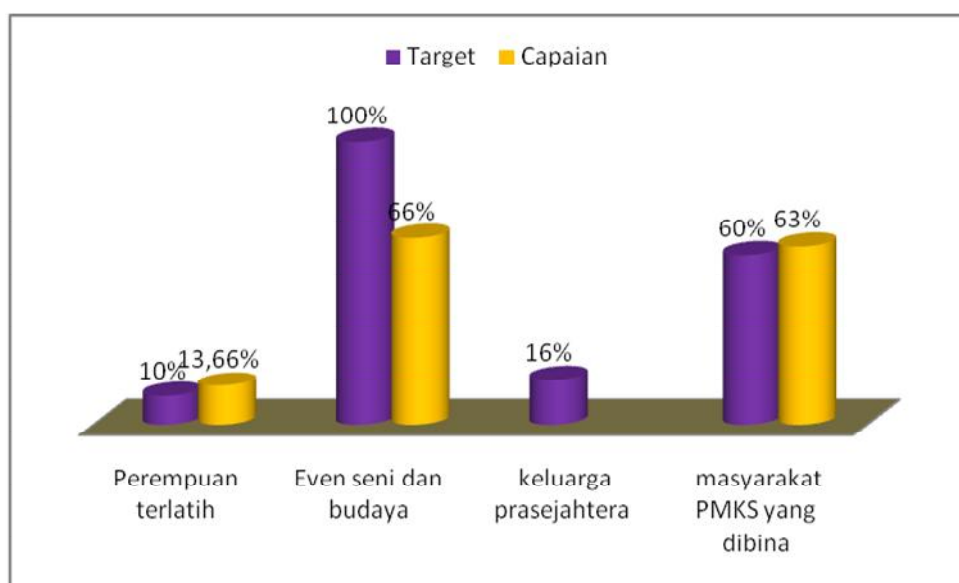
Meningkatkan kualitas kehidupan Sosial, Budaya yang Agamis

Indikator Kinerja		Target (2012)	Capaian (2012)	Status
1	Peningkatan Jumlah Perempuan terlatih	10%	13.66%	•
2	Peningkatan Even Seni dan Budaya	100%	66%	→
3	Penurunan Keluarga Prasejahtera	16%		
4	Peningkatan masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang dibina	60%	63%	•

Keterangan:

- : Telah tercapai
- : Akan tercapai
- ↓ : Perlu tindakan khusus

Grafik II.16 : Peningkatan kualitas kehidupan sosial, budaya yang agamis



Pencapaian target-target diatas dilaksanakan melalui program dan kegiatan :

1). Program Keluarga Berencana

Program Keluarga Berencana mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.248.623.900,- dengan realisasi sebesar Rp.240.039.400,- atau (96.55 %) yang dilaksanakan melalui kegiatan :

1. Penyediaan Pelayanan KB & Alat Kontrasepsi Bagi Keluarga Miskin
2. Operasional Pelayanan Keluarga Berencana Melalui TNI Manunggal
3. Pembinaan Keluarga Berencana
4. Kelangsungan Hidup Ibu, Bayi dan Nak (KHIBA)
5. Peringatan Harganas

2). Program Kesehatan dan Reproduksi Remaja

Program Kesehatan dan Reproduksi Remaja mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.78.290.000,- dengan realisasi sebesar Rp.62.969.000,- atau (80.43 %) yang dilaksanakan melalui kegiatan :

1. Advokasi dan KIE tentang kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)
2. Sosialisasi Kesehatan Reproduksi Remaja dan Kelompok Sebaya

3). Program Pelayanan Kontrasepsi

Program Pelayanan Kontrasepsi mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.25.075.000,- dengan realisasi sebesar Rp.25.075.000,- atau (100 %) yang dilaksanakan melalui kegiatan : Pengadaan Alat Kontrasepsi.

4). Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri

Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.319.486.403,- dengan realisasi sebesar Rp.317.593.250,- atau (99.41 %) yang dilaksanakan melalui kegiatan :

1. Pendataan Keluarga
2. Koordinasi Pengelolaan Program Keluarga Berencana
3. Pemberdayaan Ekonomi Keluarga
4. Pengelolaan Data dan Informasi Program KB
5. Pelatihan Pemanfaatan Pekarangan

5). Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi, dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat

Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi, dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.189.019.430,- dengan realisasi sebesar Rp.177.484.400,- atau (93.90 %) yang dilaksanakan melalui kegiatan :

1. Promosi Kesehatan Ibu, Bayi, dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat
2. Penilaian Kelompok Kegiatan (POKTAN)
3. Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga
4. Pelatihan Simulasi Bina Keluarga Balita (BKB)

6). Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan

Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.275.087.500,- dengan realisasi sebesar Rp.274.090.500,- atau (99.64 %) yang dilaksanakan melalui kegiatan :

1. Sosialisasi yang Terkait dengan Kesetaraan Gender Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2. Peringatan Hari Anak Nasional
3. Sosialisasi Pengelolaan Jajanan Sehat dan Makanan Tambahan Sehat untuk Anak
4. Lomba-Lomba Kegiatan Hari Anak Nasional

7). Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.119.690.000,- dengan realisasi sebesar Rp.112.603.500,- atau (94.08 %) yang dilaksanakan melalui kegiatan :
Pelaksanaan Pembinaan / Penilaian

8). Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan

Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.2.042.452.500,- dengan realisasi sebesar Rp.1.942.674.500,- atau (95.31 %) yang dilaksanakan melalui kegiatan :

1. Peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK
2. Peningkatan Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan
3. Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak
4. Workshop Peningkatan Peran Perempuan dalam Pengambilan Keputusan
5. Pelatihan Bagi Pelatih TOT SDM Pelayanan dan Pendampingan Korban KDRT
6. Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan
7. Penyuluhan Bagi Ibu Rumah Tangga Dalam Membangun Keluarga Sejahtera
8. Bimbingan Manajemen Usaha Bagi Perempuan Dalam Mengelola Usaha
9. Pameran Hasil Karya Perempuan di Bidang Pembangunan
10. Lomba-Lomba dalam Rangka Pembinaan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Organisasi

11. Peringatan Hari Ibu
12. Peningkatan Kapasitas Kader PKK Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan/Desa
13. Sosialisasi Konsep Gender bagi SKPD di Masyarakat
14. Pembinaan Organisasi Perempuan
15. Pelatihan Kader PKBN, KADARKUM, dan Pola Asuh Anak
16. Pembinaan dan Lomba Keluarga Harmonis
17. Pembinaan Keagamaan bagi Organisasi Wanita
18. Seminar Mengenai Pencegahan Kanker Serviks dan Kesehatan Reproduksi
19. Revitalisasi Gerakan Sayang Ibu (GSI)
20. Peringatan Hari Kartini
21. Pelatihan Manajemen Wirausaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)

9). Program Penguatan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan

Program Penguatan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.103.509.400,- dengan realisasi sebesar Rp.85.782.308,- atau (82.87 %) yang dilaksanakan melalui kegiatan :
Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan (P2TP2)

Berdasarkan hasil evaluasi maka secara umum dapat disimpulkan bahwa :

1. Penyediaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan pelayanan kurang memadai.
2. Belum semua program/kegiatan Organisasi Perangkat Daerah berhasil. Hal ini dibuktikan dengan :
 - a. Capaian yang dihasilkan kurang dari atau belum mencapai target yang telah ditetapkan.
 - b. Capaian pada tahun sekarang (sp - n) lebih sedikit/berkurang dibanding tahun sebelumnya (n-1).
3. Besarnya nilai anggaran tidak semata-mata mempengaruhi tingkat atau besarnya capaian yang dihasilkan, karena itu perlu evaluasi terhadap faktor-faktor yang berpengaruh terhadap tercapainya pelaksanaan program/kegiatan.
4. Saran tindakan, SKPD dalam menyusun rencana kerja untuk lebih fokus pada pencapaian target-target dalam RPJMD, mengingat periode RPJMD tersisa setahun lagi.

5. Layanan infrastruktur dasar masih kurang memadai.
6. Masih rendahnya produktifitas dan aksesibilitas terhadap sumber daya unggulan daerah, sebagai upaya penciptaan lapangan kerja produktif.
7. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam ikut serta peningkatan kualitas pendidikan.
8. Belum maksimalnya layanan kesehatan pada fasilitas kesehatan (Puskesmas dan Rumah Sakit).
9. Masih rendahnya kinerja aparatur pemerintah dalam pelayanan publik.
10. Masih terjadinya diskriminasi dalam pelayanan perizinan.
11. Rendahnya konsistensi dan komitmen didalam pembangunan yang berwawasan lingkungan.

BAB III

RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan ekonomi daerah disusun berdasarkan kajian internal dan eksternal serta berpedoman pada dokumen RPJPD. Untuk menjamin keberlanjutan arah pembangunan, arah kebijakan ekonomi Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2014 harus sejalan dengan kebijakan ekonomi nasional dan provinsi Tahun 2014. Berikut arah kebijakan ekonomi daerah Tahun 2014 yang mendasarkan pada perkembangan ekonomi daerah, nasional dan global serta tantangan yang masih akan dihadapi :

Berdasarkan tantangan dan permasalahan tersebut, maka sasaran ekonomi pada tahun 2014 sebagai berikut :

- a. Mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui koordinasi dan efektivitas kebijakan sektor riil. Pemilihan potensi komoditas unggulan sebagai basis pengembangan wilayah merupakan bagian terpenting dalam upaya meningkatkan daya saing daerah. Pemberdayaan ekonomi masyarakat khususnya dari UMKM akan terus dilakukan termasuk memberdayakan peranan koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan ini akan dilaksanakan dengan terus melakukan peningkatan sumberdaya manusia dalam hal manajerial maupun teknis untuk mendorong penguatan daya saing produk, fasilitasi kemudahan dalam akses permodalan bagi UMKM
- b. Mendorong peningkatan pemerataan distribusi pendapatan melalui percepatan pertumbuhan ekonomi di pedesaan dan penciptaan keseimbangan pembangunan di setiap wilayah. Pengembangan kawasan - kawasan khusus seperti pengembangan kawasan agropolitan, minapolitan dan pengembangan sentra-sentra produksi andalan pada sektor-sektor potensial, percepatan pembangunan pertanian melalui program revitalisasi pembangunan pertanian dan pembangunan perdesaan melalui peningkatan produksi pangan, peningkatan produktivitas pertanian dan pengembangan diversifikasi usaha di perdesaan, pemberdayaan ekonomi rakyat dan memperluas cakupan program pembangunan yang berbasis masyarakat, pengembangan produk unggulan (core business daerah) yang meliputi: agribisnis, industri manufaktur, dan pariwisata.

- c. Meningkatkan investasi daerah yang mampu memperluas kesempatan kerja dan berusaha yang pada gilirannya mampu meningkatkan pendapatan perkapita. Kebijakan yang ditempuh antara lain melalui perbaikan iklim investasi yang kondusif bagi dunia usaha, baik skala usaha kecil, menengah maupun besar. Beberapa langkah yang ditempuh dalam menciptakan iklim investasi dan daya tarik investasi melalui penyediaan informasi potensi daerah, penyederhanaan perijinan dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu atap, membangun prasarana penunjang, melindungi kepastian hukum dan penyediaan tenaga kerja di daerah, meningkatkan produktivitas dan akses UMKM pada sumberdaya produktif serta mendorong perkembangan sektor-sektor ekonomi yang memberikan dampak multiplier yang tinggi terhadap pendapatan masyarakat.
- d. Mendorong peningkatan kemampuan perekonomian daerah untuk penciptaan lapangan kerja melalui peningkatan keterampilan tenaga kerja, peningkatan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar, dan optimalisasi pemanfaatan dana program-program penanggulangan kemiskinan. Selain itu, untuk menjaga ketersediaan pangan dilakukan upaya peningkatan ketahanan pangan melalui pemberdayaan lumbung desa untuk mewujudkan desa mandiri pangan, dan diversifikasi pangan.
- e. Percepatan pembangunan sarana dan prasarana dilakukan untuk mendukung percepatan pembangunan ekonomi maupun peningkatan kualitas kehidupan masyarakat. Cakupan sarana dan prasarana dasar tersebut diarahkan untuk menyediakan sarana dan prasarana dasar di bidang kesehatan, pendidikan, sosial ekonomi masyarakat, pekerjaan umum, perhubungan dan irigasi. Selain itu, prasarana yang dibangun juga ditujukan untuk meningkatkan aksesibilitas guna memperlancar aliran investasi dan produksi untuk menciptakan keterkaitan ekonomi antar wilayah dengan tetap memperhatikan aspek berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Untuk menjamin keberlanjutan pertumbuhan ekonomi sebagaimana yang diharapkan maka perlu dilakukan perbaikan kualitas lingkungan melalui upaya pemantauan kualitas lingkungan dan rehabilitasi lahan serta penerapan sanksi bagi pelanggar masalah lingkungan.

3.1.1 Kondisi Ekonomi Kalimantan Timur Tahun 2012 dan Perkiraan Tahun 2013

Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur pada tahun 2012 tumbuh sebesar

3,98 persen, dan pada tahun 2013 diasumsikan tumbuh sebesar 3,72 persen. Untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi tersebut diperlukan peningkatan pertumbuhan yang sangat tinggi pada sektor-sektor ekonomi yang prospektif, seperti sektor pertanian yang selama ini tingkat pertumbuhannya maupun kontribusinya dalam PDRB Kalimantan Timur relatif sangat kecil. Dengan demikian diharapkan struktur ekonomi kedepan akan terjadi keseimbangan antara sektor ekonomi yang padat modal dan sektor ekonomi yang padat tenaga kerja yang pada akhirnya dapat meningkatkan pemerataan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Meskipun pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Timur mengalami perlambatan pertumbuhan pada tahun 2011 dibanding tahun 2010, pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur kembali menunjukkan pertumbuhan yang signifikan pada tahun 2012. Melihat trend yang ada selang waktu 2009-2011 maka dapat di prediksi pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur pada tahun 2013 akan mencapai pada angka 3,72 persen dengan asumsi kondisi perekonomian nasional maupun global tidak mengalami gejolak yang ekstrim.

Untuk nilai dan kontribusi Sektor PDRB tahun 2010 s/d 2011 Atas Dasar Harga Berlaku di Kalimantan Timur didominasi oleh sektor pertambangan dan penggalian, meningkat dari tahun ke tahun dengan kontribusi pada tahun 2011 sebesar 49,52 %, namun sektor industri pengolahan mengalami penurunan pada tahun 2010 menjadi 24,35 %. Untuk mendukung Kaltim sebagai Pusat Agroindustri selayaknya sektor industri pada PDRB mengalami pertumbuhan yang positif, tetapi pada kenyataannya kontribusinya masih kecil yaitu sebesar 5,91 % pada tahun 2010 walaupun meningkat daripada tahun 2009 sebesar 5,78 %. Hal ini antara lain disebabkan kurangnya masyarakat yang bekerja di sektor industri pertanian maupun industri pengolahan dan pemanfaatan teknologi yang masih minim, serta distribusi pemasaran yang masih sulit. Untuk itu maka program pembangunan diarahkan kepada program-program yang mendorong kinerja sektor industri, pertanian dan teknologi agar Kalimantan Timur tidak mengandalkan pada sektor pertambangan dan penggalian saja. Pembangunan pertanian ke depan, tidak dapat lagi dilakukan secara tradisional. Pembangunan pertanian harus diarahkan kepada upaya-upaya untuk peningkatan produktivitas, mutu, nilai tambah produk (*Value Added*) dan daya saing produk (*Competitiveness*). Tidak ada jalan lain untuk membangun *competitiveness*, pengembangan pertanian haruslah dilakukan industrialiasi pertanian dengan pendekatan kawasan/*cluster*, integrasi hulu-hilir dan *zero waste* serta berorientasi ekspor. Kita harus bergeser dari daerah

penyuplai/eksportir bahan mentah menjadi eksportir bahan jadi/olahan (*final/processed product*). Dengan dibangunnya *cluster industry oleochemical* nantinya, kita tidak lagi mengekspor CPO tetapi minyak goreng, margarine, dan produk olahan lainnya. Intinya, kita fokus kepada produk-produk unggulan daerah yang memiliki nilai tambah (*value added*) dan sekaligus mampu memberikan *multiplier effects* yang lebih signifikan bagi kesejahteraan rakyat dan berkelanjutan (*sustainable wealth*).

Selang tahun 2008 - 2009 dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi sebesar 3,62 % maka pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur sesuai dengan target RPJMD Propinsi Kalimantan Timur tahun 2009-2013, maka pada tahun 2013 ditargetkan sebesar 3,53 persen. Namun dari perkembangan PDRB saat ini maka diproyeksikan pada tahun 2014 sebesar 4,77 persen. Perkembangan ekonomi Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional tentu akan berpengaruh besar terhadap perkembangan ekonomi Kabupaten Penajam Paser Utara.

3.1.2 Kondisi Ekonomi Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2012

Perkembangan kondisi ekonomi daerah dapat dilihat dari indikator ekonomi makro serta perekonomian daerah. Perekonomian suatu daerah tidak dapat terlepas dengan perekonomian regional, perekonomian nasional bahkan perekonomian global. Ada faktor-faktor perekonomian yang tidak dapat dikendalikan oleh daerah seperti yang menyangkut kebijakan pemerintah pusat menyangkut sektor moneter maupun sektor riil. Kemudian juga pengaruh perekonomian global seperti pengaruh naik turunnya harga minyak dunia, dan nilai tukar mata uang asing, dan yang terakhir adalah pengaruh krisis keuangan global yang telah berdampak pada meningkatnya pemutusan hubungan kerja dan kelesuan pasar ekspor. Capaian indikator ekonomi daerah adalah sebagai berikut:

1. Pada tahun 2011 PDRB Kabupaten Penajam Paser Utara atas dasar harga berlaku dengan migas sebesar 3,845 trilyun rupiah, sedangkan pada tahun 2010 sebesar 2,923 trilyun rupiah. Dengan kata lain PDRB tahun 2011 atas dasar harga berlaku tumbuh sebesar 11,68 persen dibandingkan tahun 2010. Sedangkan jika dihitung tanpa migas, PDRB tahun 2011 sebesar 2,216 trilyun rupiah, sedangkan tahun 2010 sebesar 1,984 trilyun rupiah, atau tumbuh sebesar 17,56 persen, Artinya bahwa pada tahun 2011, PDRB Kabupaten Penajam Paser Utara mengalami pertumbuhan positif.
2. Jika dihitung dengan migas, laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Penajam Paser Utara pada tahun 2011 adalah sebesar 11,68 persen, dan pada tahun 2010

sebesar 7,28 persen. Laju pertumbuhan ekonomi tahun 2011 merupakan yang tertinggi selama lima tahun terakhir. Hal ini disebabkan oleh adanya pertumbuhan yang cukup tinggi pada sektor pengangkutan dan telekomunikasi. Sektor listrik, Gas dan Air Bersih merupakan sektor dominan yang kedua dalam pembentukan PDRB Kabupaten Penajam Paser Utara, sehingga sangat mempengaruhi laju pertumbuhan PDRB..

- Rincian mengenai perkembangan dan laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Penajam Paser Utara dengan migas pada tahun 2000 - 2011 bisa dilihat pada tabel 1 berikut :

Tabel 4.1 Perkembangan PDRB dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Dengan Migas dan Tanpa Migas Tahun 2000 – 2011

Tahun	Atas Dasar Harga Berlaku (juta rupiah)	Atas Dasar Harga Konstan 2000 (juta rupiah)	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	
			Dengan Migas	Tanpa Migas
2000	1.220.315	1.220.315	-	-
2001	1.403.815	1.363.803	11,76	4,64
2002	1.514.695	1.436.614	5,34	3,76
2003	1.693.984	1.507.187	4,91	6,26
2004	1.831.608	1.549.149	2,78	2,72
2005	1.931.628	1.613.636	4,16	6,16
2006	2.049.445	1.639.973	1,63	7,97
2007	2.205.357	1.702.082	3,79	8,34
2008	2.769.209	1.787.049	4,99	8,33
2009	2.577.863	1.849.722	3,51	4,70
2010 r ¹	2.923.168	1.984.290	7,28	10,03
2011*)	3.845.143	2.216.080	11,68	17,56

4. Keterangan : *) Angka Sementara ¹) Angka Revisi

Fenomena perbedaan laju pertumbuhan ekonomi antara PDRB dengan migas dan PDRB tanpa migas ini memperlihatkan perlunya menumbuhkan perekonomian masyarakat diluar sektor migas. Mengenai sektor-sektor unggulan lain di

Kabupaten Penajam Paser Utara bisa dilihat pada Bab Struktur Perekonomian Kabupaten Penajam Paser Utara.

3.1.2.1 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2013 dan Tahun 2014

Melihat perkembangan perekonomian Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2011-2012, dan proyeksi perekonomian tahun 2013, perekonomian Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2014 dan tahun-tahun berikutnya diperkirakan akan mengalami pertumbuhan yang positif.

Berdasarkan kondisi dan perkembangan perekonomian Kabupaten Penajam Paser Utara serta mempertimbangkan kondisi internal dan eksternal, maka tantangan dan prospek perekonomian daerah yang dihadapi pada Tahun 2013 dan 2014 adalah sebagai berikut :

a. Tantangan

Diperkirakan perekonomian Kabupaten Penajam Paser Utara masih akan dihadapkan pada sejumlah tantangan akibat pengaruh dari dinamika internal maupun lingkungan perekonomian global yang terjadi beberapa tahun terakhir. Beragam tantangan dimaksud perlu disikapi secara arif dan komprehensif serta dengan langkah-langkah yang lebih nyata. Tantangan dimaksud antara lain masih mencakup:

- 1) Percepatan pertumbuhan ekonomi akan terus diupayakan dengan mengembangkan pertumbuhan sektor-sektor ekonomi dominan. Pertumbuhan ekonomi dengan percepatan yang lebih tinggi, terjaganya stabilitas ekonomi makro, dan dengan pembenahan yang sungguh-sungguh pada sektor riil, diharapkan akan dapat mendorong peningkatan investasi dan menciptakan lapangan kerja yang lebih luas dengan fokus utama untuk menurunkan tingkat pengangguran dan kemiskinan. Dalam hal ini diperlukan strategi kebijakan yang tepat dengan menempatkan prioritas pengembangan pada sektor-sektor yang mempunyai efek pengganda tinggi dalam menciptakan kesempatan kerja.
- 2) Menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif. Ini adalah tantangan cukup besar bagi pemerintah dewasa ini mengingat investasi merupakan salah satu penggerak kegiatan ekonomi daerah. Komitmen perbaikan iklim investasi tersebut telah dilakukan pemerintah dengan mengadakan perbaikan di bidang

peraturan perundang-undangan, pelayanan, dan penyederhanaan prosedur termasuk penyederhanaan birokrasi.

- 3) Menyediakan infrastruktur yang cukup dan berkualitas. Hal ini merupakan prasyarat agar dapat mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi dan berkelanjutan. Ketersediaan infrastruktur yang tidak memadai akan menjadi kendala bagi masuknya investasi. Selain itu infrastruktur sangat dibutuhkan karena mendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Infrastruktur tersebut dapat menyokong banyak aspek ekonomi dan kegiatan sosial.
- 4) Meningkatkan partisipasi swasta melalui kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan swasta (*public-private partnership*). Tantangan ini menjadi cukup penting karena terbatasnya sumber daya pemerintah dalam pembiayaan pembangunan, terutama terkait dengan efisiensi pembiayaan investasi dan penyediaan infrastruktur yang bervariasi dan berkualitas.
- 5) Membangun landasan yang kuat untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pembangunan daerah tidak lagi dapat didasarkan pada pembangunan ekonomi semata, tetapi harus didasarkan pada pembangunan yang berkelanjutan dengan memenuhi kriteria ekonomis, bermanfaat secara sosial, didukung oleh kelembagaan yang representatif, dan menjaga kelestarian lingkungan hidup.

b. Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2013-2014

Adanya situasi keterbatasan keuangan negara dalam pembiayaan pembangunan daerah berimplikasi luas terhadap perekonomian daerah. Pemerintah daerah dituntut mampu meningkatkan pendapatan asli daerah dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Berkaitan dengan kondisi yang digambarkan diatas serta mendasarkan pada kondisi perekonomian tahun 2013 dan perkiraan tahun 2014 serta tantangan yang dihadapi pada masa mendatang maka usaha -usaha yang harus dilakukan dalam pemantapan ekonomi daerah adalah :

1. menciptakan kondisi ketenteraman dan ketertiban yang kondusif sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh daerah.
2. Meningkatkan pelayanan perijinan usaha.
3. Menyediakan infrastruktur perekonomian yang cukup dan berkualitas untuk menunjang pertumbuhan dan distribusi ekonomi daerah.

4. Pemberdayaan ekonomi UMKM dan masyarakat miskin dengan meningkatkan koordinasi berbagai institusi melalui jaringan sistem keuangan mikro.
5. Meningkatkan modal sosial.

3.3 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Efektivitas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang tertuang dalam RKPD Tahun 2014 sebagai pelaksanaan agenda RPJMD dan RPJPD, tidak terlepas dari kapasitas anggaran yang dapat terkelola oleh pemerintah daerah. Untuk itu, kebutuhan belanja pembangunan daerah akan selalu mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah sebagai salah satu penopang strategis dalam implementasi RKPD, yang akan selalu berdampingan dengan sumber-sumber pendanaan non APBD, seperti APBN, Hibah, dana kemitraan swasta, swadaya masyarakat serta kontribusi pelaku usaha melalui *Corporate Social Responsibility (CSR)*.

Kapasitas fiskal daerah pada dasarnya akan tercermin dalam volume APBD tahun 2013. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta lebih teknis mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang direvisi menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, dan revisi kedua menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran, yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah (penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah).

Untuk pendapatan daerah akan bersumber dari: 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari kelompok Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan lain-Lain Pendapatan Asli Daerah; 2) Dana Perimbangan yang terdiri dari Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus; 3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah meliputi Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil

Pajak/Bukan Pajak dari Pemerintah Provinsi, Dana Penyesuaian dan Dana Alternatif Khusus, dan Dana Bantuan Keuangan.

Selanjutnya untuk pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), Penerimaan Pinjaman Daerah, Dana Cadangan Daerah (DCD), dan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan. Selain dana dari penerimaan daerah tersebut, daerah menerima dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat berupa dana dekonsentrasi, dana tugas pembantuan dan urusan bersama, yang dialokasikan untuk menunjang program dan kegiatan pembangunan yang dilakukan berdasarkan prioritas dan bersifat penugasan kepada perangkat daerah.

Secara umum kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk mampu membiayai seluruh kebutuhan biaya penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah. Kondisi keuangan daerah yang ada saat ini, dimana masih tingginya tingkat ketergantungan kepada dana perimbangan keuangan daerah (dana transfer) disamping dana pembangunan dari APBN.

3.3.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, pendanaan penyelenggaraan pemerintahan telah diatur sesuai kewenangan yang diserahkan. Hal tersebut dimaksudkan untuk mencegah tumpang tindih ataupun tidak tersedianya pendanaan pada suatu bidang pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibiayai dari APBD, sedangkan penyelenggaraan kewenangan yang menjadi tanggungjawab Pemerintah dibiayai dari APBN, baik kewenangan Pusat yang didekonsentrasikan kepada Gubernur atau dalam rangka tugas pembantuan dan urusan bersama.

Berdasarkan pada hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber pendanaan daerah, selanjutnya dirumuskan kebijakan di bidang keuangan daerah yang terdiri dari kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan. Kebijakan-kebijakan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2014:

3.2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

3.2.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Perencanaan pendapatan daerah pada Tahun 2014 dihitung dengan asumsi sebagai berikut :

- 1) Pendapatan asli daerah dihitung dengan memperhatikan realisasi perkembangan pendapatan, serta prakiraan masing-masing potensi jenis pendapatan asli daerah;

- 2) Dana perimbangan berupa bagi hasil pajak/bukan pajak dihitung dengan memperhatikan potensi masing-masing jenis pajak. Sedangkan DAU dan DAK diasumsikan sama dengan alokasi tahun 2013;
- 3) Lain-lain pendapatan yang sah sementara diperhitungkan pada sumber-sumber pendapatan yang dapat dipastikan. Untuk mewujudkan peningkatan Pendapatan Daerah di Kabupaten Penajam Paser Utara dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Berdasarkan Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, dan Pasal 28 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan pasal 26 Permendagri Nomor 59 tahun 2007 tentang perubahan Permendagri Nomor 13 tahun 2006, pengelompokan pendapatan daerah meliputi:

a. Pendapatan asli daerah (PAD), terdiri dari:

- 1). Pajak daerah;
- 2). Retribusi daerah;
- 3). Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
- 4). Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

b. Dana perimbangan, terdiri dari:

- 1). Dana bagi hasil;
- 2). Dana alokasi umum (DAU);
- 3). Dana alokasi khusus (DAK);

c. Lain-lain pendapatan daerah, terdiri dari:

- 1). Hibah berasal dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya, badan/lembaga/organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat/perorangan, dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat;
- 2). Dana darurat dari pemerintah dalam rangka penanggulangan korban/kerusakan akibat bencana alam;
- 3). Dana bagi hasil pajak dari provinsi kepada kabupaten/kota;
- 4). Dana penyesuaian dan dana otonomi khusus yang ditetapkan oleh pemerintah;
- 5). Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya.

Untuk mewujudkan peningkatan pendapatan daerah di Kabupaten Penajam Paser Utara agar dapat memenuhi dan atau melampaui target yang telah ditetapkan, maka kebijakan pengelolaan pendapatan daerah antara lain berupa:

- a. Meningkatkan manajemen tata kelola pemungutan dan penerimaan pendapatan daerah sesuai dengan mekanisme dan standar baku.
- b. Meningkatkan pendapatan daerah melalui perluasan obyek dan intensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah secara optimal.
- c. Optimalisasi hasil usaha Badan Umum Milik Daerah (BUMD) agar memberikan kontribusi yang optimal kepada pendapatan asli daerah (PAD) pada khususnya dan kepada penerimaan daerah pada umumnya.
- d. Merumuskan berbagai peraturan daerah terutama yang berkaitan dengan peningkatan pendapatan asli daerah.

Adapun realisasi dan proyeksi pendapatan daerah Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2010-2014 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.2
Proyeksi Target Pendapatan Tahun 2013 dan Tahun 2014

No.	Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah	Target	
		2013	2014
1	2	3	4
4	PENDAPATAN	1.313.773.963.098,00	1.402.707.579.133,00
4.1	Pendapatan Asli Daerah	41,617,293,250.00	69,392,657,383.00
4.1.1	Pajak Daerah	2,698,353,650.00	2,548,630,550.00
4.1.2	Retribusi Daerah	3,868,939,600.00	2,791,939,600.00
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	15,050,000,000.00	15,050,000,000.00
4.1.4	Lain - lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	20,000,000,000.00	49,002,087,233.00
4.2	Dana Perimbangan	1,019,170,569,000.00	1,123,079,189,198.00
4.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	846,000,000,000.00	923,911,664,198.00
4.2.2	Dana Alokasi Umum (DAU)	169,033,829,000.00	194,579,185,000.00
4.2.3	Dana Alokasi Khusus (DAK)	4,136,740,000.00	4,588,340,000.00
4.3	Lain - lain Pendapatan Daerah yang Sah	252,986,100,848.00	210,235,732,552.00
4.3.1	Pendapatan Hibah		4,103,697,200.00
4.3.2	Dana Darurat		
4.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi	73,114,126,948.00	85,458,488,000.00
4.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	7,871,973,900.00	23,565,247,352.00
4.3.5	Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	172,000,000,000.00	97,108,300,000.00

3.3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Rencana Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 disusun dengan memperhatikan dan mempertimbangkan potensi dan peluang yang dihadapi. Belanja daerah diarahkan kepada komponen-komponen penyediaan anggaran dan pembiayaan yang merupakan kewajiban-kewajiban daerah, dengan harapan dapat mencapai hasil yang optimal pada setiap bidang kewenangan pemerintahan daerah dalam satu tahun anggaran. Komponen belanja daerah dan kinerja pelayanan selain berdasarkan aspirasi masyarakat, juga dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan daerah.

Arah kebijakan belanja daerah Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2014, akan meliputi :

1. Meningkatkan wajib belajar 12 tahun dan 20 % anggaran pendidikan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku yang diprioritaskan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan Kesehatan masyarakat sesuai amanat UU Kesehatan Nomor 36 tahun 2010 yaitu 10 % anggaran Kesehatan yang terdiri dari 1/3 untuk upaya kuratif, dan 2/3 untuk upaya preventif;
3. Peningkatan ketahanan pangan masyarakat yang berbasis pada pengembangan kegiatan agrobisnis yang berdaya saing dan pemantapan pasar yang jelas dan prospektif.
4. Menumbuh kembangkan dan meningkatkan peran UKM dan Koperasi dalam perekonomian masyarakat.
5. Memperbesar kemampuan perekonomian masyarakat melalui penciptaan lingkungan usaha yang sehat dengan mendorong pertumbuhan ekonomi regional yang diimbangi dengan keberpihakan pada masyarakat miskin;
6. Meningkatkan kemampuan dan standard kinerja organisasi pemerintah yang transparan dan akuntabel dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
7. Memantapkan infrastruktur transportasi dan sarana prasarana pelayanan dasar;
8. Mendorong terselenggaranya pembangunan desa yang terpadu dan holistik yang mengintegrasikan aspek-aspek ekonomi, ekologi, sosial dan budaya masyarakat perdesaan;
9. Mendorong pengembangan pariwisata yang mengakomodir konsep-konsep pariwisata berkelanjutan berdasarkan potensi budaya lokal dan teknologi informasi.

Tabel 4.3. Rencana Belanja Daerah Tahun 2012, 2013 dan Proyeksi Tahun 2014

No	URAIAN	TAHUN 2012	TAHUN 2013	TAHUN 2014
1	2	3	4	5
2.	BELANJA	1,510,447,045,435.00	1,661,539,000,000	
2.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	334,211,112,410.00	434.554.580.454	
2.1.1.	Belanja Pegawai	244,481,822,152.00	326.331.290.196	
2.1.4	Belanja Hibah	22,958,000,000.00	54.858.800.000	
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	14,268,300,000.00	861,500,000	
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi / Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa	51,187,917,642.00	51,187,917,642	
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	1,315,072,616.00	1,315,072,616	
2.2.	BELANJA LANGSUNG	1,176,235,933,025.00	1,226,984,419,546	
2.2.1.	Belanja Pegawai	78,252,617,280.00	103,378,242,280	
2.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	238,748,251,552.00	307,007,333,642	
2.2.3	Belanja Modal	859,235,064,193.00	816,599,843,642	

Adapun Pagu Indikatif keseluruhan SKPD berdasarkan Urusan Wajib dan Urusan Pilihan Tahun 2014 sebesar Rp dengan rincian sebagai berikut :

Tabel III.5 : Rencana Pagu Indikatif Belanja SKPD Tahun Anggaran 2014

NO	SKPD	PAGU MURNI 2013	%	PROYEKSI TA.2014	%
1	2	5	6	7	8
1	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	432,040,765,080	26.00%		
2	DINAS KESEHATAN	94,583,838,489	5.69%		
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	62,708,592,481	3.77%		
4	DINAS PEKERJAAN UMUM	538,890,147,559	32.43%		
5	BAPPEDA	27,308,938,400	1.64%		
6	DINAS PERHUBUNGAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	39,002,511,593	2.35%		
7	KANTOR LINGKUNGAN HIDUP	4,040,228,124	0.24%		
8	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	5,596,135,656	0.34%		
9	KANTOR KB DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	7,209,276,250	0.43%		

Bab III Rancangan Kerangka Ekonomi
Dan Kebijakan Keuangan Daerah

10	DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA	5,170,990,240	0.31%		
11	BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL	9,143,157,550	0.55%		
12	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	12,997,989,245	0.78%		
13	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	11,781,264,251	0.71%		
14	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	7,819,440,808	0.47%		
15	KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	465,524,532	0.03%		
16	SEKRETARIAT DAERAH	206,395,826,101	12.42%		
17	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	40,945,709,852	2.46%		
18	INSPEKTORAT	7,747,838,056	0.47%		
19	DINAS PENDAPATAN DAERAH	14,197,918,834	0.85%		
20	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	16,630,066,988	1.00%		
21	KECAMATAN PENAJAM	3,796,332,397	0.23%		
22	KECAMATAN WARU	2,688,068,481	0.16%		
23	KECAMATAN BABULU	3,294,327,026	0.20%		
24	KECAMATAN SEPAKU	2,607,021,596	0.16%		
25	KELURAHAN PENAJAM	1,925,741,066	0.12%		
26	KELURAHAN GUNUNG SETELENG	1,497,623,741	0.09%		
27	KELURAHAN NENANG	1,335,405,137	0.08%		
28	KELURAHAN NIPAH-NIPAH	1,379,050,044	0.08%		
29	KELURAHAN SUNGAI PARIT	1,142,595,616	0.07%		
30	KELURAHAN LAWE-Lawe	1,476,181,769	0.09%		
31	KELURAHAN PETUNG	1,148,695,087	0.07%		
32	KELURAHAN SALOLOANG	803,527,824	0.05%		
33	KELURAHAN TANJUNG TENGAH	986,344,238	0.06%		
34	KELURAHAN PEJALA	1,228,104,866	0.07%		
35	KELURAHAN KAMPUNG BARU	1,030,744,708	0.06%		
36	KELURAHAN SESUMPU	1,129,903,890	0.07%		
37	KELURAHAN SOTEK	1,110,060,421	0.07%		
38	KELURAHAN BULUMINUNG	965,747,012	0.06%		
39	KELURAHAN SEPAN	854,113,556	0.05%		
40	KELURAHAN RIKO	831,321,597	0.05%		
41	KELURAHAN GERSIK	1,510,012,377	0.09%		
42	KELURAHAN PANTAI LANGO	936,020,975	0.06%		
43	KELURAHAN JENEBOA	1,759,412,185	0.11%		

44	KELURAHAN SEPAKU	879,750,677	0.05%		
45	KELURAHAN MENTAWIR	882,118,683	0.05%		
46	KELURAHAN PEMALUAN	808,002,923	0.05%		
47	KELURAHAN MARIDAN	1,135,510,816	0.07%		
48	KELURAHAN WARU	1,122,519,882	0.07%		
49	KANTOR KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN	7,610,029,168	0.46%		
50	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA	7,102,646,743	0.43%		
51	KANTOR PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN		0.00%		
52	DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN	41,750,152,988	2.51%		
53	DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN	7,866,295,725	0.47%		
54	DINAS PERTAMBANGAN	5,672,361,741	0.34%		
55	DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	6,597,094,956	0.40%		
	JUMLAH BELANJA	1,661,539,000,000	100%		

3.3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan daerah sebagai satu kesatuan dalam struktur APBD, terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan mencakup sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan penerimaan piutang daerah. Pengeluaran pembiayaan mencakup pemberian dana cadangan, penyertaan modal (investasi) daerah, pembayaran pokok utang, dan pemberian pinjaman daerah.

Kondisi penganggaran daerah apabila anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih besar dari anggaran belanja daerah, atau surplus APBD, maka pembiayaan daerah diarahkan untuk pembayaran pokok utang, penyertaan modal (investasi) daerah, pemberian pinjaman kepada pemerintah pusat/pemerintah daerah lain dan/atau pendanaan belanja jaminan sosial. Sedangkan apabila terjadi pendapatan daerah lebih rendah dibanding dengan belanja daerah atau terjadi defisit APBD, sedapat mungkin dapat dicukupi dengan sisa lebih perhitungan anggaran

(SILPA) tahun Lalu. Alternatif lain adalah dengan melakukan pinjaman daerah, menjual aset daerah atau dengan alternatif kebijakan lain. Dalam menutup defisit anggaran harus jelas, transparan dan penuh kehati-hatian, karena konsekuensinya sangat berhubungan erat dengan beban pembangunan di masa-masa mendatang.

Kebijakan pembiayaan daerah pada tahun 2014 di Kabupaten Penajam Paser Utara antara lain diarahkan untuk:

- a. Menjaga agar keuangan daerah tetap dalam kondisi seimbang.
- b. Membentuk dana cadangan yang akan digunakan untuk kepentingan-kepentingan yang sifatnya strategis.

**Tabel4.4 Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah
Tahun 2012 s.d 2014**

NO	URAIAN	TAHUN 2012	TAHUN 2013	TAHUN 2014
3.	PEMBIAYAAN DAERAH	210,832,093,215.00	258,831,420,867.00	
3.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	243,440,949,164.91	304.309.591.393.00	
3.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	168,112,473,499.00	304.309.591.393.00	
3.1.2.	Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah	75,328,475,665.91	0	
3.2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	32,608,855,949.91	45.478.170.526.00	
3.2.2.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	1,000,000,000.00	12,000,000,000.00	
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	31,608,855,949.91	33,478,170,526.00	
	PEMBIAYAAN NETTO	210,832,093,215.00	258,831,420,867.00	

B A B I V
P R I O R I T A S D A N S A S A R A N
P E M B A N G U N A N D A E R A H T A H U N 2 0 1 4

4.1. TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN

RPJMD Kabupaten Penajam Paser Utara periode 2008-2013 berakhir pada tahun 2013, maka sesuai dengan Permendagri No 54 Tahun 2010 yang mengamanatkan bahwa pada masa transisi penyusunan RKPD dan RAPBD mengacu pada RPJMD sebelumnya dengan tujuan menyelesaikan masalah-masalah pembangunan yang belum seluruhnya tertangani sampai dengan akhir periode RPJMD. Berdasarkan hasil evaluasi dan capaian kinerja pembangunan tahun sebelumnya maka sasaran pembangunan dapat dijabarkan dalam tabel berikut :

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran
Terwujudnya Kabupaten Penajam Paser Utara Sebagai Pusat Agribisnis (Pertanian, Perkebunan, Perikanan) dan Agroindustri yang	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui penyelenggaraan pendidikan yang berbasis kompetensi.	Mewujudkan Penajam Paser Utara yang mandiri	1. Dituntaskannya wajib belajar 12 tahun 2. Meningkatkan kompetensi tenaga pendidik 3. Meningkatnya pendidikan kejuruan searah dengan potensi dan karakteristik daerah
	Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang memadai.	Mewujudkan Penajam Paser Utara yang mandiri	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan
	Mewujudkan revitalisasi pertanian yang berkelanjutan untuk	Membangun ekonomi rakyat yang produktif	Peningkatan ketahanan Pangan melalui optimalisasi produksi pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan

Berbasis Pada Ekonomi Kerakyatan")	menciptakan ketahanan pangan yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.		perikanan
	Mewujudkan kemandirian desa yang produktif melalui pemberdayaan masyarakat.	Membangun ekonomi rakyat yang produktif	Peningkatan Kemandirian Desa
	Meningkatkan sarana dan prasarana publik yang mendukung produktivitas perekonomian dalam rangka pemerataan pembangunan.	Membangun ekonomi rakyat yang produktif	Pembangunan Infrastruktur daerah.
	Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, professional dan bertanggungjawab, efisien dan efektif yang dapat memberikan kualitas pelayanan publik yang prima.	Mewujudkan aparatur yang professional.	Diterapkannya prinsip-prinsip good governance pada semua tingkatan pemerintahan
	Menciptakan rasa aman dan iklim berusaha yang kondusif untuk menumbuh kembangkan kepercayaan dalam berinvestasi.	.car	Iklim usaha yang kondusif
	Peningkatan pranata kelembagaan ekonomi rakyat	Membangun ekonomi rakyat yang produktif	1. Menumbuh kembangkan usaha yang komprehensif dan terpadu sehingga UMKM dapat menjadi pilar utama dalam mendorong perekonomian Daerah
			2. Meningkatkan kualitas kelembagaan dan organisasi yang mendukung penguatan ekonomi kerakyatan
	Mengembangkan potensi wilayah dan penataan ruang yang berwawasan	Membangun ekonomi rakyat yang berwawasan	1. Pelestarian Lingkungan Hidup dan Pencegahan Bencana
2. Penataan Ruang Terkoordinasi			

	lingkungan. Meningkatkan kualitas kehidupan Sosial, Budaya yang Agamis	lingkungan. Mewujudkan Penajam Paser Utara yang aman, damai, dan religius	1. Peningkatan kualitas pelayanan sosial keagamaan 2. Meningkatnya kehidupan sosial budaya yang berkualitas
--	---	--	--

4.2. Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Tahun 2014

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kaltim Tahun Anggaran 2014 menetapkan bahwa Tema Pembangunan Nasional adalah **“PENGUATAN DAYA SAING EKONOMI DAERAH BERBASIS SUMBERDAYA ALAM TERBARUKAN DIDUKUNG PENINGKATAN MANAJEMEN SUMBERDAYA APARATUR”**.

Pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014 ditetapkan 12 (dua belas) program prioritas yaitu :

1. Kemandirian dan Kedaulatan Pangan
2. Pengentasan Kemiskinan
3. Perluasan Kesempatan Kerja
4. Pemberdayaan Ekonomi Rakyat dan Pengembangan Sektor Riil
5. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan
6. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim
7. Daya saing ekonomi daerah
8. Pelayanan Pendidikan

9. Optimalisasi akses dan mutu pelayanan kesehatan
10. Pembangunan Infrastruktur
11. Pemenuhan Daya Listrik
12. Pembangunan kawasan perbatasan, pedalaman dan daerah tertinggal

Prioritas dan sasaran pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2014 merupakan penjabaran dari hasil analisis terhadap :

1. Evaluasi capaian target Pembangunan RPJMD 2008-2013 yang belum tercapai
2. Identifikasi isu strategis dan permasalahan pembangunan tahun 2014
3. Identifikasi isu strategis dan kebijakan Provinsi (RKPD tahun 2014)
4. Rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.

Pada RKPD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2014. Prioritas Pembangunan tahun 2014 berdasarkan isu strategis yang akan dihadapi adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Kualitas Kesejahteraan Masyarakat
2. Pembangunan Ekonomi guna peningkatan daya saing
3. Pembangunan Infrastruktur
4. Efektivitas dan Efisiensi Pembangunan (Kinerja Aparatur)

dan dijabarkan dalam prioritas RKPD tahun 2014 seperti pada tabel dibawah ini :

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN RPJMD	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)
1.	Penguatan kapasitas aparat pemerintah dan penegakan tata kelola yang baik, professional dan inovatif	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan
2.	Peningkatan pranata kelembagaan ekonomi rakyat	Pemberdayaan Ekonomi Rakyat dan pengembangan Sektor Riil
3.	Meningkatkan sarana dan prasarana publik yang mendukung produktifitas perekonomian	1.Daya Saing Ekonomi Daerah 2.Pembangunan Infrastruktur 3.Pemenuhan Kebutuhan Listrik dan Energi
4.	Pengembangan potensi wilayah dan tata ruang yang berwawasan lingkungan	Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim
5.	Mewujudkan revitalisasi dan menciptakan ketahanan pangan daerah	Kemandirian dan Kedaulatan Pangan
6.	Peningkatan kualitas kehidupan beragama dan sosial budaya	Pengentasan Kemiskinan
7.	Peningkatan pelayanan kesehatan dan sarana kesehatan guna mewujudkan masyarakat yang sehat	Optimalisasi Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan
8.	Menciptakan rasa aman dan iklim berusaha yang kondusif untuk menumbuhkembangkan kepercayaan dalam berinvestasi	Perluasan Kesempatan Kerja
9.	Peningkatan kualitas pendidikan yang mengarah pada pendidikan kejuruan yang professional	Pelayanan Pendidikan

Mengacu pada 11 prioritas pembangunan yang telah ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi serta berbagai masalah dan tantangan yang akan dihadapi maka tema RKPD 2014 adalah : ***“Penguatan agribisnis berbasis ekonomi kerakyatan yang didukung peningkatan manajemen sumber daya manusia”***.

Selanjutnya masing-masing prioritas pembangunan daerah dijelaskan dalam program, sebagaimana pada tabel berikut :

NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAN ISU STRATEGIS	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA		SKPD	
			TOLOK UKUR	TARGET		
1.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan					
	Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan	1 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	- Zona integritas wilayah bebas korupsi	4 Kecamatan	Inspektorat	
				53 SKPD		
				- Sosialisasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah		2 Kali (..... Orang)
				- Penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi		2 Kali
				- Pengawasan internal		52 LHP (20 orang auditor)
			- Jumlah kasus yang ditindak lanjuti			
		2 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	- Jumlah pegawai yang di bina karir dan pangkatnya	3831		
			- Sistem informasi kepegawaian yang di kembangkan.	1		
			- jumlah PNS yang mengikuti diklat fungsional			
			- Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat Prajabatan	25 orang		
	- Jumlah Peserta yang mengikuti Diklat Struktural bagi PNS Daerah					
		- Diklat PIM II	10 orang			

**Bab IV Prioritas Dan Sasaran
Pembangunan Daerah Tahun 2014**

- Diklat PIM III	20 orang
- Diklat PIM IV	80 orang
- Jumlah Peserta yang mengikuti Diklat Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNS Daerah	1800 orang
- Diklat Tata Naskah	35 orang
- Diklat Kearsipan	45 orang
- Diklat Keprotokolan	40 orang
- Diklat Pengelolaan Aset	40 orang
- Diklat Penyusunan Lakip	45 orang
- Diklat Penyusunan Renja	45 orang
- Diklat Perbendaharaan	45 orang
- Diklat Barang dan JAsa	45 orang
- Diklat Renstra	40 orang
- Diklat Keuangan	40 orang
- Diklat Kepegawaian	45 orang
- Diklat Aplikasi Pertanggungjawaban keuangan daerah	45 orang
- Diklat peningkatan SDM Sekdes	67 orang
- Diklat Pra Pensiun	40 orang
- Diklat Analisa Kebutuhan Diklat/TOT	25 orang
- Diklat Penyusunan Laporan Diklat	25 orang
- Pemantapan GPS	74 orang

**Bab IV Prioritas Dan Sasaran
Pembangunan Daerah Tahun 2014**

		- Peningkatan SDM Diklat	35 orang	
		- Etika PNS	35 orang	
		- Pelayanan dasar bagi desa & kelurahan	76 orang	
		- Peningkatan sumberdaya PNS	40 orang	
		- Diklat bagi hasil Migas	60 orang	
		- Diklat penyusunan formasi PNS	30 orang	
		- Diklat Analisa Kepegawaian	45 orang	
		- Manajemen Diklat	45 orang	
		- Diklat Kewirausahaan PNS pra purna tugas	40 orang	
		- Diklat Teknis PP 46	200 orang	
3	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	- Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman dan keindahan)		Kesbanglinmas
		- Jumlah peserta pelatihan pengendalian keamanan lingkungan bidang linmas		
		- Jumlah pengendalian keamanan lingkungan bidang Linmas		
4	Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	- Laporan yang selesai tepat waktu		Sekretariat Daerah
5	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	- Jumlah lembaga yang peduli terhadap perempuan dan anak		KB dan Pemberdayaan Perempuan
		- Jumlah lembaga berbasis gender yang dibina		
6	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	- Prosentase kasus kekerasan terhadap perempuan anak yang dilaporkan dan ditangani		

**Bab IV Prioritas Dan Sasaran
Pembangunan Daerah Tahun 2014**

	7	Program Keluarga Berencana	- Prosentase peserta KB aktif		
			- Jumlah peserta Keluarga Berencana yang dibina		
			- Jumlah peserta KB yang mendapatkan pelayanan		
	8	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	- jumlah keluarga miskin yang melakukan usaha ekonomi produktif		Sosnaker
			- Jumlah Peserta Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong		
			- Jumlah Keluarga Miskin yang mendapat Pelatihan Ketrampilan		
			- Jumlah Lembaga dan Organisasi Masyarakat yang diberdayakan		
			- Jumlah Peserta Seleksi program Teknologi Tepat Guna (TTG)		
	9	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	- Prosentase rancangan produk hukum yang dapat diselesaikan		Sekretariat Daerah
			- Jumlah Fasilitasi Sosialisasi Produk Hukum Yang Berlaku		
			- Jumlah rancangan peraturan perundang-undangan daerah yang disusun		
			- Jumlah peraturan perundang-undangan yang dipublikasikan		
10	Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	- Prosentase SKPD yang telah melaksanakan hasil analisa jabatan dan beban kerja		Sekretariat Daerah	
		- Jumlah SKPD yang dianjab dan distandart kompetensinya			
		- Jumlah Pelaksanaan Analisa kelembagaan			
		- Jumlah Sistem dan Prosedur Administrasi Pemerintahan Yang Disusun			
		- Pengukuran IKM Dinas/Lemtek/BUMD, Kecamatan dan Puskesmas			
		- Jumlah Penerapan Sistem Manajemen Mutu (SMM) dan Sertifikasi			

**Bab IV Prioritas Dan Sasaran
Pembangunan Daerah Tahun 2014**

		ISO 9001-2008 yang dilaksanakan		
		- Kebijakan Reformasi Birokrasi yang disusun		
11	Program Penataan Daerah Otonom Baru	- Jumlah kecamatan dan Kelurahan yang dibina administrasi umum dan pemerintahannya		
		- Jumlah Patok Batas Wilayah kec dan kelurahan/ desa yang dipasang		
		- Jumlah Dokumen Pengendalian Pelaksanaan Otonomi Daerah yang disusun		
12	Program Pemutakhiran Data Base Jasa Konstruksi	- Tersedianya Data Base Pengadaan Konstruksi yang tertib dan lengkap	3 Dokumen	DPU
		- Meningkatnya Kualitas SDM Bidang Jasa Konstruksi dan terwujudnya pengadaan konstruksi yang berkualitas	10 orang	
13	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Jumlah Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian yang dikembangkan	1 sistem	BKD
		Jumlah Kasus-Kasus pelanggaran disiplin pegawai yang ditangani	10 kasus	
		Jumlah PNS yang diberikan Ijin Belajar dan Tugas Belajar	100 orang	
		Jumlah Mahasiswa yang mengikuti pendidikan IPDN	5 Orang	
		Jumlah Pelantikan Pejabat yang dilaksanakan	2 kali	
		Jumlah PNS yang dibina karir dan Pangkatnya	3831 orang	
		Jumlah Administrasi Umum Kepegawaian yang diurus		
		- Karis/Karsu	150 Kartu	
		- Taspen	125 Kartu	
		- Karpeg	100 Kartu	

**Bab IV Prioritas Dan Sasaran
Pembangunan Daerah Tahun 2014**

			- Kenaikan Pangkat	900 Orang		
			- Penyesuaian Masa Kerja	10 Orang		
			- Pensiun	40 Orang		
			- Konversi NIP	30 Orang		
			- KPE	50 Orang		
			- Mutasi/SPP	53 SKPD		
			Dokumen Analisa kebutuhan diklat	1 dokumen		
			Dokumen Kajian system dan kualitas materi diklat	1 dokumen		
			Jumlah Pegawai yang melakukan konseling	50 orang		
			Jumlah Pegawai yang diassessment	50 orang		
			Jumlah Pegawai yang diambil sumpah janjinya	150 orang		
2.	Pemberdayaan Ekonomi Rakyat dan pengembangan Sektor Riil					
	Angka kemiskinan yang relatif statis, menunjukkan bahwa program – program dan penanganan kemiskinan yang masih bersifat parsial sehingga hal ini menuntut adanya komitmen bersama antar semua SKPD untuk meningkatkan upaya dalam pengentasan kemiskinan	1	Program penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif	Jumlah bidang usaha Sektor riil yang berkembang	11 bidang usaha	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
		2	Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM			
	Program-program penanggulangan kemiskinan	1	Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM	- Jumlah UMKMK	10% dari kondisi tahun 2013	Dinas Koperasi, Perindustrian dan
				- Jumlah UKM non BPR/LKM UKM	10	

**Bab IV Prioritas Dan Sasaran
Pembangunan Daerah Tahun 2014**

yang dilaksanakan saat ini belum optimal dalam memberikan kesempatan kerja yang permanen bagi masyarakat miskin		- Usaha Mikro dan Kecil	50 UMKM	Perdagangan	
		- Jumlah UMKMK yang memanfaatkan kredit	350 UMKM		
		- Jumlah BPR / LKM	25 BPR/LKM		
		- Jumlah UMKM yang sudah memanfaatkan teknologi dan terpenuhi sarana prasarana	UMKM		
	2	Program peningkatan kapasitas IPTEK sistem produksi	Persentase pertumbuhan IKM yang produktif		6% dari 648
	3	Program pengembangan industri kecil dan menengah			
	4	Program peningkatan kemampuan teknologi industri			
	5	Program penataan struktur industri			
6	Program pengembangan sentra-sentra industri potensial				
7	Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan				
8	Program peningkatan dan pengembangan ekspor				
Penyaluran kredit untuk rakyat (KUR), belum dapat menyerap tenaga kerja seperti yang diharapkan	1	Program pengembangan sistem pendukung bagi UMKM	- Jumlah pelaku usaha ekonomi kerakyatan menerima akses permodalan	150 Pelaku Usaha	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
			- Cakupan bina kelompok pengrajin	5 Kelompok Pengrajin	
			- Cakupan bina industri rumah tangga	574 Industri Rumah Tangga	
	2	Program peningkatan kualitas kelembagaan	- Pertambahan jumlah koperasi baru	15 Koperasi	Dinas Koperasi,

**Bab IV Prioritas Dan Sasaran
Pembangunan Daerah Tahun 2014**

		koperasi	- Prosentase Koperasi Aktif	15% dari Jumlah Koperasi yang tidak aktif saat ini	Perindustrian dan Perdagangan
Kebanyakan tenaga kerja adalah tenaga kerja di sektor informal yang hanya bisa memberikan kekuatan bagi masyarakat miskin untuk bertahan hidup tetapi belum dapat meningkatkan kesejahteraan mereka	1	Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan	- Jumlah sektor informal / PKL yang tertata	1500 PKL	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
			- Jumlah Paguyuban PKL	12 paguyuban	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
			- Jumlah kelembagaan PKL yang tertib administrasi	10 paguyuban	
	2	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	- Jumlah promosi UMKMK	4 kali	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
			- Jumlah kontak dagang dan temu usaha.	4 kali	
	3	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	- Jumlah industri rumah tangga	20 UKM	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
			- Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	6,29%	
3.	Daya Saing Ekonomi Daerah				
Belum sempurnanya Perda yang mendukung iklim usaha	1	Program Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	- Jumlah dan macam pajak	11	Dispenda
			- Jumlah dan macam restribusi Daerah	30	
			- Jumlah perda yang mendukung iklim usaha	31	
Belum optimalnya kerja sama antar daerah, daerah dengan swasta dan daerah dengan perguruan tinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik;	1	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Jumlah dan jenis kerjasama antar daerah yang berhasil dijalin	5	BP2TPM
Kurangnya promosi terhadap	1	Program Peningkatan	Bertambahnya laju pertumbuhan investasi	5 kali	BP2TPM

**Bab IV Prioritas Dan Sasaran
Pembangunan Daerah Tahun 2014**

investor sehingga investasi yang masuk tidak optimal	Promosi dan Kerjasama Investasi				
	2	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Kenaikan Nilai Realisasi PMDN	Rp100.000.000.000	
	3	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Rasio daya serap tenaga kerja	15.500 orang	
	4	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	- Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	160	
			- Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Rp66.002.005.036	
	5	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	- Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha	2 Perda	
			- PERDA NO. 7 TH. 2009 tentang izin gangguan/HO	1	
			- PERDA NO. 15 TH. 2009 tentang retribusi ijin gangguan	1	
	6	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	- Lama proses perijinan	30 hari	
			- Sistem informasi Pelayanan Perijinan dan administrasi pemerintah	100%	
			- Blue Print investasi daerah	1 Dokumen	
	Kurang optimalnya dukungan terhadap potensi investasi karena kurangnya sumberdaya dan sarana prasarana dalam menarik investor	1	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	- Jumlah investor dan nilai investasi baru yang masuk (nasional & regional)	5
- Jumlah MOU dalam investasi				5	BP2TPM
	2	Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah	jumlah pengembangan kawasan strategis dan cepat tumbuh	2 kawasan	Bappeda
Memperluas Jaringan internet dan intranet dalam	1	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan	- Jangkauan Layanan akses telekomunikasi dan internet di desa/kelurahan	70%	DISHUBBUDPAR

**Bab IV Prioritas Dan Sasaran
Pembangunan Daerah Tahun 2014**

mewujudkan masyarakat berbasis informasi	Media Massa	- Jumlah Warnet di Kabupaten	45	
		- Persentase Kelurahan yang online	70 %	
		- Pembentukan Plasa Informasi	5 Unit	
		- Rasio masyarakat pengguna internet	75 %	
		- Jumlah Jaringan Komunikasi	99%	
		- Jumlah Ibukota kecamatan yang dilayani jaringan broadband	100%	
	2 Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	- Rasio SKPD penggunaan layanan broadband	100%	
Perlunya peningkatan data/informasi dan database yang lengkap dan akurat secara kuantitatif dan kualitatif dalam website	1 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	- Tersedianya layanan publik yang dapat diakses secara online	8 (ULP, SIMPEG, SIPS, PERIJINAN, KTP, SIPPD, SIMPBB, SIMNAKER)	DISHUBBUDPAR
		- Jumlah Sistem Informasi Manajemen Pemerintah Daerah	9	
	2 Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	Jumlah aparatur pemerintah yang paham teknologi informasi	5%	
	4 Program Penguatan Kelembagaan Dalam Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Daerah	Website milik Pemerintah Daerah	1	
	5 Program Kerjasama Informasi dan Media Massa	- Keberadaan e-procurement	Aktif	

**Bab IV Prioritas Dan Sasaran
Pembangunan Daerah Tahun 2014**

		- Adanya media informasi pemda yang dapat diakses oleh publik (website, leaflet/buletin)	4 website		
Budaya daerah belum banyak mendapatkan apresiasi dari masyarakat	1	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	- Jumlah kelompok seni dan budaya Tradisional yang ada	33	DISHUBBUDPAR
			- Jumlah kelompok seni budaya Tradisional yang dibina	33	
			- Jumlah festival seni dan budaya.	6	
			- Frekuensi temu pelaku seni dan budaya	2	
			- Jumlah gedung kesenian	1	
Belum optimalnya pelestarian sejarah dan permuseuman	1	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	1	DISHUBBUDPAR
Daya saing dan daya jual destinasi pariwisata masih lemah. Hal ini disebabkan oleh masih rendahnya kualitas produk dan jasa pariwisata, kurang tersedianya sarana dan prasarana yang memadai di lingkungan obyek dan daya tarik wisata, masih rendahnya kualitas SDM pengelola obyek dan daya tarik wisata, pramuwisata maupun para pelaku pariwisata lainnya	1	Pengembangan Destinasi Pariwisata	- Peningkatan kualitas produk dan jasa pariwisata	10%	DISHUBBUDPAR
			- Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana obyek dan daya tarik wisata	15%	
			- Peningkatan kualitas SDM pengelola obyek wisata	10%	
Sumbangan sektor	1	Pengembangan Destinasi	Jumlah Kunjungan wisata		DISHUBBUDPAR

**Bab IV Prioritas Dan Sasaran
Pembangunan Daerah Tahun 2014**

pariwisata terhadap PAD belum optimal. Hal ini disebabkan oleh belum optimalnya promosi yang dilakukan, baik di dalam maupun luar negeri, sehingga jumlah kunjungan, lama tinggal dan pengeluaran belanja wisatawan masih relatif kecil	Pariwisata	- jumlah kunjungan wisatawan lokal	1.094.676		
		- jumlah kunjungan wisatawan Nusantara	200		
		2 Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Tingkat hunian hotel dengan:		
		- Rata-rata lama tinggal (mancanegara)	3-4 hari		
		- Rata-rata lama tinggal (nusantara)	3-5 hari		
		- Jumlah pendapatan tiap obyek wisata per tahun			
		- Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	7,9%		
	1 Program Penyediaan dan Pengelolaan air Baku	Tersedianya air baku untuk diolah sebagai air bersih di WTP yang telah dibangun	- Penajam : 100 L/det - Waru : 20 L/det - Sepaku : 25 L/det	DPU	
	2 Program Perencanaan Tata Ruang	Pemanfaatan ruang sesuai dengan arahan yang telah disepakati dalam RTRW sehingga setiap pembangunan akan terarah dan berwawasan lingkungan	- Tersusunnya Perda Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi (Zoning Regulation)Kab. PPU - Tersusunnya Dokumen rencana Tata Bangunan dan Lingkungan di beberapa kawasan di Kab. PPU - Pengembangan kawasan industri Buluminung		
	3 Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat	Mempersiapkan Prasarana dalam menunjang kegiatan Ekonomi Masyarakat untuk memperpendek rentang kendali jangkauan pelayanan umum kepada masyarakat	3 gedung		

**Bab IV Prioritas Dan Sasaran
Pembangunan Daerah Tahun 2014**

		Tumbuh		
	4	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Memenuhi kebutuhan air bersih bagi masyarakat dengan jangkauan yang lebih luas	
			- D300 : 28.494 m - D200 : 10.850 m - D160 : 11.612 m	
	5	Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan	Mengurangi jumlah desa/Kelurahan yang belum jangkauan pelayanan air bersih dari WTP di Lawe - Lawe	
	1	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	- Temuwicara	100 org
			- Uji Kelayakan kendaraan	5000 unit
			- Operasi pengendalian disiplin	10 kali
			- Penataan tempat berhenti	100%
			- Database angkutan	1 dok.
			- Penyuluhan tertib lalin	100 org
			- Penghargaan sopir teladan	100 org
			- Monitoring dan evaluasi	1 dok.
	2	Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas	- Pengadaan rambu	500 buah
			- Pengamanan lebaran	1 kegiatan
			- Pengamanan natal dan tahun baru	1 kegiatan
			- Pengamanan kepala daerah	100%
	3	Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Pengadaan kendaraan PKB	1 unit

**Bab IV Prioritas Dan Sasaran
Pembangunan Daerah Tahun 2014**

4	Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim					
Banyaknya perusahaan/kegiatan industri yang belum memiliki instalasi pengolahan limbah (IPAL)	1	Program rehabilitasi hutan dan lahan	Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan Sumber Mata Air	DINAS HUTBUN	
	2	Program pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya	Jumlah rumah tangga pengguna air bersih	90%	DPU	
	3	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	- Pencemaran status mutu air pada kegiatan industri	10%	KLH	
			- Tersedianya NSPK pengolahan dan pembuangan Air limbah Domestik dan Industri, serta Bahan Berbahaya dan Beracun (non-fisik)	ada	KLH	
			- Rasio ketersediaan IPAL	70%	KLH	
			- Pencemaran status baku mutu air		KLH	
	4	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Rasio rumah tangga bersanitasi		DPU	
	Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah	1	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Rasio penanganan sampah perkotaan (pengangkutan)	90%	DPU
	Rendahnya pemahaman/kepedulian masyarakat tentang pengelolaan sampah	1	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	- Pembangunan Tempat Pengelolaan Sampah (TPA)	80 % Sampah Terpadu	DPU
				- Jumlah Tempat Penampungan Sampah Sementara		DPU
Kurangnya lahan terbuka hijau (RTH) dan menurunnya kualitas RTH kota seperti taman-taman kota dan lainnya	1	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	- Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	15%	DPU	
			- Pengembangan RTH Publik Pusat Kota (Kawasan alun- alun)	80%	DPU	
	2	Program pengelolaan areal pemakaman	Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk	6 Ha	DPU	

**Bab IV Prioritas Dan Sasaran
Pembangunan Daerah Tahun 2014**

	3	Program pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya	Sempadan sungai yang dipakai bangunan liar	20%	DPU
Banyaknya kegiatan industri atau kegiatan usaha yang belum memiliki dokumen lingkungan AMDAL, UKL-UPL, DPPL	1	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	- Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL	100%	KLH
			- Jumlah industri berpotensi mencemari udara	7 Perusahaan	KLH
			- Tersedianya Dokumen SLHD	ADA	KLH
			- Penegakan hukum lingkungan hidup	100%	KLH
	1	Program rehabilitasi hutan dan lahan	- Rehabilitasi hutan dan lahan kritis	850 ha	DISHUTBUN
			- Konservasi kawasan hutan	500 ha	DISHUTBUN
			- Rehabilitasi kawasan hutan	1514 ha	DISHUTBUN
Kurangnya lahan terbuka hijau (RTH) dan menurunnya kualitas RTH kota seperti taman-taman kota dan lainnya	1	Program Pembangunan Ruang Terbuka Hijau	Penaatan ruang publik dan paru - paru kota	Penajam : 7,1 Ha	DPU
	2	Program pembangunan Taman Kota	Memperindah kota dan mengurangi polusi	Penajam : 3.700 m ²	
	3	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Peningkatan cakupan pelayanan persampahan	2 kecamatan	
	4	Program Pengelolaan Areal Pemakaman	Menjaga dan memperindah makam	- Penajam : 6,5 Ha	
				- Babulu : 3 Ha	
5	Program Sosialisasi Perijinan	Kegiatan Pembangunan sesuai dengan arahan yang terdapat dalam RTRW	- Sepaku : 7 Ha - waru : 5 ha		

**Bab IV Prioritas Dan Sasaran
Pembangunan Daerah Tahun 2014**

5.	Pembangunan Infrastruktur				
	1	Program Pembangunan Drainase dan Gorong - Gorong	Memperlancar pembuangan air yang terdapat dipermukiman sehingga waktu genangan dipersingkat	- Penajam : 2750 M - Sepaku : 4.150 M - Waru : 31.380 M - Babulu : 1.400 M	DPU
	2	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Meningkatkan Aksesibilitas antar wilayah	- Jalan km - Jembatankm	
	3	Program Rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Meningkatkan Aksesibilitas dan mobilitas antar wilayah berjalan dengan baik dan lancar	- Jembatan 17 buah, - jalan : 160 km	
	4	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	- Perencanaan terminal	1 Paket	
			- Koordinasi	10 org 6 kali	
			- Rehab jembatan apung	1 unit	
	5	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	- Rehab alat uji PKB	1 set	
			- Rehab terminal	2 lokasi	
			- Rehab alat pemberi isyarat lain (APILL)	5 lokasi	
			- Pasang Plafon gedung PKB	480 m2	
			- Sistem Informasi Pengujian Kendaraan (SIPK)	1 paket	
			- Bangun Gudang	135 m2	
			- Pagar PKB	868 m2	
6.	Pemenuhan Kebutuhan Listrik dan Energi				

**Bab IV Prioritas Dan Sasaran
Pembangunan Daerah Tahun 2014**

	Belum optimalnya efisiensi penggunaan energi listrik	1	Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan	<ul style="list-style-type: none"> - Rasio Ketersediaan Penerangan Jalan Umum - Rasio Elektrifikasi Desa/Kelurahan - Rasio Rumah Tangga Pengguna Listrik (PLN) - Pemanfaatan energi baru terbarukan 	60% 100% 70% 1	DISTAMBEN
7.	Kemandirian dan Kedaulatan Pangan					
	Tingginya ketergantungan ketersediaan pangan penduduk dari produksi pangan luar daerah	1	Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan	<ul style="list-style-type: none"> - Ada tidaknya regulasi ketahanan pangan - Ketersediaan pangan utama - Cakupan beras bersubsidi pada KK miskin - Tingkat kerawanan pangan dan gizi 	100% 100% 11.940 KKM Tidak ada	DP3K
	Rendahnya konsumsi masyarakat terhadap pangan yang berkualitas	2	Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan	- Tingkat diversifikasi konsumsi pangan yang beragam bergizi seimbang dan aman	60%	DP3K
	Belum optimalnya intensifikasi lahan ada bidang pertanian sawah			- Tersedianya database produk pangan lokal	100%	
	Rendahnya pendapatan masyarakat dari sektor pangan	3	Program Peningkatan kesejahteraan Petani	Rasio petani terlatih		DP3K
	Rendahnya pengetahuan dan ketrampilan petani terhadap bidang usahanya dalam mendukung intensifikasi lahan dan peningkatan produksi			- Pertanian	75%	
				- Peternakan	65%	
				- Perikanan	75%	
			- Perkebunan	6,5%	DISHUTBUN	

**Bab IV Prioritas Dan Sasaran
Pembangunan Daerah Tahun 2014**

Belum optimalnya kinerja sektor pertanian untuk pengembangan intensifikasi maupun diversifikasi usaha <i>on farm</i> dalam mendukung ketahanan pangan	4	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Jumlah jenis bidang usaha agribisnis		
			- Pertanian	?	DP3K
			- Peternakan	?	DP3K
			- Perikanan	?	DP3K
			- Perkebunan	2 Jenis (kelapa dalam, Karet)	DISHUTBUN
			Meminimalisir kehilangan hasil produksi		
			- Pertanian	8%	DP3K
			- Peternakan	?	DP3K
			- Perikanan	?	DP3K
			- Peningkatan Diversifikasi Hasil Perkebunan	2 komoditi (lada dan kelapa dalam)	DISHUTBUN
Rendahnya nilai tambah, daya saing industri hilir, dan pemasaran hasil pertanian/perkebunan	1	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	Jumlah tempat pengolahan pasca panen		DP3K
			- Pertanian	3 tempat	
			- Peternakan	1 tempat	
			- Perikanan	4 tempat	
			- Perkebunan	2 tempat	DISHUTBUN
			- Jumlah sentra/pasar / Balai Benih budidaya Pertanian/Perkebunan, Peternakan dan perikanan	2 tempat	DISHUTBUN
2	Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya perhektar	56 Kw/Ha	DP3K	
3	Program Peningkatan	- Produksi padi/bahan pangan utama	87.875 ton	DP3K	

**Bab IV Prioritas Dan Sasaran
Pembangunan Daerah Tahun 2014**

	Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan	- Jagung pipil	100 ton	
		- Kedelai	10 ton	
		- Ubikayu	1500 ton	
		- Ubi jalar	1000 ton	
		- Kacang tanah	35 ton	
		- Kacang ijo	10 ton	
		- Pisang		
		- Rumput laut	?	
4	Program pengembangan budidaya perikanan	Jumlah produksi perikanan	161 ton	DP3K
5	Program peningkatan produksi hasil peternakan	Jumlah produksi peternakan		DP3K
		- daging (kg)	708,167 kg	
		- telur (kg)	?	
		- susu (lt)	?	
6	Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan	Jumlah konsumsi produk peternakan		DP3K
		- daging (kg/Kap/th)	15,37	
		- telur (kg/Kap/th)	2,91	
		- susu (lt/Kap/th)	2,39	
7	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	- Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	24,42 %	DP3K

**Bab IV Prioritas Dan Sasaran
Pembangunan Daerah Tahun 2014**

8	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	Cakupan bina kelompok petani	75%	
			4 Kecamatan	
9	Program pengembangan budidaya perikanan	Jumlah produksi perikanan	161 ton	
10	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	Cakupan bina kelompok petani	- 96,00%	
			- 15 kelurahan	
11	Program peningkatan produksi hasil peternakan	Produksi peternakan kelompok ternak :		
		- Sapi	203	
		- Domba	552	
		- Unggas	70.034	
12	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	- Penguatan kelembagaan petani	820 kelompok	DP3K
		- Pertanian	16 kelompok	
		- Peternakan	4 kelompok	
		- Perikanan	17 kelompok	
		- Perkebunan	5 Asosiasi	DISHUTBUN
13	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	- Jumlah penggunaan benih padi bermutu	5000 kg	DP3K
		- jumlah penggunaan teknologi tepat guna	5 jenis	DP3K/ DISHUTBUN
14	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Kebun	- Tingkat serangan OPT yang dapat diatasi	100%	DP3K
		- Tingkat serangan OPT yang dapat diatasi	100%	DISHUTBUN

**Bab IV Prioritas Dan Sasaran
Pembangunan Daerah Tahun 2014**

15	Program peningkatan produksi hasil peternakan	Jumlah bibit		DP3K
		- Sapi	?	
		- Kelinci	?	
16	Program peningkatan produksi hasil peternakan	Jumlah populasi		DP3K
		- unggas	70034	
		- Domba / kambing	552	
		- Bibit sapi	203	
17	Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan	Jumlah Penangkar (unit)		DISHUTBUN
		- Kelapa dalam	1	
		- Karet	1	
		- Lada	1	
18	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	Jumlah pemeriksaan terhadap ternak	12 kali/tahun	DP3K
19	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	Jumlah pemeriksaan sampel hasil produksi ternak	2 kali/tahun	DP3K
20	Program pelayanan kesehatan masyarakat veteriner	Jumlah pemeriksaan dan pengawasan lalulintas ternak	?	DP3K
21	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	- Prosentase pemanfaatan lahan	100%	DP3K
		- Prosentase konservasi sumberdaya lahan dan sumber daya hayati	7%	

**Bab IV Prioritas Dan Sasaran
Pembangunan Daerah Tahun 2014**

	22	Program Pengembangan usaha tani	- Luasan sawit rakyat	16883 ha	DISHUTBUN
			- Luasan karet Rakyat	7051 ha	
			- Luasan Kelapa dalam	4969 ha	
			- Luasan Lada	1419 ha	
			- Luasan Kopi	131 ha	
			- Luasan Kakao	101 ha	
	23	Program Peningkatan Produksi Perkebunan	- Sawit	199725 ton	DISHUTBUN
			- Karet	1210 ton	
			- Kelapa Dalam	2981 ton	
			- Lada	1065 ton	
			- Kopi	54 ton	
			- Kakao	58 ton	
	24	Program rehabilitasi hutan dan lahan	- Rehabilitasi hutan dan lahan kritis	20 ha	DISHUTBUN
			- Konservasi kawasan hutan	71 ha	
			- Kerusakan kawasan hutan	2 ha	
	1	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Menata pemanfaatan air bagi kegiatan pertanian sehingga kebutuhan air bagi kegiatan pertanian tercukupi	- Penajam , Irigasi : 900 M	DPU
				- Sepaku : -	
				- Waru , Irigasi : 1.100 M	
				- Babulu, Irigasi : 500 M	
- Babulu, Pintu Air : 5 unit					

**Bab IV Prioritas Dan Sasaran
Pembangunan Daerah Tahun 2014**

				- 4 kecamatan : Irigasi : 30.000 M (swakelola)	
	2	Pengendalian Banjir	Berkurangnya wilayah genangan banjir pada wilayah pertanian	- Penajam : - Sepaku : 15.500 M - Waru : 29.500 M - Babulu : 5.200 M - 4 Kecamatan : 30.000 M (swakelola)	DPU
	3	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Memperlancar mobilitas kegiatan pertanian	40 km	DPU
8.	Pengentasan Kemiskinan				
	1	Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan	- Peningkatan sarana dan prasarana rumah keluarga miskin - Perbaikan atap rumah keluarga miskin	80 Unit 100 Unit	BPM-PD
	2	Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Pembangunan pasar desa	2 Unit	BPM-PD
	3	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	- Peningkatan terhadap penyediaan modal pedesaan melalui BLM PNPM - Peningkatan Angka Partisipasi masyarakat	54 Desa/ Kelurahan%	
	4	Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	- Pengendalian dan pembinaan alokasi dana desa yang tepat sasaran	30 Desa	BPM-PD
	5	Program pemberdayaan fakir miskin, KAT dan penyandang masalah sosial	- Terwujudnya keluarga sejahtera	2.628 KK miskin dari 10.628 KK Miskin	SOSNAKER

**Bab IV Prioritas Dan Sasaran
Pembangunan Daerah Tahun 2014**

		6	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	- Masyarakat bebas katarak - Masyarakat bebas bibir sumbing	100 orang 20 orang	DINKES
9.	Perluasan Kesempatan Kerja					
		1	Program peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja	- Seleksi peserta pelatihan berbasis masy, berbasis kewirausahaan - Diklat berbasis masy, dan berbasis pengguna	150 orang 80 Orang	SOSNAKER
		2	Program kesempatan kerja dan padat karya produktif	- Padat karya produktif masyarakat	200 Orang	
		3	Program peningkatan kesempatan kerja	- Informasi lowongan kerja	1 Dokumen	
10.	Pelayanan Pendidikan					
		1	Program wajib belajar pendidikan dasar dua belas tahun	- Penyelenggaraan Paket A Setara SD - Penyelenggaraan Paket B Setara SMP - Terbangunnya Gedung unit sekolah baru Terbangunnya RKB - SD - SMP - SMP Unggulan - Standar Nasional - Terbangunnya Gedung Sekolah bertingkat SD	250 Orang 1 Paket 4 Unit 108 RKB 12 RKB 1 Paket 1 Paket 3 Sekolah	DISDIKPORA
		2	Program Pendidikan Menengah	- Penuntasan Wajar Penyelenggaraan paket C - Terbangunnya USB SMK	7 Lembaga 1 Unit	

**Bab IV Prioritas Dan Sasaran
Pembangunan Daerah Tahun 2014**

			- Terbangunnya RKB SMA/SMK	40 Unit		
			- Terbangunnya Rumah dinas guru	40 Unit		
			- Terbangunnya workshop SMK	1 Paket		
	3	Program Peningkatan Mutu	Sekolah Unggul dan Sekolah Model			
			- SMA	1 Sekolah		
			- SMK	1 Sekolah		
			Tersedianya BOSDA	5772 Siswa		
	4	Program Pendidikan Non Formal	- Terselenggaranya pemberian bantuan PNF lembaga PKBM	8 Lembaga		
			- Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan			
11.	Optimalisasi Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan					
	1	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	- Tersedianya obat dan perbekalan kesehatan	1 Paket	DINKES	
			- Terpenuhinya kebutuhan obat di PPU	100%		
	2	Program upaya kesehatan masyarakat	- tersedianya biaya operasional dan pemeliharaan puskesmas	6 Puskesmas non UPTD		
			- terlaksanannya pemeriksaan cholenetrase darah pada petani pengguna pestisida	200 Orang		
			- Pengawasan dan Sosialisasi pada pengelola Depo Air Minum Isi Ulang (DAMIU)	80 Unit		
			- Peningkatan akses sanitasi dasar dapat ditingkatkan serta berkelanjutan	150 Orang Pelatihan		
			- Percepatan Pengembangan Lingkungan sehat (Forum Kabupaten Sehat)	47 Desa Siaga		
	3	Program pengawasan obat dan makanan	- peningkatan pengetahuan tentang pemberdayaan konsumen/masyarakat di bidang obat dan makanan	60 Industri Rumah Tangga		

**Bab IV Prioritas Dan Sasaran
Pembangunan Daerah Tahun 2014**

		- Meningkatkan CPPB (cara pembuatan produksi yang baik) pada industri rumah tangga	60 Industri Rumah Tangga
4	Program Promosi Kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	- Pelaksanaan Desa siaga dapat dilaksanakan berkesinambungan	47 desa
		- Penjaringan dan terbentuknya kader Saka Bakti Husada di sekolah	100 kader saka bakti husada
5	Program Perbaikan Gizi masyarakat	- tersedianya makanan dan vitamin tambahan untuk balita kurang gizi dan ibu hamil KEK / anemia	150 Balita, 100 Ibu hamil
		- tertangulangnya kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya	100 Balita
6	Program pengembangan lingkungan sehat	- meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya lingkungan sehat	150 Orang Masy/Kader/Lintas Sektor
7	Program pencegahan dan Penanggulangan penyakit Menular	- penurunan jumlah kasus DBD dan Malaria	DBD 95 Kasus, Malaria 175 Kasus
		- terbentuknya kekebalan tubuh bagi balita dan anak sekolah dengan vaksinasi	120 Sekolah
		- tertanganinya penderita filariasis (kaki gajah) Orang
		- penanggulangan penyakit HIV/AIDS	17 Orang
		- pengobatan penyakit TBC	100%
		- identifikasi dini Penyakit Malaria, TB, HIV AIDS, Kusta, DBD.	100%
8	Program pengadaan, peningkatan dan Perbaikan sarana dan Prasarana puskesmas/Puskesmas pembantu dan jaringannya	Tersediannya sarana dan prasarana puskesmas	
		- Alkes	13 Puskesmas
		- Puskesmas rawat inap 24 jam	2 unit
		- Klinik perawatan dan IGD	2 unit

**Bab IV Prioritas Dan Sasaran
Pembangunan Daerah Tahun 2014**

		- Rumah dinas paramedis dan perawat	3 unit
		- Gardu incenerator	11 PKM
		- Fasilitas penunjang sarana operasional UPTD	1 unit
		- tersediannya sarana dan prasarana pembuangan limbah puskesmas	11 PKM
9	Program kemitraan peningkatan Pelayanan Kesehatan	- Tercapainya pelayanan pasien peserta JAMKESMAS	9300 Peserta
		- kemitraan pengobatan lanjutan bagi pasien rujukan	9300 Peserta
10	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	Tercapainya penyuluhan kesehatan anak balita	1420 kader posyandu
11	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	- Penurunan angka kematian ibu dan anak	100%
		- pelatihan management asfeksia pada bayi baru lahir	100%

B A B V

R E N C A N A P R O G R A M

D A N K E G I A T A N P R I O R I T A S D A E R A H

Prioritas pembangunan daerah tahun 2014 dijabarkan kedalam program dan kegiatan berdasarkan urusan sebagai berikut :

6.1 Kaidah Pelaksanaan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2012 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2008-2013. Beberapa kaidah pelaksanaan yang perlu mendapat perhatian sebagai berikut :

1. RKPD Tahun 2014 sebagai pedoman penyusunan RAPBD, perlu dijabarkan dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA-APBD) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2014 dan Penyusunan Prioritas Plafon Anggaran (PPA) Tahun Anggaran 2014. Adapun KUA-APBD dan PPA berisi pengelompokan urusan yang bersifat wajib dan/atau pilihan dengan mengacu pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan Permendagri Nomor 59 tahun 2007 tentang Revisi Permendagri Nomor 13 Tahun 2006;
2. Dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas setiap program dan kegiatan, maka Satuan Kerja Perangkat Daerah diwajibkan membuat Rencana Kerja;
3. Masyarakat dan dunia usaha wajib berperan serta dalam pembangunan, baik sebagai pelaksana maupun sebagai pengawas pelaksanaan kebijakan dan program/kegiatan;
4. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2014, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara berkewajiban untuk melakukan pemantauan terhadap penjabaran dan sinergitas RKPD Tahun 2014;
5. Pada akhir tahun anggaran 2014, setiap Kepala SKPD wajib melakukan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Rencana Pembangunan/Kegiatan Tahun 2014;
6. Kepala Bappeda menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD. Hasil evaluasi ini menjadi bahan bagi penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk periode tahun 2015.

6.2 Penutup

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan dalam upaya meningkatkan dan menciptakan kinerja pemerintah yang

lebih efektif, optimal untuk mencapai sasaran. RKPD berfungsi sebagai acuan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Kebijakan Umum APBD maupun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang merupakan kesepakatan antara Eksekutif dan Legislatif sebelum dituangkan ke dalam RAPBD.

Satuan Kerja Perangkat Daerah di jajaran Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan berkewajiban mempedomani RKPD dalam menyusun langkah dan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.

Keberhasilan pembangunan daerah selain ditentukan oleh kualitas produk perencanaan, juga sangat ditentukan oleh sikap, mental, tekad, semangat, kejujuran dan disiplin para pelaku pembangunan (*stakeholders*) dalam mengaplikasikan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Dengan demikian pelaksanaan pembangunan diharapkan mampu menjawab dan mengurangi permasalahan yang ada dan memanfaatkan serta mengelola potensi sumber daya yang dimiliki, yang semuanya akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

BUPATI PENAJAM PASER UTARA

Ttd

H. ANDI HARAHAHAP